

KUALITAS HAKIM DALAM PUTUSAN



Salah satu hal yang menarik yang terus dibudayakan oleh Komisi Yudisial selama ini adalah melibatkan kalangan akademis dan lembaga swadaya masyarakat yang notabene adalah jejaring mereka dalam pelaksanaan program kerja penelitian putusan. Pelibatan jejaring dilakukan dengan cara proses penunjukan secara langsung. Penunjukan itu ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi kinerja setiap jejaring dalam keikutsertaan mereka di tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya sehubungan dengan putusan-putusan yang dijadikan objek penelitian, Komisi Yudisial dan tim pakar sepakat untuk memilih putusan-putusan pengadilan tinggi dan tingkat pertama sebagai objek penelitian. Pemilihan objek penelitian itu disebabkan Komisi Yudisial ingin memotret kualitas putusan dari para hakim pengadilan tingkat banding yang suatu saat berpotensi untuk diusulkan sebagai hakim agung.

Untuk memotret kualitas putusan hakim pengadilan tingkat banding dan pertama tersebut, Komisi Yudisial dan tim pakar kemudian menjadikan lima indikator sebagai tolak ukur, yaitu ketaatan pada hukum acara, hukum materil, penalaran hukum, dan penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta profesionalisme hakim.



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



Diterbitkan atas kerjasama :

Pusat Analisis dan Layanan Informasi © 2014

Jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat
Telp. 021 390 5876, Fax. 021 390 6189, PO BOX 2685
website : www.komisiyudisial.go.id



The Jawa Pos Institute Of Pro-Otonomi

Graha Pena Lt.8 Suite 801
Jl. Jend. A. Yani No.88, Surabaya 60234
Telp. 031 8202 038, Fax. 031 8202 081
Website : www.jpip.or.id

KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

KUALITAS HAKIM DALAM PUTUSAN



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

KUALITAS HAKIM DALAM PUTUSAN





Zeric K Smith

Director of Democratic Governance, USAID Indonesia

Legal proceedings in a courtroom are often very complex and thus difficult for the general public to understand. The role of the Judicial Commission in monitoring court proceedings and the actions of individual judges is very important to build public trust in Indonesia's justice system. The Commission needs the mass media to help it explain judicial proceedings to the public, and the media need access to information from the Commission. USAID is very pleased that the Commission has participated enthusiastically in our Strengthening Integrity and Accountability Program (SIAP 2) with JPIP. This partnership has strengthened relationships between the Commission and journalists in a mutually beneficial manner, increasing the public's access to information on the workings of the judicial system.

Kualitas Hakim dalam Putusan

*Laporan Penelitian
Putusan Hakim Tahun 2012*



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
Cetakan Pertama, 2014

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengcopy atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Kualitas Hakim dalam Putusan

Pengarah

*Dr. Suparman Marzuki, S.H., M. Si.
Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.*

Penanggungjawab

Danang Wijayanto

Ketua

Roejito

Wakil Ketua

Tri Purno utomo

Tim Analisis

*Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
Dr. Anton F Susanto, S.H., M.Hum.
Dr. FX Joko Priyono, S.H., M.Hum.
Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H.*

Asisten Analis

*Elza Faiz
Hendro Sukmono
M. Ilham
Ikhsan Azhar
Nur Aini Fatmawati*

Desain & Layout

*Dodi Widodo
W. Eka Putra*

Buku ini diterbitkan oleh:
Sekretariat jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat
Telp. 021-3905876, Fax: 021-3906215, PO Box 2685
www.komisiyudisial.go.id

Daftar Isi

| | |
|--|------|
| Daftar isi | iii |
| Daftar Tabel dan Ragaan | v |
| Kata Pengantar Tim Analisis | vii |
| Sekapur Sirih Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, dan Litbang Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum. | xi |
| Kata Sambutan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Dr. Suparman Marzuki, S.H., M. Si. | xv |
| Kata Sambutan Direktur Eksekutif The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) Rohman Budijanto | xvii |
| Bab I | |
| Pendahuluan | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan Penelitian | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Kerangka Pemikiran | 6 |
| F. Kerangka Teoretik | 6 |
| G. Metode Penelitian | 12 |
| H. Organisasi Penelitian | 15 |
| I. Jadwal Kegiatan | 16 |
| J. Kendala dan Kelemahan dalam Penelitian | 17 |
| K. Objek Kajian | 21 |

| | |
|---------------------------|-----|
| Bab II | |
| Analisis Hasil Penelitian | |
| A. Analisis Kuantitatif | 23 |
| B. Analisis Kualitatif | 45 |
| | |
| Bab III | |
| Penutup | |
| A. Rangkuman | 71 |
| B. Simpulan | 76 |
| Daftar Pustaka | 78 |
| Lampiran I | 79 |
| Lampiran II | 128 |
| Lampiran III | 138 |

Daftar Tabel dan Ragaan

| Tabel | | |
|-------|---|----|
| I. | Teknik Pengumpulan Data | 14 |
| II. | Jadwal Kegiatan | 17 |
| III. | Daftar Para Hakim Tinggi yang Putusannya Dianalisis (<i>Lampiran</i>) | |
| IV. | Kode Jejaring dan Putusan yang Dianalisis (<i>lampiran</i>) | |
| V. | Putusan dan Majelis Hakim di Pengadilan Tingkat Banding (<i>lampiran</i>) | |
| VI. | Delapan Putusan yang Dikecualikan | 27 |
| VII. | Jumlah Putusan Perkara Pidana (<i>lampiran</i>) | |
| VIII. | Jumlah Putusan Perkara Perdata (<i>lampiran</i>) | |
| IX. | Aspek Pemenuhan Hukum Acara Pidana PT | 29 |
| X. | Aspek Pemenuhan Hukum Acara Perdata PT | 29 |
| XI. | Aspek Penerapan Hukum Pidana Material PT | 31 |
| XII. | Aspek Penerapan Hukum Perdata Material PT | 31 |
| XIII. | Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara Pidana PT | 33 |
| XIV. | Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara Perdata PT | 33 |
| XV | Aspek Nilai-Nilai yang Hidup dalam Masyarakat (Perkara Pidana) PT | 35 |
| XVI | Aspek Nilai-Nilai yang Hidup dalam Masyarakat (Perkara Perdata) PT | 35 |

| | | |
|---------|---|----|
| XVII. | Profesionalisme Hakim Perkara Pidana PT | 36 |
| XVIII. | Profesionalisme Hakim Perkara Perdata PT | 37 |
| XIX. | Dasar Gugatan Perkara Perdata di PT | 37 |
| XX. | Klasifikasi Amar Putusan (Perkara Perdata) PT | 38 |
| XXI. | Aspek Pemenuhan Hukum Acara Pidana PN | 38 |
| XXII. | Aspek Pemenuhan Hukum Acara Perdata PN | 39 |
| XXIII. | Aspek Penerapan Hukum Pidana Material PN | 40 |
| XXIV. | Aspek Penerapan Hukum Perdata Material PN | 41 |
| XXV. | Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara Pidana PN | 42 |
| XXVI. | Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara Perdata PN | 42 |
| XXVII. | Aspek Nilai-Nilai yang Hidup dalam Masyarakat (Perkara Pidana) PN | 43 |
| XXVIII. | Aspek Nilai-Nilai yang Hidup dalam Masyarakat (Perkara Perdata) PN | 43 |
| XXIX. | Profesionalisme Hakim Perkara Pidana PN | 44 |
| XXX. | Profesionalisme Hakim Perkara Perdata PN | 44 |
| XXXI. | Dasar Gugatan Putusan Perdata PN | 45 |

Ragaan

| | | |
|----|-----------------------|----|
| 1. | Kerangka Pemikiran | 6 |
| 2. | Organisasi Penelitian | 16 |

Kata Pengantar

Dua tahun berturut-turut Komisi Yudisial Republik Indonesia melakukan penelitian yang bertitik tolak dari putusan pengadilan tingkat banding. Pada tahun-tahun sebelum itu, yang menjadi fokus penelitian adalah putusan pengadilan tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri. Alasan dari pemilihan objek kajian putusan pengadilan tingkat banding ini didasarkan pada kebutuhan Komisi Yudisial untuk memperoleh informasi tambahan terkait hakim-hakim di pengadilan tingkat banding, yang suatu saat akan dicalonkan menjadi hakim agung. Dengan mempelajari beberapa putusan yang pernah dihasilkan oleh hakim-hakim tersebut, sedikit-banyak dapat diperoleh gambaran kualitas putusan (karya profesi) mereka.

Hampir semua putusan yang dikaji ini berada dalam lingkungan peradilan umum, dan hanya ada satu dari lingkungan peradilan agama. Lingkup pengambilan sampel objek penelitian tersebut berdasar pada daftar nama-nama hakim pengadilan tingkat banding yang dipandang berpotensi untuk dicalonkan sebagai hakim agung dalam beberapa masa ke depan. Pada tahun ini rancangan penelitian mencakupi 75 orang hakim di pengadilan tingkat banding, sementara jumlah putusnya sendiri ada 150 buah, yang terdiri dari putusan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama. Tentu saja, pemilihan sampel putusan dengan berangkat dari figur hakim seperti ini memiliki konsekuensi tersendiri secara

metodologis. Daftar nama hakim yang diteliti dapat sewaktu-waktu berubah seiring dengan mobilitas kedinasan mereka.

Konklusi yang dihasilkan, pertama-tama wajib dibaca dalam konteks kebutuhan Komisi Yudisial untuk mencari informasi tambahan terkait dengan putusan-putusan yang dihasilkan para calon hakim agung. Kendati demikian, pengalaman dari penelitian-penelitian serupa yang dilakukan Komisi Yudisial sejak tahun 2007, telah memperkuat suatu pola kecenderungan jawaban yang sama atas putusan-putusan pengadilan di Indonesia, dalam tingkatan manapun. Artinya, hasil penelitian inipun sebenarnya dapat juga dibaca sebagai gambaran yang cukup kuat merepresentasikan kualitas putusan-putusan hakim kita pada umumnya.

Kerja keras dalam penelitian ini menjadi beban tanggung jawab banyak pundak. Secara konseptual dan kebijakan, program penelitian ini berada dalam kendali para Anggota Komisi Yudisial, khususnya Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.H. Ketua dan para anggota Komisi Yudisial lainnya, tidak ketinggalan, ikut pula memberikan perhatian, bahkan tampil menjadi narasumber untuk menilai laporan penelitian dalam dua kali acara monitoring-evaluasi (monev) di Yogyakarta/ Medan dan Bandung. Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Leksiga, Tenaga Ahli, dan staf sekretariat Komisi Yudisial adalah sosok-sosok penting yang mengawal program penelitian ini dari waktu ke waktu. Ujung tombak dari rangkaian penelitian ini tentu para dosen dan aktivis peneliti di tingkat jejaring. Jika tiap tim di tingkat jejaring terdiri dari sekitar lima orang, berarti ada sekitar 75 orang peneliti yang berkontribusi dalam penelitian atas 150 putusan pengadilan tersebut. Kepada semua pihak di atas, disampaikan penghargaan dan terima kasih.

Seperti halnya penelitian-penelitian terdahulu, dalam penelitian kali inipun terdapat dua pendekatan yang digunakan sekaligus. Pendekatan kuantitatif umumnya dipakai untuk memperoleh keluasan, sementara pendekatan

kualitatif digunakan untuk mendapatkan kedalaman. Dr. F.X. Joko Priyono mendapat tugas khusus untuk mengerjakan laporan dengan pendekatan kuantitatif, sementara pendekatan kualitatif digarap bertiga oleh anggota tim analisis lainnya.

Pada akhirnya, laporan akhir penelitian ini pun disadari masih sangat jauh dari sempurna untuk dapat memenuhi harapan semua pihak. Namun, satu harapan sederhana kiranya tetap layak dilayangkan, yakni agar laporan ini bermanfaat untuk meningkatkan upaya kita semua bagi perbaikan kualitas penegakan hukum di Tanah Air, khususnya sejauh hal itu terkait langsung atau tidak langsung dengan tugas-tugas Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Jakarta, Juni 2014

Tim Analisis



Sekapur Sirih

Segala puji dan karunia hanya milik Allah SWT, maka sepantasnya kita sebagai ciptaannya senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya, sehingga penelitian atas putusan hakim baik putusan tingkat pertama maupun banding pada tahun 2012 ini dapat disusun dalam bentuk buku dengan judul “Kualitas Hakim dalam Putusan”.

Penelitian ini merupakan program Komisi Yudisial dalam rangka menjalankan wewenang menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Penelitian tahun 2012 ini pada dasarnya merupakan kelanjutan program yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2007. Program penelitian ini memiliki titik tekan sendiri untuk melihat dan memperoleh gambaran tentang kualitas suatu putusan, selain itu penelitian juga dilakukan melalui pendekatan akademis yang kental, dan dilaksanakan oleh unsur jejaring yang berasal dari Perguruan Tinggi, sehingga hasilnya diharapkan obyektif, serta dapat melihat potret yang sebenarnya tentang apa yang ada dalam putusan dari perspektif akademik.

Komisi Yudisial percaya bahwa penelitian yang menjadikan putusan sebagai objek utamanya merupakan program yang sangat penting, lembaga peradilan memainkan peranan penting untuk mengelolah segala permasalahan hukum dari setiap warga negara yang mengalami kesulitan dalam mencari keadilan. Walaupun berbagai predikat yang sering dialamatkan kepada lembaga peradilan, tetapi

l lembaga peradilan tetap diharapkan menjadi sarana bagi pencari keadilan untuk memperoleh keadilan. Hal tersebut sebagaimana juga diungkapkan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH.,MA., bahwa lembaga peradilan merupakan andalan masyarakat dan bahkan menjadi tumpuan harapan terakhir bagi mereka yang mencari keadilan melalui hukum.¹ Ungkapan *man behind the gun* terasa pas untuk menjelaskan apa dan bagaimana para hakim itu melakukan tugas mereka di pengadilan.²

Dengan menggambarkan kualitas putusan dalam buku hasil penelitian ini, dapat menjadi referensi bagi para hakim untuk melakukan koreksi apa yang telah dihasilkannya melalui putusan tersebut. Sehingga fungsi pencegahan untuk menghasilkan putusan yang berkualitas lambat laun dapat diwujudkan.

Atas dasar hal tersebut, penelitian tahun 2012 ini mencoba untuk mengungkap mengenai kualitas hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara dan bagaimana sikap hakim terhadap hasil pemeriksaan tersebut dalam putusannya. Didalamnya diteliti tentang ketaatan terhadap hukum formil, bagaimana sikap hakim dalam menerapkan hukum materil terhadap suatu perkara konkret, adakah usaha hakim untuk melakukan proses penemuan hukum, bagaimana logika-logika hukum itu dilakukan dan ditempuh oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam pada itu, apabila peran dan fungsi Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan sudah optimal, maka peran Hakim sebagai komponen utama lembaga peradilan, sekaligus sebagai bagian yang strategis dan sentral dari kekuasaan kehakiman, Hakim selain telah memberikan kontribusi dalam melaksanakan misi institusinya, juga menjadi kontributor

¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, 2006, hlm. 209.

² *Ibid*, hlm. 210.

dalam proses pelayanan publik dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran.³

Sesuai uraian diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran positif dan memotivasi kalangan Hakim tentang kualitas suatu putusan, lebih dari itu, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat juga bagi dunia perguruan tinggi khususnya civitas akademika fakultas hukum, sebagai referensi hukum sekaligus menjadi bahan kajian untuk ditelaah lebih lanjut. Ini penting agar fakultas hukum berkontribusi secara aktif dalam upaya mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa.

Kepada jejaring peneliti, tim pakar beserta semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian ini, saya ucapkan terima kasih. Dengan harapan, hasil penelitian ini dapat menjadi amal jariyah atau warisan berharga kita bersama dalam upaya mendorong lahirnya hakim yang berintegritas, berkualitas dan profesional, serta terwujudnya peradilan yang bersih dan berwibawa. Semoga.

Jakarta, Juni 2014
Ketua Bidang Sumber Daya Manusia,
Advokasi, Hukum, dan Litbang

Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, S.H, M.Hum.

³ *Ibid*



Kata Sambutan

Salah satu program penting Komisi Yudisial adalah melakukan penelitian putusan hakim dari pelbagai jenjang pengadilan dengan ragam putusan. Ada putusan pengadilan pidana, perdata, agama, dan tata usaha negara oleh hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, maupun dari hakim Pengadilan tingkat banding.

Bagi Komisi Yudisial, putusan hakim tidak sekedar untaian kata-kata dan kalimat yang merangkum proses memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, tetapi juga gambaran dari kualitas personal, kualitas majelis, dan kualitas proses persidangan itu sendiri. Putusan hakim adalah dokumen hidup yang dapat berbicara dan menjelaskan banyak hal, yang dapat dimaknai dengan pelbagai interpretasi. Putusan menggambarkan paradigma hukum, komitmen, keberpihakan hakim, ketelitian, kecermatan; bahkan menggambarkan pergulatan kemanusiaan hakim sebagai pengadil dalam suatu perkara.

Para peneliti membedah putusan-putusan hakim tersebut dari pelbagai perspektif, Antara lain filsafat hukum, teori-teori hukum, dan sosiologi hukum. Temuan-temuannya sangat menarik dan member gambaran komprehensif tentang pelbagai aspek dari putusan itu.

Penelitian yang melibatkan Jejaring Komisi Yudisial, yaitu dosen-dosen dari sejumlah fakultas hukum di Indonesia

itu merupakan penelitian tahunan yang telah berlangsung semenjak tahun 2007. Informasi atau temuan dari penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu hukum, bahan pengajaran di fakultas-fakultas hukum, pelatihan hakim, dan kepentingan promosi mutasi hakim.

Komisi Yudisial menyampaikan terimakasih banyak kepada Jejaring, khususnya kepada para peneliti atas kerjasamanya. Begitu juga kepada staf dan Tenaga Ahli Komisi Yudisial yang mengawal program ini, kami ucapkan terimakasih. Kepada para pembaca, mohon kritik sarannya untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya.

Jakarta, Juni 2014
Ketua Komisi Yudisial

Dr. SuparmanMarzuki, S.H., M. Si.

Kata Sambutan

Menelisik Titah “Produsen” Keadilan

Alangkah sering kita mendengar ungkapan, “Ini negara hukum!”. Kata-kata itu kadang muncul dengan sergahan dari pejabat negara, aparat, korban kejahatan, rakyat biasa, tersangka, bahkan koruptor. Ungkapan itu justru muncul ketika ada kesan keraguan, bahwa hukum benar-benar ditegakkan. Atau proses perkara yang menonjol berjalan lambat. Atau juga kata-kata pantulan harapan untuk berkelit lewat proses hukum.

Akil Mochtar bisa dijadikan contoh. “Omong kosong, kita ini negara hukum. Mereka sendiri enggak ngerti hukum sebagai pimpinan lembaga itu,” kata Akil saat jeda sidang tuntutan terhadapnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (16/6/2014). Akil menyergah, ketika mengetahui tuntutan penjara seumur hidupnya sudah diungkapkan KPK ke media sebelum persidangan.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu akhirnya benar-benar divonis seumur hidup. Tentu ini ironis dengan ucapannya. Sang mantan hakim menuduh pimpinan KPK tidak tahu hukum, ternyata dia dinyatakan melanggar hukum. Dia seakan lupa, bahwa saat melakukan korupsi “ini adalah negara hukum”. Akil dinilai pantas dihukum untuk masuk penjara hingga mati, justru karena dia tahu hukum tapi menyalahgunakan hukum.

Ironisnya lagi, dalam hukum putusan yang dikeluarkan Akil terhadap setidaknya 10 pemilihan kepala daerah, tetap dianggap sah. Padahal, vonis hakim Tipikor menyebut semasa mengetuai sidang di MK dia menerima suap, gratifikasi, atau janji dari sengketa-sengketa pilkada ini. Dasarnya, asas res judicata pro veritate habetur alias putusan hakim dianggap benar.

Repotnya, dalam putusan itu ada dua putusan hakim yang dianggap benar. Yakni, putusan atas 10 sengketa pemilihan kepala daerah yang dikeluarkan Akil dan majelis hakim yang dipimpinnya saat di MK. Yang kedua, juga dianggap benar adalah putusan majelis hakim Tipikor yang menyebut Akil menerima suap, gratifikasi, atau janji dari 10 perkara itu.

Lebih repot lagi, putusan majelis hakim Tipikor masih bisa dipersoalkan ke pengadilan banding (“Sampai ke Tuhan, malaikat, atau surga pun, saya akan banding,” seru Akil). Selain itu, kalau tak puas lagi, bisa kasasi hingga peninjauan kembali (PK). Sedangkan putusan di MK, termasuk yang dibuat Akil tadi, dinyatakan “final dan mengikat”. Hukum tak memberi pintu mempersoalkannya.

Kalau pintu kepastian hukum tertutup, barangkali “pintu keadilan” masih terbuka. Bisa saja semua dari ke-10 kepala daerah itu nanti divonis bersalah terkait putusan terhadap Akil. Meskipun putusan yang memenangkan mereka di MK tak bisa dikoreksi, tapi bekal vonis bersalah itu, serta kenyataan secara fisik mereka masuk penjara, harus mundur atau diberhentikan dari kepala daerah. Memang keadilan lewat “jalur memutar” ini tidak sempurna. Pengganti orang yang masuk penjara itu belum tentu lawannya yang dikalahkan dalam putusan majelis hakim Akil.

Hukum memang rumit. Meski ada asas “peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan” sangat sulit diwujudkan dalam peradilan biasa. Yang mungkin bisa

mencapainya hanya peradilan tilang lalu lintas. Itu pun keadilannya tetap bisa dipertanyakan, karena barang buktinya (“bukti pelanggaran” atau tilang) bisa saja produk subjektif petugas lalu lintas di jalanan. Dan, biasanya hakim hanya mengamini tilang itu, dan mengetokkan palu denda.

Lebih rumit lagi bagaimana mengukur kualitas putusan hakim. Ada asas *freedom of judiciary* (kemerdekaan kekuasaan kehakiman) sering menjadikan ukuran kualitas putusan itu sangat subjektif. Hakim diberi kebebasan berjalan di koridor yang ditetapkan undang-undang. Hukuman maksimal dan minimal tak boleh melebihi yang dibuat para legislator.

Dalam kasus tertentu “kemerdekaan” ini bisa juga menyalahi koridor peraturan. Misal, siapa yang akan mengoreksi, bila MK dalam menafsirkan UUD 1945 menyalahi akal sehat, bahkan menyalahi aturan tertulis dalam konstitusi itu sendiri. Misalnya, pasal 24 Bayat (1) konstitusi kita menyebut: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”

Tetapi, seperti diketahui, MK menolak diawasi KY lewat putusan *judicial review*-nya. Ada asas hukum yang secara kasat mata dilanggar: *nemo iudex indoneus in propria* (tiada seorang pun yang bisa menjadi hakim yang baik bagi perkaranya sendiri). Tetapi, apa mau dikata? Tafsiran yang berlaku tetap putusan hakim, yakni putusan hakim dianggap benar tadi. Apakah ini yang disebut “batas kemampuan hukum”?

Bisa saja “kemerdekaan” itu diterjemahkan hakim untuk kepentingan yang lebih sempit lagi. Seperti disebut dalam buku yang akan Anda nikmati itu, putusan berdasarkan suara perut si hakim. Lebih repot, bila perutnya sudah kenyang, tapi si hakim mendengarkan “suara

keserakahan” sebelum membuat putusan. Perut memang bisa kenyang dan berhenti makan, tetapi kerakusan sulit untuk dikenyangkan. Padahal, sekali lagi, putusan hakim tetap dianggap benar; apakah itu karena mendengar suara batin atau “suara batin” alias keinginan famili.

Ada anjuran dalam buku ini, agar hakim mendengar “telinga subjektif” dan “telinga sosial”. Anjuran ini patut didengar, meski tetap tak sederhana. Apalagi kadang masyarakat hanya menerima informasi yang tidak selengkap kesaksian di persidangan. Masyarakat punya “telinga subjektif”-nya sendiri. Biasanya menyangkut kasus orang miskin atau orang duafa melawan “orang kuat” akan sangat gampang mengundang simpati. Meskipun secara pasal hukum si kecil itu bersalah, “mulut sosial” minta dibebaskan. Apalagi ada kesenjangan penanganan dalam kasus-kasus serupa menyangkut “orang kuat”.

“Mulut sosial” juga kadang tak mau tahu, bahwa setiap kasus itu berdiri sendiri. Hakim kita tak diwajibkan mengacu pada putusan hakim lain, meski tak dilarang. Meski begitu, perlu dicatat, bahwa keinginan agar putusan bisa dicerna dengan akal sehat yang sederhana serta mencerminkan kesetaraan di depan hukum adalah harapan pengadilan punya standar putusan yang adil. Sehingga betapapun lembaga peradilan ditangani segelintir elit, tetap bisa menjadi tumpuan orang-orang yang berharap keadilan. Orang yang dizalimi tak putus asa karena ada pengadilan, “produsen keadilan”.

Meski rumit, ikhtiar untuk meneliti putusan hakim di tingkat banding ini patut dihargai semahal-mahalnya. Apalagi tujuannya mulia, yakni mencari stok calon hakim agung. Hakim berstatus “tinggi” mestinya memang membuat putusan lebih baik (apapun makna “baik” di sini) dibanding hakim pengadilan tingkat pertama. Apalagi nanti menjadi hakim agung, sebuah status yang hanya bisa dicapai sedikit orang Indonesia. Mereka semestinya “agung” dalam

meyakinkan lewat logika, serta “agung” dalam menerjemahkan rasa keadilan.

Harapannya, kelak putusan pengadilan punya standar agung, meskipun itu putusan pengadilan tingkat terbawah. Bukankah di tingkat manapun, hakim adalah wakil Tuhan yang Maha Agung?

Oleh :

Rohman Budijanto

Direktur Eksekutif The Jawa Pos Institute of
Pro-Otonomi (JPIP)



Bab 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Komisi Yudisial Republik Indonesia telah melakukan penelitian putusan hakim dari waktu ke waktu, dan dalam setiap program penelitian tersebut selalu terbuka dilakukan modifikasi sehubungan dengan adanya kebutuhan Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan perannya. Penelitian putusan hakim tahun 2012, misalnya, didisain antara lain untuk menopang tugas Komisi Yudisial dalam memotret kualitas putusan dari para hakim pengadilan tingkat banding yang suatu saat berpotensi untuk diusulkan sebagai hakim agung. Bersamaan dengan itu, disadari bahwa putusan-putusan pengadilan banding biasanya juga tidak cukup detail memuat uraian pertimbangannya karena sebagian tinggal mengambil alih pertimbangan hakim di pengadilan tingkat sebelumnya. Itulah sebabnya, putusan-putusan pengadilan tinggi ini dianalisis secara tandem dengan putusan-putusan pengadilan tingkat pertama.

Tujuan praktis di atas tentu tidak boleh sampai mengurangi pertanggungjawaban ilmiah terhadap proses dan hasil penelitian ini. Di satu sisi, penelitian ini ingin menjadikan putusan hakim sebagai salah satu bahan informasi. Di sisi lain, ada kesadaran penuh

bahwa teks putusan sendiri memiliki keterbatasan untuk mengungkapkan banyak hal yang diperlukan. Teks putusan tersebut perlu diperkaya dengan data tambahan untuk memberi latar belakang (konteks) munculnya putusan tersebut. Data tambahan ini dapat digali melalui penggalangan data primer, khususnya dengan teknik wawancara.

Basis awal dari penelitian ini adalah personalia para hakim yang saat ini bertugas di pengadilan tingkat banding. Nama-nama hakim tersebut ditetapkan di dalam daftar yang disiapkan oleh Komisi Yudisial. Putusan hakim-hakim tersebut dijadikan sampel dalam penelitian ini. Sampel putusan tidak dipilih secara random, melainkan secara purposif oleh hakim pengadilan tingkat banding itu sendiri. Dengan teknik pemilihan sampel demikian, dapat diasumsikan putusan yang diberikan adalah [salah satu] putusan “terbaik” selama perjalanan karir hakim tersebut. Dapat saja dinyatakan bahwa idealnya setiap putusan adalah selalu putusan terbaik yang bisa dihadirkan dalam perkara tertentu, sehingga pengertian “terbaik” disini dapat saja berangkat dari pilihan subjektif para hakim. Untuk itu, kriteria “terbaik” dalam konteks ini lebih diartikan sebagai putusan yang mengesankan sepanjang karier sebagai hakim di pengadilan tinggi, dilihat dari aspek kompleksitas perkara yang ditangani yang memicu hakim untuk melakukan penemuan hukum. Tentu saja, keterlibatan individual hakim yang bersangkutan juga penting diperhatikan, mengingat posisi yang bersangkutan di dalam majelis hakim itu dapat sebagai ketua atau anggota. Putusan yang dipilih itu harus putusan yang dipandang oleh hakim tersebut sebagai karya profesi yang secara intens memang mewakili pandangannya, terlepas apapun posisinya di dalam majelis itu.

Sama seperti halnya dengan penelitian tahun-tahun lalu, penelitian putusan hakim tahun ini juga melibatkan jejaring Komisi Yudisial. Pilihan terhadap jejaring peneliti ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi kinerja dalam keikutsertaan jejaring dalam penelitian tahun-tahun sebelumnya, juga representasi kewilayahan Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, diperoleh 15 institusi perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang akan dilibatkan sebagai peneliti di tingkat jejaring.

Putusan pengadilan tingkat banding tentu saja berhubungan dengan pengadilan tingkat pertama. Oleh sebab itu, penelitian ini menganalisis suatu perkara dengan luaran (*output*) dua laporan sekaligus, yakni laporan putusan pengadilan tingkat banding dan laporan pengadilan tingkat pertama. Laporan putusan pengadilan tingkat banding dikorelasikan dengan figur hakim tertentu, sementara laporan putusan pengadilan tingkat pertama lebih diarahkan pada majelis hakim secara keseluruhan. Bagaimanapun juga hakim-hakim pengadilan tingkat pertama ini pada gilirannya tentu berpotensi pula mengisi posisi-posisi strategis dalam lembaga peradilan di Tanah Air. Basis data dari analisis putusan-putusan pengadilan tingkat pertama ini, dengan demikian, tidak hanya bermanfaat untuk menjadi komparasi terhadap hasil analisis putusan pengadilan tingkat banding dalam perkara yang sama, tetapi juga bermanfaat untuk memperkaya basis data tentang hakim-hakim yang saat ini masih berkarir di pengadilan tingkat pertama, sekaligus untuk memotret gambaran umum tentang putusan-putusan pengadilan tingkat pertama sebagaimana telah dilakukan melalui penelitian-penelitian sebelumnya.

Hal-hal yang dapat dilacak dalam putusan (secara tekstual) seperti ketaatan pada hukum acara, hukum

materiil, penalaran hukum, penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dijadikan fokus permasalahan. Keempat permasalahan pokok ini mengarahkan pada permasalahan kelima yang juga diangkat dalam penelitian ini, yaitu tentang profesionalisme hakim.

Butir 10 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim memuat terminologi “profesional” yang dimaknai sebagai suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional kemudian mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien. Derivasi dari butir kode etik ini dalam batas-batas tertentu juga mengacu pada empat fokus pertanyaan terkait ketaatan pada hukum acara, penguasaan hukum materiil, penalaran hukum, dan penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan atas latar belakang masalah dan pemikiran di atas, maka pertanyaan-pertanyaan dasar yang perlu dijawab melalui penelitian ini adalah:

1. Apakah putusan hakim tersebut telah mengikuti prosedur hukum acara?
2. Terkait dengan hukum materiil, apakah putusan hakim telah dapat membuktikan unsur yang didakwa/digugat?
3. Apakah putusan hakim telah mencerminkan penalaran hukum yang logis (runtut dan sistematis)?

4. Apakah putusan hakim telah menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (aspek non-yuridis)?
5. Bagaimana profesionalisme hakim dalam penyelesaian perkara ini?

C. Tujuan Penelitian

Permasalahan penelitian di atas dijawab lewat penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kecenderungan putusan-putusan hakim pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama yang menjadi sampel penelitian ini dalam hal ketaatan pada hukum acara, penguasaan hukum material, penalaran hukum, dan penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, untuk sekaligus menggambarkan profesionalisme hakim dalam penyelesaian suatu perkara.

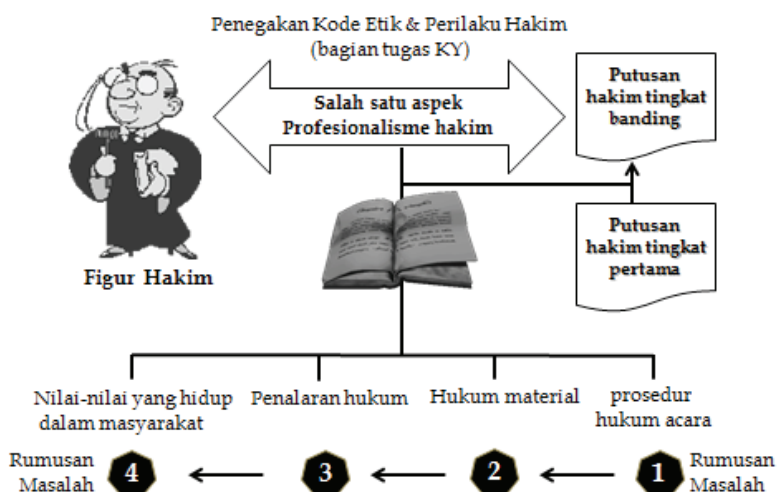
D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan masukan bagi penyusunan basis data, baik secara individual maupun kolektif tentang figur hakim-hakim pengadilan tingkat banding yang berpotensi sebagai hakim agung (jalur karir) dan hakim-hakim pengadilan tingkat pertama yang suatu saat akan mengisi posisi strategis tersebut.
2. Sebagai sarana berbagi (*sharing*) informasi akademisi dan praktisi hukum; bagi akademisi hukum penelitian ini akan memberikan pengayaan aspek praktik hukum (*practically aspect enrichment*); bagi praktisi hukum penelitian ini akan memberikan pengayaan aspek teoritik hukum (*theoretically aspect enrichment*).
3. Memperkuat hubungan kerja sama KY dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga swadaya

masyarakat yang peduli terhadap martabat dan keluhuran peradilan, khususnya hakim di Tanah Air.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk memberikan kejelasan mengenai kerangka pemikiran dalam penelitian ini, dapat dilihat ragaan di bawah ini.



Ragaan I: Kerangka Pemikiran

F. Kerangka Teoretik

Tugas hakim sesungguhnya adalah sebuah tugas yang mulia, sebagaimana dijelaskan oleh Roeslan Saleh, tentang sebuah “pergulatan kemanusiaan”,¹ yaitu sesuatu yang seharusnya disadari dan dihayati oleh

¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 91.

hakim-hakim saat ini. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa betapa terkurasnya energi hakim saat menjalankan tugasnya, karena harus menjalani sebuah pergulatan batin, harus membuat pilihan-pilihan yang tidak mudah. Hakim yang menyadari dirinya benar-benar bahwa dalam dirinya terjadi pergulatan kemanusiaan dihadapkan pada aturan hukum, fakta-fakta, argumen jaksa, argumen terdakwa dan advokat dan lebih dari itu, harus meletakkan telinganya di jantung masyarakat. Sebagaimana dijelaskan Satjipto Rahardjo, "*Hakim harus mewakili suara rakyat yang diam yang tidak terwakili dan yang tidak terdengar.*"²

Tugas hakim demikian itu senada dengan pandangan Hakim Agung Amerika Serikat, Oliver Wendell Holmes Jr., bahwa memutuskan bukan semata-mata proses silogisme matematis dan mekanis, namun sebuah makna yang sangat luas "*... the life of the law has not been logic; it is has been experience. The felt necessities of the time, the prevalent moral and political theories, institution of public policy avowed or unconscious, even the prejudices which judges share with their fellow*" Holmes juga mengatakan, "*The law embodies the story of a nation's development through many centuries, and it can not be dealt with as if it contained only the axioms and corollaries of a book of mathematics*".³ Dengan demikian putusan hakim merupakan cermin dari sikap, moralitas, penalaran dan banyak hal lainnya yang digambarkan oleh Holmes sebagai pengalaman. Hal itu mengisyaratkan bahwa putusan hakim akan sangat berwatak *relativisme cultural*, atau dengan mengambil pandangan Tamanaha tentang

² *Ibid.*, hlm. 92.

³ Oliver Weldell Holmes, *The Common Law* (Boston: Little Brown, 1963). Beberapa cacatan yang mirip dapat ditemukan pula dalam buku: Julius J. Marke, *The Holmes Reader* (New York: Oceana's Docket Books, 1955), hlm. 60-85..

"*mirror thesis*"⁴ maka putusan merefleksikan seperti cermin dari si pemutusnya"

Dilihat dari sudut birokrasi peradilan, putusan hakim akan terkait dengan tiga kriteria: efektivitas, efisiensi dan tentu saja kejujuran. Efektivitas, dinilai dalam segi apakah putusan hakim mampu menjadi pilar hukum, artinya seberapa besar putusan pengadilan memberikan jawaban terhadap kegelisahan masyarakat. Efisiensi, terkait dengan pembiayaan dari apa yang dilakukan para hakim yang dihubungkan dengan apa yang mereka capai. Artinya apakah pembiayaan dari apa yang mereka lakukan terdapat upaya minimalisasi bagi birokrasi peradilan. Efisiensi dan efektivitas secara berturut-turut berkait dengan biaya dan keuntungan-keuntungan dari kegiatan peradilan. Meskipun keduanya harus dilihat dengan penilaian penampilan, pada saat tertentu peradilan mungkin memberikan perhatian yang lebih besar kepada salah satunya. Kejujuran, berada diantara kedua kategori dan merupakan masalah paling peka bagi masyarakat umum. Di sini perhatian terpusat pada bagaimana peradilan memperlakukan masyarakat, atau mereka yang masuk dalam proses dengan sepantasnya, secara hukum dan moral, tanpa mengindahkan keefektifan mereka dalam memutus perkara atau efisiensi mereka dalam mengurangi biaya.

Sekalipun tugas hakim sangat berat, hakim tetaplah seorang manusia biasa yaitu makhluk biologis, yang memiliki juga hak psikologis yaitu untuk menjadi takut, berani, jujur, khilaf, dan lainnya. Hakim juga

⁴ Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society* (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm.1-3 Lihat pula penjelasan yang mirip dengan Tamanaha, sebagaimana dijelaskan Werner Menski, *Comparative Law in Global Context: the Legal system of Asia and Africa* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm. 3dst..

sesungguhnya terkait dengan orang-orang terdekatnya, keluarganya lingkungan dan pendidikannya dengan demikian kita perlu sadari bahwa tidak ada model yang sama dari hakim. Apabila secara yuridis kita dapat mengatakan bahwa seluruh Indonesia hanya ada satu model hakim saja, sebagaimana tertera dalam peraturan hukum, namun secara sosiologi hukum, ada lebih dari satu hakim atau ada lebih dari satu macam hakim di Indonesia.

Oleh karena ini, pada titik ini kita dapat melihat hakim tidak hanya sebagai seorang birokrat hukum semata,⁵ namun juga sebagai manusia, yang terdiri dari berbagai variabel yang dapat melekat pada seorang hakim, seperti usia, latar belakang sosial, ras atau etnis, agama, pendidikan, pengalaman, dan lain-lain yang keseluruhannya memiliki peluang untuk turut menentukan bagaimana kecenderungan seorang hakim untuk memutus dan dengan demikian melahirkan berbagai tipe hakim, dan dengan menyitir pendapat Satjipto Rahardjo, maka kita dapat mengatakan paling tidak ada dua tipe hakim. *Pertama*, hakim yang apabila memeriksa, terlebih dahulu menanyakan hatinuraninya atau mendengarkan putusan hati nuraninya dan kemudian mencari pasal-pasal dalam peraturan untuk mendukung putusan tersebut. *Kedua*, hakim yang apabila memutus terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya dan kemudian mencari pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap putusan perutnya.⁶

⁵ Lihat Abraham S. Blumberg, *Criminal Justice* (Toronto: Burns and MacEachem Ltd., 1970).

⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.225.

Sebagai suatu negara hukum, Indonesia membutuhkan para profesional hukum untuk menggerakkan roda negara hukum, salah satu dari mereka adalah hakim. Hakim merupakan kelompok profesional yang unik, karena memang memperoleh pembelajaran yang khas tentang hukum. Salah satu hasil dari pembelajaran profesional tersebut adalah terciptanya suatu pola dan cara berpikir tertentu para hakim.

Hukum bagi para profesional adalah ibarat stetoskop bagi para dokter. Dengan stetoskop itu pada dokter melangkah dengan pasti sebagai seorang profesional menghadapi penderita. Seorang profesional hukum juga membutuhkan kepastian mengenai hukum yang dioperasikannya. Ketidakpastian, keragu-raguan terhadap hukum positif menyebabkan seseorang profesional tidak tenang dan pasti dalam menggunakan hukum.

Bagi seorang hakim yang profesional pengetahuan dan keterampilan (*skill*) adalah hal yang penting, karena bagi mereka hukum adalah alat yang pasti, bahkan para profesional sangat mengandalkan pada logika dan menalar dengan silogisme. Namun apabila kita melihat aspek ini lebih jauh maka akan ditemukan dalam kenyataan bahwa mengandalkan pada logika dan menalar secara silogisme saja tidak cukup, oleh karena itu gagasan yang melihat para profesional dalam memutus hanya mengandalkan nalar saja hanya sebuah mitos. "*The Myth of the operation of the law is given the lie daily*".⁷ Sampford menjelaskan bahwa, hukum dalam masyarakat lebih banyak diisi oleh ketidakpastian. Katanya, "*Judges may see themselves making individual*

⁷ William J. Chambliss dan Robert B Seidman, *Order and Power, Reading* (Mass.: Addison-Westley & Sons, 1974), dalam Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 177.

decision rather than welding a logical masterpiece. Lawyers may delve more confidently into the labyrinth, looking for those parts of the legal morass that can help their clients. Citizens will see the law as neither an ass nor a liberal pearl but as the actions of many individual officials, and concern themselves with those actions that affect them”.⁸

Sampford menjelaskan bahwa para profesional mengabaikan kenyataan dan tetap ingin melihat, bahwa hukum itu serba teratur. Sikap demikian itu dapat dimengerti, sebab bagaimana kalau mereka itu mengakui, bahwa hukum penuh dengan ketidakteraturan dan ketidakpastian. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa peradilan di Amerika Serikat mengalami kegagalan, dan dimanfaatkan oleh sekelompok orang.⁹ Pengadilan bukan lagi merupakan bangunan megah dengan nama *hall of justice*, tetapi sebuah medan tempat bernaung para gladiator mencari menang dengan *a win-at-all-cost mentally*.

Hakim seyogyanya betugas untuk kepentingan rakyat dan bukan sebaliknya, dalam hubungan ini pekerjaan hakim menjadi semakin kompleks. Hakim tidak hanya mendengarkan dengan “telinga subjektif,” tetapi juga dengan “telinga sosial”. Seorang hakim bukan hanya teknisi undang-undang, tetapi juga makhluk sosial, karena itu, pekerjaan hakim sungguh mulia karena ia bukan hanya memeras otak, tetapi juga nuraninya. Hakim demikian itu, menjadikan dirinya bagian dari masyarakat dan akan selalu menanyakan “Apakah peran yang bisa saya berikan bagi masyarakat?” Pendek kata, hakim model ini akan senantiasa meletakkan telinganya

⁸ Charles Sampford, *The Disorder of Law: A Critique Legal Theorie* (Oxford: Basil Blackwell, 1989), hlm. 7

⁹ William T. Pizzi, *Trials Without Truth* (New York: New York University Press, 1999), hlm, 183dst.

ke degup jantung rakyatnya.

G. Metode Penelitian

Secara sederhana langkah-langkah dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Komisi Yudisial menetapkan nama-nama hakim tingkat banding yang putusannya dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Bersamaan dengan itu, Komisi Yudisial membentuk Tim Analisis ditingkat pusat untuk merumuskan panduan penelitian atau *term of reference* (TOR) dan menyiapkan semua instrumen terkait dengan penelitian ini. Proses pembentukan tim dan penyusunan TOR dibahas dalam rapat di Bandung (Hotel Horison) tanggal 26-28 Januari 2012.
2. Berangkat dari TOR dan hasil penilaian kinerja jejaring (penelitian-penelitian sebelumnya), Komisi Yudisial menawarkan usulan penelitian ini kepada peneliti di tingkat jejaring (15 institusi peneliti). Peneliti yang setuju untuk melaksanakan penelitian, kemudian diikat dengan perjanjian. Setiap peneliti jejaring mendapat tugas menganalisis 5 perkara (@ 2 putusan, dari pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding). Dengan demikian, setiap peneliti jejaring pada akhirnya menyerahkan 10 laporan penelitian. Penjelasan tentang TOR kepada para peneliti dilakukan dalam pertemuan di Jakarta (Hotel Acacia) tanggal 6-7 Februari 2012.
3. Peneliti lalu terjun ke lapangan menghubungi hakim pengadilan tingkat banding yang dimaksud untuk meminta putusan yang layak diangkat sebagai obyek penelitian ini. Atas dasar putusan perkara di pengadilan tingkat banding ini, peneliti juga wajib menelusuri putusan pengadilan tingkat

- pertama, sehingga diperoleh dua putusan untuk satu perkara. Kedua putusan ini wajib dianalisis dan dituangkan dalam dua laporan terpisah. Tinjauan pustaka dan bahan-bahan hukum lainnya perlu dipakai untuk mengelaborasi dan memperdalam analisis.
4. Untuk melengkapi hasil kajian putusan, peneliti jejaring diminta melakukan wawancara dengan hakim tersebut, serta bila perlu menggali keterangan dari pihak-pihak lain yang relevan (jaksa, advokat, saksi, dll. dari perkara yang diputuskan). Data primer ini dimanfaatkan untuk mempertajam analisis, khususnya dalam rangka mendapatkan informasi yang tidak terungkap dari kajian putusan.
 5. Peneliti jejaring wajib menyusun laporan hasil penelitian mengikuti format dan sistematika laporan yang telah ditentukan. Laporan ini harus konsisten pula dengan isian lampiran-lampiran yang wajib dilengkapi. Sebagai contoh, panduan pertanyaan yang telah diisi, wajib diberikan penjelasan yang kemudian dimasukkan di dalam laporan.
 6. Pada jadwal yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 4-5 April 2012, peneliti jejaring telah diundang untuk mempresentasikan hasil penelitian mereka di Medan atau Yogyakarta (bergantung lokasi yang ditentukan untuk mereka). Bertindak sebagai tuan rumah adalah Universitas Sumatera Utara dan Universitas Islam Indonesia. Kegiatan yang diadakan secara paralel ini merupakan bagian dari proses evaluasi Komisi Yudisial terhadap kemajuan penelitian untuk masing-masing peneliti jejaring sebanyak 4 putusan (terdiri dari 2 putusan pengadilan tingkat pertama dan 2 putusan

pengadilan tingkat banding). Presentasi dilakukan dihadapan Tim Analisis Pusat dan Anggota Komisi Yudisial. Masukan dan catatan dari presentasi ini telah dijadikan bahan koreksi untuk laporan putusan tersebut, dan acuan bagi penulisan laporan tahap II yang lalu dipresentasikan lagi pada pertemuan evaluasi tahap II.

7. Evaluasi tahap II diadakan tanggal 14-16 Juni 2012 di Bandung (Hotel Horison). Di sini masing-masing peneliti jejaring melakukan presentasi untuk 3 perkara hukum yang tersisa (sama dengan 6 laporan). Masukan dan catatan dari presentasi ini pun tetap dijadikan bahan koreksi.
8. Setelah semua laporan yang telah dikoreksi ini diterima oleh Tim Analisis Pusat, guna dipakai sebagai bahan utama penyusunan laporan final kepada Komisi Yudisial.

Terkait dengan data, bentuk data, sumber data, teknik pengumpulannya, serta narasumber, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

*Tabel I:
Teknik Pengumpulan Data*

| No | Nama data | Bentuk data | Sumber data | Teknik pengumpulan | Narasumber/ Informan |
|----|--|-------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | Putusan yang dianggap terbaik dari hakim pengadilan tingkat banding. | Primer | Daftar hakim PT dari KY | Wawancara | Hakim ybs. |
| 2 | Ketentuan prosedural-formal menurut hukum acara | Sekunder | Berkas putusan | Studi dokumen | -- |
| 3 | Ketepatan dalam pemaknaan materiil hukum | Sekunder | Berkas putusan | Studi dokumen | -- |
| | | Primer | Hakim PT | | Hakim ybs. |
| 4 | Keruntutan dalam penalaran hukum | Sekunder | Berkas putusan | Studi dokumen | -- |
| | | Primer | Hakim PT | | Hakim ybs. |

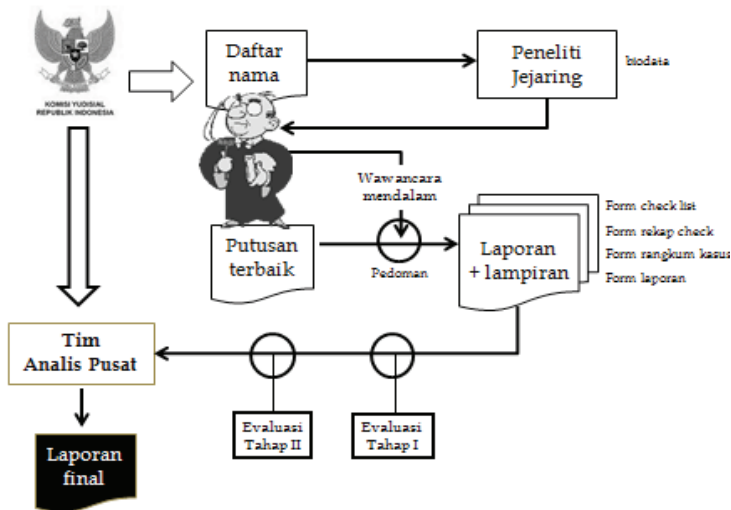
| | | | | | |
|---|--|----------|----------------|---------------|------------|
| 5 | Penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat | Sekunder | Berkas putusan | Studi dokumen | -- |
| | | Primer | Hakim PT | Wawancara | Hakim ybs. |
| 6 | Profesionalisme dalam memutuskan perkara | Sekunder | Berkas putusan | Studi dokumen | -- |
| | | Primer | Hakim PT | Wawancara | Hakim ybs. |

H. Organisasi Penelitian

Komposisi peneliti dari institusi perguruan tinggi terdiri dari seorang ketua peneliti dibantu oleh 3 orang dosen dan 1 orang mahasiswa sebagai anggota. Semua personalia harus berasal dari satu institusi perguruan tinggi yang bersangkutan. Kualifikasi personalia peneliti tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Peneliti, bergelar doktor dan/atau berpangkat minimal lektor kepala;
- b. Dosen anggota peneliti berpangkat minimal lektor;
- c. Mahasiswa peneliti adalah peserta didik fakultas hukum yang telah menempuh minimal 6 semester.

Kualifikasi untuk dosen di atas tidak berlaku untuk peneliti dari lembaga swadaya masyarakat, namun komposisi penelitiannya tetap harus 5 orang. Untuk peneliti dari perguruan tinggi, salah satu dosen peneliti (ketua/anggota) harus ada yang menjadi pengampu mata kuliah hukum acara dan/atau aktif dalam biro/ lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi yang bersangkutan serta memiliki pengalaman cukup dalam penelitian. Kualifikasi personalia tersebut harus dicantumkan dalam biodata (*curriculum vitae*) yang diserahkan pada saat perjanjian penelitian (SPK) ditandatangani.



Ragaan II: Organisasi Penelitian

I. Jadwal Kegiatan

Semula keseluruhan kegiatan didisain berlangsung kurang dari enam bulan, yakni sebelum memasuki Juni 2012, seiring dengan adanya antara lain kebutuhan seleksi calon hakim agung pada periode tersebut. Oleh karena berbagai kendala yang dihadapi oleh para peneliti di lapangan, akhirnya diputuskan untuk dapat memperpanjang laporan sampai awal Juli 2012, dengan asumsi semua informasi dari penelitian ini tetap dapat dimanfaatkan untuk periode seleksi calon hakim agung periode-periode selanjutnya.

Tabel II:
Jadwal Kegiatan

| No | Kegiatan | Tahun 2012 | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|------------|-----|-------|-------|-----|------|------|--|--|--|--|--|
| | | Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni | Juli | | | | | |
| 1. | Proposal | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Sosialisasi & SPK | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Laporan I masuk | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Presentasi I jejaring | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Laporan II masuk | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Presentasi II jejaring | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Laporan final | | | | | | | | | | | | |

J. Kendala dan Kelemahan dalam Penelitian

Berangkat dari pengalaman dalam penelitian serupa pada tahun-tahun sebelumnya, sesungguhnya sudah banyak dilakukan antisipasi guna mengatasi kendala dan kelemahan dalam desain penelitian ini. Pemilihan objek putusan adalah problema yang paling krusial karena secara metodologis objek inilah yang dijadikan titik tolak pengukuran kualitas putusan sekaligus profesionalisme hakim dalam memutuskan perkara itu. Oleh karena hakim-hakim yang akan diteliti adalah hakim-hakim pengadilan tinggi yang sudah senior dan sudah diperoleh nama-namanya oleh Komisi Yudisial, maka kendala yang pertama dijumpai adalah teknik pemilihan objek putusan dari hakim-hakim tersebut. Artinya, seberapa mungkin peneliti di tingkat

jejaring mampu menentukan sendiri putusan-putusan yang paling layak diteliti dari figur seorang hakim?

Kendala ini lalu diantisipasi dengan meminta hakim itu sendirilah yang menyebutkan putusan-putusan “terbaik” untuk diangkat sebagai objek kajian. Asumsinya adalah bahwa putusan-putusan pilihan itu adalah karya profesi mereka, yang idealnya akan mereka banggakan sampai saat ini tatkala menjabat sebagai hakim di pengadilan tingkat banding. Pengertian “terbaik” di sini berpotensi untuk dimaknai secara keliru, mengingat setiap putusan seyogianya memang selalu “terbaik,” terlepas apapun perkaranya. Untuk menghindari kerancuan makna tersebut, dalam panduan penelitian telah ditegaskan bahwa pengertian “terbaik” disini adalah putusan-putusan yang dinilai memiliki kompleksitas perkara yang tinggi (rumit). Ada banyak faktor penyebab kompleksitas itu, misalnya karena pihak-pihak yang bersengketa sangat banyak dan/atau melibatkan orang terpendang di masyarakat. Selain itu, bisa pula karena rumusan aturan yang melingkupi perkara itu masih samar-samar, atau alat-alat buktinya tidak cukup terang-benderang menuntun hakim, atau sejak semula kasusnya sendiri sudah kontroversial sehingga menarik perhatian publik. Kompleksitas seperti ini dipercaya akan menstimulus hakim-hakim itu untuk berkreasi dan berani melakukan penemuan-penemuan hukum. Di sisi lain, posisi hakim tertentu di dalam majelis (sebagai ketua atau anggota), dipersepsikan juga punya pengaruh dalam menentukan keterwakilan putusan itu dalam kaitan dengan figur hakim tersebut. Artinya, bisa saja seorang hakim merupakan bagian dari majelis, tetapi ia sendiri tidak merasa pandangan-pandangan pribadinya sepenuhnya tercermin dalam pertimbangan dan/atau amar putusan. Dengan pemilihan putusan yang ditetapkan sendiri oleh

hakim tersebut, maka diasumsikan putusan pilihannya adalah putusan yang mengesankan bagi diri si hakim. Kesan ini timbul karena ia merasa terlibat secara intens dalam menentukan karakteristik putusan tersebut.

Kendati sudah dilakukan berbagai antisipasi, kenyataan di lapangan menunjukkan masih ditemukan sejumlah kendala yang terjadi selama penelitian. Kendala yang tidak berhasil diatasi memperlihatkan adanya kelemahan yang sudah seharusnya menjadi pelajaran untuk diatasi dalam desain penelitian selanjutnya. Beberapa hal yang menjadi catatan terkait kendala dan kelemahan itu adalah sebagai berikut:

1. Sampel yang berhasil dijaring oleh peneliti sebagian besar tidak memperlihatkan karakter putusan yang diharapkan. Kompleksitas tidak terlihat (bahkan diakui terus-terang oleh para hakim itu sendiri dalam wawancara). Ada juga tahun putusan cukup lama (2001) yang diangkat (UII-2a, 2b).¹⁰
2. Peneliti belum secara konsisten mengikuti panduan penelitian (TOR). Masih ditemukan penilaian pada butir-butir kuantitatif yang layak dipertanyakan apabila dibandingkan dengan catatan-catatan mereka dalam analisis kualitatif. Misalnya peneliti menilai putusan pengadilan tinggi lebih baik, tetapi skors yang diberikan tidak mendukung kesimpulan itu.
3. Ketidapatuhan terhadap panduan penelitian juga ditemukan dalam delapan putusan yang dilakukan oleh salah satu peneliti jejaring (Unand), yang tidak berhasil meyajikan laporan penelitian secara tandem (satu perkara di pengadilan negeri

¹⁰ Kode putusan UII, UMM, dst. mengacu ke institusi peneliti. Lihat Tabel IV (*lampiran 1 hlm. 122*) laporan ini.

seharusnya sinkron dengan satu perkara di pengadilan tinggi). Kekeliruan ini tidak diubah, sekalipun telah diingatkan saat evaluasi. Dengan beberapa alasan, ada pula hakim tinggi yang tidak berhasil ditemukan sehingga diganti dengan hakim lain di luar daftar semula (HuMa-5b, Unud-3b, Unud-5b, Unila-5b).

4. Peneliti tidak mengikuti format yang dipersyaratkan, bahkan ada yang tidak membuat rangkuman (Unand-1b, Unand-2a, Unand-4b). Kalaupun ada, transkrip wawancara tidak dibuat secara serius. Ada yang hanya menyerahkan kepada hakim untuk mengisi kuesioner, dengan satu dua kalimat pendek saja.
5. Data primer kebanyakan tidak optimal digunakan untuk keperluan analisis. Artinya, sebagian dari laporan ini memperlihatkan ada atau tidak ada data primer tidak menunjukkan perbedaan kualitas yang signifikan terhadap analisis mereka. Ini menunjukkan kemampuan mereka untuk menganalisis putusan memang masih belum merata di kalangan dosen fakultas hukum.
6. Oleh karena analisis putusan ditujukan baik pada putusan pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding, para peneliti terdorong untuk mengulang kembali struktur analisisnya, sehingga terlihat jelas kesamaan struktur kedua laporan tersebut. Apa yang sudah dirangkum dalam analisis untuk putusan pengadilan tingkat pertama, seringkali ditulis kembali pada analisis putusan pengadilan tingkat banding (lihat UMM-1a, 1b; 2a-2b).
7. Secara teknis di lapangan, tanggung jawab dan koordinasi di antara para peneliti masih belum

bisa dimaksimalkan. Ada penyaji saat FGD yang mengaku tidak menguasai satu atau dua laporan penelitian dari perguruan tingginya karena ia tidak terlibat dalam penelitian kasus tersebut (contoh Unsyiah dan Unud).

K. Objek Kajian

Objek kajian dalam penelitian ini adalah putusan hakim. Lampiran I (Tabel III, Tabel IV, dan Tabel V) memperlihatkan daftar nama hakim tinggi yang menjadi titik tolak pemilihan sampel putusan pengadilan tingkat banding. Sebagai sandingannya, tiap putusan dari hakim terkait kemudian dicarikan putusan pengadilan tingkat pertama pada perkara yang sama. Para hakim tersebut diklasifikasi berdasarkan institusi (perguruan tinggi/ LSM) yang ditunjuk sebagai peneliti di tingkat jejaring.



Bab 2

Analisis Hasil Penelitian

Analisis dalam bab ini dilakukan dalam dua model, yakni analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis pertama dilakukan dengan titik tolak data yang tersaji dalam tabel isian yang dilampirkan oleh para peneliti di dalam laporan mereka. Tabel tersebut memuat hasil identifikasi para peneliti terhadap butir-butir pertanyaan terkait dengan putusan-putusan yang menjadi objek penelitian. Sementara itu, analisis kedua bertolak dari rangkuman dan catatan para peneliti dalam format paparan, yang kemudian paparan ini diklasifikasi dan dicari titik-titik simpulnya untuk disajikan sebagai analisis kualitatif keseluruhan laporan penelitian.

Sekalipun ada dua model analisis, pada hakikatnya kedua model tersebut saling berhubungan karena proses identifikasi terhadap butir-butir pertanyaan dipersyaratkan untuk dilakukan oleh para peneliti sebelum mereka masuk ke dalam pemaparan secara kualitatif.

A. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif didasarkan pada tabulasi yang berisi parameter-parameter untuk mengukur kualitas putusan hakim baik putusan hakim pengadilan tinggi maupun hakim pengadilan negeri. Putusan pengadilan tinggi yang hendak diteliti merupakan putusan banding dari putusan hakim pengadilan negeri yang jenis perkaranya sama. Karena jumlah

putusan hakim pengadilan tinggi yang diteliti sebanyak 75 putusan, maka jumlah keseluruhan yang harus diteliti dan dianalisis, termasuk putusan pengadilan negeri, sebanyak 150 putusan. Setiap peneliti jejaring menganalisis lima perkara (masing-masing perkara terdiri atas dua putusan berasal dari pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding). Artinya, dari lima perkara itu, setiap peneliti, wajib menganalisis sepuluh putusan. Jenis perkara yang diteliti mencakup perkara pidana dan perdata, dan satu perkara dari lingkungan peradilan agama. Tata cara pemilihan objek-objek putusan ini, telah dijelaskan dalam metode penelitian.

Untuk memudahkan analisis, di dalam panduan penelitian yang telah disosialisasikan kepada para peneliti jejaring, disampaikan sejumlah parameter yang diderivasi dari butir-butir pertanyaan dalam rumusan masalah. Parameter pengukuran kualitas putusan hakim dapat dijabarkan sebagai berikut:

(A) Putusan hakim pengadilan tinggi

1. Perkara pidana:
 - (a) Pemenuhan prosedur hukum acara pidana sebanyak lima parameter;
 - (b) Penerapan hukum pidana material sebanyak lima parameter;
 - (c) Penggunaan penalaran hukum logis sebanyak lima parameter;
 - (d) Penggunaan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebanyak dua parameter;
 - (e) Profesionalitas hakim sebanyak dua parameter dan rekomendasi.

2. Perkara perdata:
 - (a) Pemenuhan hukum acara perdata sebanyak enam parameter;
 - (b) Penerapan hukum perdata material sebanyak enam parameter, dasar gugatan satu parameter, putusan menguatkan, menolak atau memperbaiki sebanyak satu parameter;
 - (c) Penggunaan penalaran hukum logis sebanyak enam parameter;
 - (d) Penggunaan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebanyak dua parameter;
 - (e) Profesionalitas hakim sebanyak dua parameter dan rekomendasi.

3. Parameter untuk satu perkara dari pengadilan tinggi agama mengikuti parameter dalam perkara perdata di pengadilan tinggi dengan modifikasi beberapa kata atau istilah.

(B) Putusan hakim pengadilan negeri

1. Perkara pidana:
 - (a) Pemenuhan prosedur hukum acara pidana sebanyak enam parameter;
 - (b) Penerapan hukum pidana material sebanyak lima parameter;
 - (c) Penggunaan penalaran hukum logis sebanyak empat parameter;
 - (d) Penggunaan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebanyak dua parameter;
 - (e) Profesionalitas hakim sebanyak satu

paramater dan rekomendasi.

2. Perkara perdata:
 - (a) Pemenuhan hukum acara perdata sebanyak enam parameter;
 - (b) Penerapan hukum perdata material sebanyak lima parameter, dasar gugatan satu parameter;
 - (c) Penggunaan penalaran hukum logis sebanyak enam parameter;
 - (d) Penggunaan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebanyak dua parameter;
 - (e) Profesionalitas hakim sebanyak dua parameter dan rekomendasi.

3. Parameter untuk satu perkara dari pengadilan agama mengikuti parameter dalam perkara perdata di pengadilan negeri dengan modifikasi beberapa kata atau istilah.

Dari 150 putusan yang diteliti oleh jejaring, terdapat delapan putusan (pengadilan tinggi dan pengadilan negeri) dari jejaring Universitas Andalas Padang yang tidak dapat dianalisis dikarenakan terdapat putusan hakim pengadilan tinggi yang tidak ada kaitannya dengan putusan pengadilan negeri yang menjadi dasar putusan. Sebaliknya, terdapat putusan pengadilan negeri yang tidak ada kaitannya dengan putusan pengadilan tinggi. Kondisi tersebut, sesuai dengan TOR, tidak sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Dengan alasan itu, maka delapan putusan tersebut dinyatakan 'rusak' sehingga jumlah seluruh putusan yang bisa dianalisis adalah 142 putusan (71

putusan pengadilan tinggi dan 71 putusan pengadilan negeri).

Berikut adalah delapan putusan hakim yang tidak bisa dianalisis secara kuantitatif:

Tabel VI:

Delapan Putusan yang Dikecualikan

| No | Jejaring | Nomor Perkara |
|----|----------|------------------------|
| 1 | Unand 1b | 04/Pdt/2011/PT BNA |
| 2 | Unand 2a | 12/Pdt G/1991/PN PTK |
| 3 | Unand 4b | 97/Pid/2007/PT PDG |
| 4 | Unand 5a | 31/Pdt G/2004/PN PRM |
| 5 | Unand 6a | 02/Pdt G/2000/PN BT |
| 6 | Unand 7a | 65/Pdt G/2002/PN PDG |
| 7 | Unand 8b | 23/TIPIKOR/2011/PT PPG |
| 8 | Unand 9b | 65/Pdt G/2010/PT PDG |

Secara keseluruhan putusan-putusan hakim pengadilan tinggi dan pengadilan negeri berikut jenis perkara dan nomor pekaranya dapat dilihat pada Lampiran II (Tabel VII dan Tabel VIII).

Sebelum melakukan analisis terhadap data kuantitatif, beberapa isu atau permasalahan yang menjadi obyek penelitian adalah:

1. Apakah putusan hakim tersebut telah mengikuti prosedur hukum acara?
2. Terkait dengan hukum material, apakah putusan hakim telah dapat membuktikan unsur yang didakwa/digugat?
3. Apakah putusan hakim telah mencerminkan penalaran hukum yang logis (runtut dan sistematis)?
4. Apakah putusan hakim telah menggali nilai-

nilai yang hidup dalam masyarakat (aspek non-yuridis)?

5. Bagaimana profesionalisme hakim dalam penyelesaian perkara ini?

Dari rumusan permasalahan tersebut, masing-masing permasalahan memiliki parameter yang berbeda-beda sesuai dengan jenis perkaranya baik pidana maupun perdata. Oleh karena itu, analisis kuantitatifnya akan difokuskan pada masing-masing jenis perkara. Dari 71 putusan pengadilan tinggi, jumlah perkara pidananya sebanyak 40, perkara perdata sebanyak 31. Karena putusan hakim pengadilan tinggi harus merupakan kelanjutan dari putusan hakim pengadilan pertama, maka jumlah perkara pidana dan perdata di pengadilan negeri otomatis juga sama yaitu 40 perkara pidana dan 31 perkara perdata. Mengingat pula bahwa parameter perkara pidana baik pada tingkat pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri berbeda, demikian pula perkara perdatanya, maka analisis kuantitatifnya dikategorisasikan menurut level pengadilannya.

1. Tabulasi Putusan Hakim Pengadilan Tinggi

Berkaitan dengan aspek pemenuhan hukum acara pidana dan hukum acara perdata pada level pengadilan tinggi, dapat dikemukakan dalam tabel dibawah ini:

Tabel IX:

*Aspek Pemenuhan Hukum Acara Pidana PT
(N=200)*

| No | Parameter | Ya | | Tidak | | TT | |
|------|---------------------------------------|----|-------|-------|------|----|------|
| | | N | % | N | % | N | % |
| 1.1. | Putusan sesuai Ps 197 jo Ps 199 KUHAP | 35 | 17,50 | 5 | 2,50 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|--|-----|-------|----|-------|----|------|
| 1.2. | Putusan didukung dua alat bukti sesuai Pasal 183 jo. Pasal 185 KUHAP | 28 | 14,00 | 8 | 4,00 | 4 | 2,00 |
| 1.3. | Alat bukti telah sesuai dengan undang-undang, doktrin dan/atau yurisprudensi | 25 | 12,50 | 10 | 5,00 | 5 | 2,5 |
| 1.4. | Putusan memuat proporsional argumen Jaksa dan penasehat hukum/terdakwa | 25 | 12,50 | 12 | 6,00 | 3 | 1,5 |
| 1.5. | Hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim PT berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan | 9 | 4,50 | 31 | 15,50 | 0 | 0 |
| | JUMLAH | 122 | 61 | 66 | 33 | 12 | 6 |

Tabel X:
Aspek Pemenuhan Hukum Acara Perdata PT
(N=186)

| No | Parameter | Ya | | Tidak | | TT | |
|------|--|-----|-------|-------|--------|----|------|
| | | N | % | N | % | N | % |
| 1.1. | putusan sudah sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG | 30 | 16,13 | 1 | 0,54 | 0 | 0 |
| 1.2. | didukung alat bukti Ps 164, 153, dan 154 HIR (284, 180, dan 181 RBG) | 23 | 12,37 | 4 | 2,1505 | 4 | 2,15 |
| 1.3. | hakim PT telah menggunakan alat bukti tambahan selain yang dimuat dalam putusan PN | 0 | 0,00 | 26 | 13,98 | 5 | 2,69 |
| 1.4. | penerapan hukum pembuktian sesuai dengan perjanjian/undang-undang, doktrin, dan/atau yurisprudensi | 24 | 12,90 | 5 | 2,6882 | 2 | 1,08 |
| 1.5. | sudah memuat secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya | 23 | 12,37 | 4 | 2,15 | 4 | 2,15 |
| 1.6. | hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim PT (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan | 6 | 3,23 | 23 | 12,37 | 2 | 1,08 |
| | JUMLAH | 106 | 56,99 | 63 | 33,87 | 17 | 9,14 |

Tabel IX menunjukkan bahwa dilihat dari aspek hukum acara pidana, 61% putusan hakim pengadilan tinggi telah memenuhi hukum acara pidana. Dari nilai persentase tersebut, 17,50%

putusan hakim sesuai dengan Pasal 197 jo Pasal 199 KUHP, 14% didukung minimal dua alat bukti sesuai Pasal 183 jo Pasal 185 KUHP, 12,50% alat bukti telah sesuai dengan undang-undang, doktrin dan/atau yurisprudensi, 12,50% putusan sudah memuat secara proporsional argumen jaksa maupun penasehat hukum/terdakwa dan 4,50% hari/tanggal musyawarah berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan.

Dari sisi penyimpangan hukum acara pidana, tabel IX menunjukkan 33% putusan hakim tidak memenuhi hukum acara pidana, sedangkan tidak teridentifikasi hanya 6%.

Dari aspek pemenuhan hukum acara perdata, Tabel X menunjukkan bahwa 56,99% putusan hakim pengadilan tinggi telah memenuhi prosedur hukum acara perdata, 33,87% tidak memenuhi hukum acara dan 9,14% tidak teridentifikasi. Dari tabel IX dan X terlihat bahwa penyimpangan hukum acara pidana dan perdata hampir sama yaitu 33% untuk putusan perkara pidana dan 33,87% untuk putusan perkara perdata. Kurang taatnya hakim dalam pemenuhan hukum acara perlu mendapat perhatian.

*Tabel XI:
Aspek Penerapan Hukum Pidana Material PT
(N=200)*

| No | Parameter | YA | | TIDAK | | TT | |
|------|--|----|-------|-------|-----|----|------|
| | | N | % | N | % | N | % |
| 2.1. | putusan hakim PT "mengadili sendiri," telah menguraikan secara lengkap unsur-unsur yang didakwakan | 23 | 11,50 | 13 | 6,5 | 4 | 2,00 |

| | | | | | | | |
|--------|---|----|-------|-----|-------|----|------|
| 2.2. | penggunaan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan putusannya | 5 | 2,50 | 33 | 16,5 | 2 | 1,00 |
| 2.3. | penggunaan doktrin sebagai dasar pertimbangan putusannya | 13 | 6,50 | 26 | 13 | 1 | 0,50 |
| 2.4. | penggunaan nilai yang hidup dalam masyarakat | 7 | 3,50 | 28 | 14 | 5 | 2,50 |
| 2.5. | uraian yang memadai tentang faktor yang meringankan/memberatkan | 16 | 8,00 | 22 | 11 | 2 | 1,00 |
| JUMLAH | | 64 | 32,00 | 122 | 61,00 | 14 | 7,00 |

Tabel XII:
Aspek Penerapan Hukum Perdata Material PT
(N=186)

| No | Parameter | YA | | TIDAK | | TT | |
|--------|--|----|-------|-------|-------|----|--------|
| | | N | % | N | % | N | % |
| 2.1. | dasar gugatan yang digunakan para pihak | | | | | | |
| 2.2. | dasar gugatan sebagaimana dimaksud butir 2.1 diputuskan secara berbeda oleh hakim PT | 19 | 10,22 | 12 | 6,45 | 0 | 0 |
| 2.3. | penggunaan yurisprudensi hukum oleh hakim | 9 | 4,84 | 19 | 10,22 | 3 | 1,6129 |
| 2.4. | penggunaan doktrin hukum oleh hakim | 5 | 2,69 | 22 | 11,83 | 4 | 2,1505 |
| 2.5. | penggunaan nilai yang hidup dalam masyarakat | 6 | 3,23 | 20 | 10,75 | 5 | 2,6882 |
| 2.6. | hakim mempertimbangkan semua unsur dasar gugatan yang digunakan dalam putusan PN | 18 | 9,68 | 12 | 6,45 | 1 | 0,5376 |
| 2.7. | klasifikasi amar putusan | | | | | | |
| 2.8. | dasar pertimbangan hakim | 30 | 16,13 | 0 | 0,00 | 1 | 0,5376 |
| JUMLAH | | 87 | 46,77 | 85 | 45,70 | 14 | 7,53 |

Dari aspek penerapan hukum pidana material yang mencakup uraian secara lengkap unsur-unsur yang didakwakan, penggunaan yurisprudensi, penggunaan doktrin hukum, penggunaan sumber hukum lain, memuat uraian yang memadai dalam hal putusan berbeda dengan putusan pengadilan negeri, tabel XI menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana material dalam putusan hanya 32%. Suatu angka yang cukup

rendah jika dibandingkan yang sebaliknya yaitu 61% putusan hakim pengadilan tinggi dalam perkara pidana kurang berkualitas menyangkut penggunaan hukum pidana material. Angka sebesar 61% tersebut cukup memprihatinkan karena bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti misalnya rendahnya penguasaan atau hakim kurang mengikuti perkembangan dan dinamika ilmu hukum khususnya hukum pidana material, mengabaikan substansi hukum pidana materialnya atau ada sesuatu di luar substansi penguasaan hukum pidananya.

Kalau kemudian dibandingkan dengan penerapan hukum perdata material oleh hakim pengadilan tinggi yang menyangkut kelengkapan sumber hukum terkait unsur-unsur substansial dari dasar gugatan/jawaban yang dikemukakan para pihak, tabel XII menunjukkan 46,77% yang hampir sama besar prosentasenya dengan yang sebaliknya (kurang memperhatikan unsur-unsur substansial dasar gugatan/jawaban) 45,70%.

*Tabel XIII:
Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara Pidana PT
(N=200)*

| No | Parameter | YA | | TIDAK | | TT | |
|------|---|----|-------|-------|------|----|---|
| | | N | % | N | % | N | % |
| 3.1. | argumentasi yang dibangun oleh hakim PT menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya | 27 | 13,50 | 9 | 4,50 | 4 | 2 |
| 3.2. | pertimbangan hukum yang disampaikan oleh hakim PT memiliki perbedaan yang mendasar dengan pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim pengadilan tingkat pertama | 18 | 9 | 22 | 11 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------|---|----|-------|-----|-------|----|------|
| 3.3. | penggunaan metode penemuan hukum penafsiran di luar penafsiran gramatikal dan otentik | 5 | 2,5 | 32 | 16,00 | 3 | 1,50 |
| 3.4. | putusan hakim PT mengandung konstruksi hukum yang baru (misalnya analogi) dibandingkan putusan pengadilan tingkat pertama | 9 | 4,5 | 29 | 14,50 | 2 | 1,00 |
| 3.5. | tidak ada konklusi yg dipaksakan | 27 | 13,5 | 12 | 6,00 | 1 | 0,50 |
| | JUMLAH | 86 | 43,00 | 104 | 52,00 | 10 | 5,00 |

Tabel XIV:
Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara Perdata PT
(N=186)

| No | Parameter | YA | | TIDAK | | TT | |
|------|--|----|-------|-------|-------|----|--------|
| | | N | % | N | % | N | % |
| 3.1. | hakim memberikan analisis tuntas | 19 | 10,22 | 11 | 5,91 | 1 | 0,54 |
| 3.2. | putusan hakim logis berkaitan dengan posita dan petitum | 23 | 12,37 | 7 | 3,76 | 1 | 0,5376 |
| 3.3. | fakta hukum (judex facti) yang diungkapkan dalam putusan hakim PT ini disusun secara sistematis/runtut sehingga mudah dipahami | 22 | 11,83 | 7 | 3,76 | 2 | 1,08 |
| 3.4. | penggunaan metode penemuan hukum penafsiran di luar penafsiran gramatikal dan otentik | 7 | 3,76 | 21 | 11,29 | 3 | 1,61 |
| 3.5. | penggunaan metode konstruksi hukum | 2 | 1,08 | 26 | 13,98 | 3 | 1,61 |
| 3.6. | Tidak ada konklusi yg dipaksakan | 11 | 5,91 | 18 | 9,68 | 2 | 1,0753 |
| | JUMLAH | 84 | 45,16 | 90 | 48,39 | 12 | 6,45 |

Dari aspek penerapan penalaran hukum (*legal reasoning*) dalam putusan perkara pidana, tabel XIII menunjukkan 43% putusan hakim pengadilan tinggi telah mencerminkan penalaran hukum logis, runtut dan sistematis, 52% putusan hakim kurang

mencerminkan panalaran hukum yang runtut dan sistematis, 5% tidak teridentifikasi. Dibandingkan dengan penerapan penalaran hukum dalam putusan perkara perdata seperti dalam tabel XIV terlihat hampir tipis perbedaannya. Penerapan penalaran hukum oleh hakim sebesar 45,16%, 48,39 kurang mencerminkan penalaran hukum logis, 6,45% tidak teridentifikasi. 52% pada perkara pidana dan 48,39% pada perkara perdata mengindikasikan tiga kemungkinan, yaitu: 1) hakim cukup yakin bahwa putusannya tetap adil meskipun harus dengan mengabaikan penggunaan penalaran hukum; 2) hakim kurang memahami penalaran hukum; atau 3) karena alasan-alasan lain.

Tabel XV:

Aspek Nilai-Nilai yang Hidup dalam Masyarakat (Perkara Pidana) PT (N=80)

| No | Parameter | YA | | TIDAK | | TT | |
|--------|---|----|-------|-------|-------|----|------|
| | | N | % | N | % | N | % |
| 4.1. | ada faktor-faktor non-yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius) | 16 | 20,00 | 18 | 22,50 | 6 | 7,5 |
| 4.2. | faktor-faktor non yuridis sejalan dengan amar putusan | 18 | 22,50 | 10 | 12,50 | 12 | 15 |
| JUMLAH | | 34 | 42,50 | 28 | 35,00 | 18 | 22,5 |

Tabel XVI:

Aspek Nilai-Nilai yang Hidup dalam Masyarakat (Perkara Perdata) PT (N=62)

| No | Parameter | YA | | TIDAK | | TT | |
|----|-----------|----|---|-------|---|----|---|
| | | N | % | N | % | N | % |

| | | | | | | | |
|------|---|----|-------|----|-------|----|-------|
| 4.1. | ada faktor-faktor non-yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius) | 11 | 17,74 | 11 | 17,74 | 9 | 14,52 |
| 4.2. | faktor-faktor non yuridis sejalan dengan amar putusan | 15 | 24,19 | 4 | 6,45 | 12 | 19,35 |
| | JUMLAH | 26 | 41,94 | 15 | 24,19 | 21 | 33,87 |

Penggunaan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang tidak semata-mata mendasarkan pada keadilan formal, sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas putusan hakim sehingga kebenaran yang didapatkan tidak sekedar kebenaran formil tetapi juga kebenaran substansial. Tabel XV menunjukkan bahwa dalam perkara pidana, putusan hakim pengadilan tinggi yang mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebesar 42,50%, tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat 35%, tidak teridentifikasi 22,5%.

Dalam perkara perdata, tabel XVI menunjukkan 41,94% putusan hakim pengadilan tinggi memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sedangkan yang sebaliknya sebesar 24,19% dan tidak teridentifikasi 33,87%. Secara keseluruhan, penggunaan nilai-nilai tersebut sudah cukup bagus meskipun masih di bawah 50%.

Dari tabel XV dan XVI, parameter tidak teridentifikasi terlihat cukup besar yaitu 22,5% dan 33,87%. Tidak teridentifikasi ini dapat dikarenakan peneliti tidak cermat dalam membaca putusan hakim atau karena dalam putusan tidak teridentifikasi.

*Tabel XVII:
 Profesionalisme Hakim Perkara Pidana PT
 (N=80)*

| No | Parameter | YA | | TIDAK | | TT | |
|------|---|----|-------|-------|-------|----|-----|
| | | N | % | N | % | N | % |
| 5.1. | Hakim telah berlaku profesional | 22 | 27,50 | 18 | 22,5 | 0 | 0 |
| 5.2. | data primer sejalan dengan deskripsi umum | 32 | 40,00 | 6 | 7,5 | 2 | 2,5 |
| 5.3. | rekomendasi terkait 5.1. dan 5.2 | | | | | | |
| | JUMLAH | 54 | 67,50 | 24 | 30,00 | 2 | 2,5 |

*Tabel XVIII:
 Profesionalisme Hakim Perkara Perdata PT
 (N=62)*

| No | Parameter | YA | | TIDAK | | TT | |
|------|---|----|-------|-------|-------|----|------|
| | | N | % | N | % | N | % |
| 5.1. | Hakim telah berlaku profesional | 20 | 32,26 | 11 | 17,74 | 0 | 0,00 |
| 5.2. | data primer sejalan dengan deskripsi umum | 27 | 43,55 | 4 | 6,45 | 0 | 0,00 |
| 5.3. | rekomendasi terkait 5.1. dan 5.2 | | | | | | |
| | JUMLAH | 47 | 75,81 | 15 | 24,19 | 0 | 0,00 |

Dari aspek profesionalisme hakim, tabel XVII menunjukkan bahwa dalam putusan perkara pidana 67,50% hakim terlihat profesional, 30% kurang profesional, 2,5% tidak memberikan pernyataan sedangkan dalam putusan perkara perdata 75,81% terlihat profesional, 24,19% kurang profesional.

Tabel XIX:
 Dasar Gugatan Perkara Perdata di Pengadilan Tinggi
 (N=31)

| | | Pilihan A (wanprestasi) | | Pilihan B (PMH) | | Pilihan C (lain-lain) | |
|------|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------|-------|--------------------------|-------|
| | | N | % | N | % | N | % |
| 2.1. | Dasar gugatan/jawaban para pihak | 0 | 0 | 21 | 67,74 | 10 | 32,26 |
| | JUMLAH | 0 | 0 | 21 | 67,74 | 10 | 32,26 |

Tabel XX:
 Klasifikasi Amar Putusan (Perkara Perdata) PT
 (N=31)

| | | Pilihan A (menguatkan) | | Pilihan B (menolak) | | Pilihan C (memperbaiki) | | Pilihan D (lain-lain) | |
|-----|---|---------------------------|-------|------------------------|-------|----------------------------|-------|--------------------------|-------|
| | | N | % | N | % | N | % | N | % |
| 2.7 | putusan hakim menguatkan, menolak, atau memperbaiki | 5 | 16,13 | 10 | 32,26 | 7 | 22,58 | 9 | 29,03 |
| | JUMLAH | 5 | 16,13 | 10 | 32,26 | 7 | 22,58 | 9 | 29,03 |

Dari seluruh putusan hakim pengadilan tinggi dalam perkara perdata, dasar gugatan perkara yang diajukan para pihak adalah 21% perbuatan melawan hukum (PMH), lain-lain 32,26% (Tabel XIX). Selanjutnya dilihat dari klasifikasi amar putusan perkara perdata tabel XX menunjukkan 16,13% menguatkan putusan pengadilan negeri, 32,26% menolak, 22,58% memperbaiki dan 29,03% lain-lain.

2. Tabulasi Putusan Hakim Pengadilan Negeri

*Tabel XXI:
Aspek Pemenuhan Hukum Acara Pidana PN
(N=240)*

| No | Parameter | YA | | TIDAK | | TT | |
|------|---|-----|-------|-------|-------|----|------|
| | | N | % | N | % | N | % |
| 1.1. | Putusan sudah memuat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 197 jo. 199 KUHAP | 33 | 13,75 | 7 | 2,92 | 0 | 0,00 |
| 1.2. | Putusan didukung minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 183 jo. Pasal 185 KUHAP | 37 | 15,42 | 3 | 1,25 | 0 | 0,00 |
| 1.3. | Alat bukti telah sesuai dengan undang-undang, doktrin dan/atau yurisprudensi | 28 | 11,67 | 9 | 3,75 | 3 | 1,25 |
| 1.4. | Pengambilan putusan telah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan (fakta hukum) | 30 | 12,50 | 10 | 4,17 | 0 | 0,00 |
| 1.5. | Hakim sudah memuat secara proporsional antara argumen jaksa maupun dan penasihat hukum/terdakwa | 26 | 10,83 | 11 | 4,58 | 3 | 1,25 |
| 1.6. | Hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim PN berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan | 31 | 12,92 | 8 | 3,33 | 1 | 0,42 |
| | JUMLAH | 185 | 77,08 | 48 | 20,00 | 7 | 2,92 |

*Tabel XXII:
Aspek Pemenuhan Hukum Acara Perdata PN
(N=186)*

| No | Parameter | YA | | TIDAK | | TT | |
|------|--|----|-------|-------|------|----|------|
| | | N | % | N | % | N | % |
| 1.1. | memuat hal-hal sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG | 30 | 16,13 | 1 | 0,54 | 0 | 0,00 |
| 1.2. | memenuhi minimal alat-alat bukti yang sah sesuai Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284,180, dan 181 RBG | 26 | 13,98 | 4 | 2,15 | 1 | 0,54 |
| 1.3. | alat bukti tambahan selain yang dimuat dalam butir 1.2 | 8 | 4,30 | 18 | 9,68 | 5 | 2,69 |

Komisi Yudisial RI

| | | | | | | | |
|--------|---|-----|-------|----|-------|---|------|
| 1.4. | pembuktian sesuai dengan perjanjian/UU, doktrin dan/atau yurisprudensi | 22 | 11,83 | 8 | 4,30 | 1 | 0,54 |
| 1.5. | memuat secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya | 24 | 12,90 | 7 | 3,76 | 0 | 0,00 |
| 1.6. | musyawarah majelis hakim dilakukan pada hari yang berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan | 25 | 13,44 | 6 | 3,23 | 0 | 0,00 |
| JUMLAH | | 135 | 72,58 | 44 | 23,66 | 7 | 3,76 |

Tabel XXI terlihat bahwa dalam perkara pidana, 77,08% putusan hakim pengadilan negeri telah memenuhi hukum acara pidana, 20% tidak memenuhi prosedur hukum acara pidana dan 2,92% tidak teridentifikasi. Selanjutnya dalam perkara perdata, tabel XXII menunjukkan 72,58% putusan hakim telah memenuhi hukum acara pidana, 23,66% tidak memenuhi hukum acara dan 3,76% tidak teridentifikasi.

Tabel XXIII:

Aspek Penerapan Hukum Pidana Material PN
(N=200)

| No | Parameter | YA | | TIDAK | | TT | |
|------|--|----|-----|-------|-----|----|-----|
| | | N | % | N | % | N | % |
| 2.1. | Putusan telah menguraikan secara lengkap unsur-unsur yang didakwakan | 34 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2.2. | Hakim juga menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan putusannya | 5 | 2,5 | 32 | 16 | 3 | 1,5 |
| 2.3. | Hakim juga menggunakan sumber hukum berupa doktrin hukum sebagai dasar pertimbangan putusannya | 22 | 11 | 17 | 8,5 | 1 | 0,5 |

| | | | | | | | |
|------|---|-----|------|----|------|---|---|
| 2.4. | Putusan menggunakan sumber hukum lain (nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu berupa hukum adat dan/atau kebiasaan) | 5 | 2,5 | 33 | 16,5 | 2 | 1 |
| 2.5. | Ada uraian tentang faktor yang meringankan/memberatkan | 39 | 19,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| | JUMLAH | 105 | 52,5 | 89 | 44,5 | 6 | 3 |

*Tabel XIV:
Aspek Penerapan Hukum Perdata Material PN
(N=155)*

| No | Parameter | YA | | TIDAK | | TT | |
|------|---|----|-------|-------|-------|----|------|
| | | N | % | N | % | N | % |
| 2.1. | dasar gugatan yang digunakan para pihak | | | | | | |
| 2.2. | amar putusan hakim ditetapkan secara berbeda dengan dasar gugatan | 14 | 9,03 | 16 | 10,32 | 1 | 0,65 |
| 2.3. | Penggunaan yurisprudensi | 14 | 9,03 | 16 | 10,32 | 1 | 0,65 |
| 2.4. | Penggunaan doktrin hukum | 5 | 3,23 | 21 | 13,55 | 5 | 3,23 |
| 2.5. | Penggunaan hukum adat, hukum lokal, dan/atau kebiasaan | 7 | 4,52 | 18 | 11,61 | 6 | 3,87 |
| 2.6. | mempertimbangkan semua unsur dasar gugatan yang diajukan para pihak | 18 | 11,61 | 13 | 8,39 | 0 | 0,00 |
| | JUMLAH | 58 | 37,42 | 84 | 54,19 | 13 | 8,39 |

Dalam hal penerapan hukum pidana material seperti menguraikan secara lengkap unsur-unsur yang didakwakan, penggunaan yurisprudensi, doktrin hukum, penggunaan sumber hukum lain serta uraian faktor yang memberatkan dan meringankan, tabel XXIII terlihat 52,5% penerapan hukum pidana materialnya dapat dikatakan berkualitas dibandingkan dengan hasil yang sebaliknya yaitu 44,5%. Jika dibandingkan dengan penerapan hukum perdata material, tabel XXIV menunjukkan 37,42% putusan hakim telah

menerapkan hukum perdata material, 54,19% kurang berkualitas. Dari kedua tabel XXIII dan XXIV terlihat bahwa dalam perkara pidana, putusan hakim pengadilan negeri cukup progresif artinya putusan hakim telah mampu melewati cara-cara memutus yang bersifat formalistik semata. Namun sebaliknya, hal itu tidak dijumpai dalam putusan perkara perdata.

Tabel XXV:
Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara Pidana PN
(N=160)

| No | Parameter | YA | | TIDAK | | TT | |
|------|--|----|-------|-------|-------|----|------|
| | | N | % | N | % | N | % |
| 3.1. | Argumentasi yang dibangun oleh hakim PN menunjuk keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya | 28 | 17,50 | 12 | 7,50 | 0 | 0,00 |
| 3.2. | Putusan mengandung penafsiran baru (di luar penafsiran gramatikal dan otentik) | 2 | 1,25 | 36 | 22,50 | 2 | 1,25 |
| 3.3. | Putusan mengandung konstruksi hukum yang baru | 3 | 1,88 | 36 | 22,50 | 1 | 0,63 |
| 3.4. | tidak ada konklusi yang dipaksakan | 20 | 12,50 | 15 | 9,38 | 5 | 3,13 |
| | JUMLAH | 53 | 33,13 | 99 | 61,88 | 8 | 5,00 |

Tabel XXVI:
Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara Perdata PN
(N=186)

| No | Parameter | YA | | TIDAK | | TT | |
|------|---|----|------|-------|------|----|------|
| | | N | % | N | % | N | % |
| 3.1. | analisis secara tuntas terhadap fakta dan hukumnya | 17 | 9,14 | 14 | 7,53 | 0 | 0,00 |
| 3.2. | kesimpulan yang logis terkait dengan fakta dan hukum sebagaimana dimaksud butir 3.1 | 16 | 8,60 | 15 | 8,06 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|---|----|-------|-----|-------|----|------|
| 3.3. | fakta hukum (judex facti) disusun secara sistematis/ runtut sehingga mudah dipahami | 21 | 11,29 | 10 | 5,38 | 0 | 0,00 |
| 3.4. | penafsiran terhadap hukum dan/ atau klausula perjanjian dengan menggunakan metode penemuan hukum penafsiran di luar penafsiran gramatikal dan otentik | 3 | 1,61 | 23 | 12,37 | 5 | 2,69 |
| 3.5. | penemuan hukum dengan menggunakan metode konstruksi hukum | 4 | 2,15 | 23 | 12,37 | 4 | 2,15 |
| 3.6. | tidak ada konklusi yang dipaksakan | 15 | 8,06 | 15 | 8,06 | 1 | 0,54 |
| | JUMLAH | 76 | 40,86 | 100 | 53,76 | 10 | 5,38 |

Dalam hal penggunaan penalaran hukum yang logis (runtut dan sistematis), tabel XXV menunjukkan bahwa dalam perkara pidana 30% putusan hakim telah mencerminkan penalaran hukum logis, 65% kurang memperhatikan penalaran hukum. Sebaliknya, dalam perkara perdata dalam tabel XXVI terlihat 40,86% penalaran hukum logis diterapkan dalam putusan dibandingkan dengan putusan yang kurang memperhatikan penalaran hukum yaitu sebesar 53,76%.

*Tabel XXVII:
Aspek Nilai-Nilai yang Hidup dalam Masyarakat (Pidana)
PN (N=80)*

| No. | Parameter | YA | | TIDAK | | TT | |
|------|---|----|-------|-------|-------|----|------|
| | | N | % | N | % | N | % |
| 4.1. | Putusan teridentifikasi pertimbangan faktor-faktor non yuridis | 28 | 35 | 11 | 13,75 | 1 | 1,25 |
| 4.2. | Faktor-faktor yang disebutkan dalam pertanyaan 4.1 sejalan dengan bunyi amar putusannya | 26 | 32,5 | 8 | 10,00 | 6 | 7,5 |
| | JUMLAH | 54 | 67,50 | 19 | 23,75 | 7 | 8,75 |

*Tabel XXVIII:
Aspek Nilai-Nilai yang Hidup dalam Masyarakat (Perdata) PN
(N=62)*

| No | Parameter | YA | | TIDAK | | TT | |
|------|---|----|-------|-------|-------|----|-------|
| | | N | % | N | % | N | % |
| 4.1. | Pertimbangan faktor-faktor non-yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius) dalam amar putusan | 9 | 14,52 | 13 | 20,97 | 9 | 14,52 |
| 4.2. | faktor-faktor yang disebutkan dalam pertanyaan 4.1 sejalan dengan bunyi amar putusnya | 10 | 16,13 | 10 | 16,13 | 11 | 17,74 |
| | JUMLAH | 19 | 30,65 | 23 | 37,10 | 20 | 32,26 |

Menyangkut pertimbangan faktor-faktor non-yuridis seperti psikologi, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius, tabel XXVII menunjukkan 67,50% putusan hakim dalam perkara pidana telah mempertimbangkan faktor non-yuridis, 23,75% kurang mempertimbangkan faktor non-yuridis, sedangkan dalam perkara perdata tabel XXVIII terlihat 30,65% putusan hakim pengadilan negeri memperhatikan faktor non-yuridis dibandingkan yang sebaliknya yaitu 37,10%.

*Tabel XXIX:
Profesionalisme Hakim Perkara Pidana PN
(N=40)*

| No. | Parameter | YA | | TIDAK | | Keterangan |
|------|--|----|----|-------|----|------------|
| | | N | % | N | % | |
| 5.1. | Hakim telah berlaku profesional dalam menjalankan tugasnya | 20 | 50 | 20 | 50 | |
| 5.2. | Rekomendasi terkait kesimpulan pada butir 5.1 | | | | | |
| | JUMLAH | 20 | 50 | 20 | 50 | |

Tabel XXX:
Profesionalisme Hakim Perkar Perdata PN
(N=62)

| No | Parameter | YA | | TIDAK | | Keterangan |
|------|---|----|-------|-------|-------|------------|
| | | N | % | N | % | |
| 5.1. | Hakim telah berlaku profesional dalam menjalankan tugasnya | 18 | 29,03 | 13 | 20,97 | |
| 5.2. | apakah penilaian Anda pada butir 5.1) sejalan dengan deskripsi umum dari hasil pengkajian data primer | 15 | 24,19 | 16 | 25,81 | |
| 5.3. | Rekomendasi | | | | | |
| | JUMLAH | 33 | 53,23 | 29 | 46,77 | |

Dari aspek profesionalisme hakim, tabel XXIX terlihat 50% putusan hakim pengadilan negeri dalam perkara pidana terlihat profesional dan 50% kurang profesional. Selanjutnya dalam perkara perdata, tabel XXX menunjukkan 53,23% putusan hakim profesional, 46,77% kurang profesional.

Tabel XXXI:
Dasar Gugatan Putusan Perdata PN
(N=31)

| | | Pilihan A (wanprestasi) | | Pilihan B (PMH) | | Pilihan C (lain-lain) | |
|------|----------------------------------|----------------------------|------|-----------------|-------|--------------------------|-------|
| | | N | % | N | % | N | % |
| 2.1. | dasar gugatan/jawaban para pihak | 1 | 3,23 | 19 | 61,29 | 11 | 35,48 |

Dari seluruh putusan perkara perdata di pengadilan negeri, tabel XXXI terlihat 3,23% dasar gugatannya wanprestasi, 61,29% perbuatan melawan hukum dan 35,48% lain-lain.

B. Analisis Kualitatif

Analisis yang disajikan oleh tim analis di sini sepenuhnya berangkat dari hasil laporan penelitian para peneliti jejaring diberbagai daerah. Tugas tim analis adalah mencari titik-titik simpul dari semua laporan yang telah disampaikan dan dipresentasikan oleh para peneliti, untuk kemudian dibuat kompilasi dengan memperhatikan sejumlah catatan-catatan menarik. Itulah sebabnya, analisis ini tidak didesain untuk secara detail menceritakan kasus per kasus dengan berfokus pada figur para hakimnya. Kompilasi dari tim analis ini lebih merupakan deskripsi umum dari hasil penelitian keseluruhannya. Untuk memperoleh informasi yang lebih spesifik, para pembaca perlu mengakses langsung ke laporan-laporan individual para peneliti jejaring terhadap kasus per kasus.

Terhitung sampai tahun 2012 ini, Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menyelenggarakan sedikitnya lima kali penelitian serupa terkait putusan-putusan pengadilan dari seluruh Indonesia. Dari rangkaian penelitian tersebut, sesungguhnya dapat diperhatikan ada kecenderungan yang kurang lebih sama terhadap hasil-hasil penelitian tahunan tersebut. Sebagai contoh, melalui kompilasi laporan-laporan penelitian jejaring pada tahun 2011, tim analis menunjukkan lima butir kesimpulan yang pada intinya menyatakan:

Pertama; secara umum, baik putusan perkara pidana maupun putusan perkara perdata menunjukkan kecenderungan yang sama dari segi pemenuhan ketentuan prosedural formal menurut hukum acara. Putusan-putusan pada pengadilan tinggi umumnya dipandang sudah memenuhi ketentuan prosedural formal menurut hukum acara.

Kedua; putusan-putusan ini sudah cukup memadai dalam memaknai ketentuan hukum material. Baik untuk perkara pidana maupun perdata, mereka umumnya masih memosisikan diri secara pasif dan tidak cukup kritis menilai pola dan materi dakwaan/gugatan pada pihak yang berhadap-hadapan di ruang pengadilan. Sikap demikian menyebabkan hakim kurang responsif dalam menilai struktur aturan yang diajukan masing-masing pihak. Kelemahan ini terjadi akibat dari kurang kayanya referensi yang digunakan para hakim, khususnya yurisprudensi dan doktrin.

Ketiga; keruntutan penalaran hakim-hakim pengadilan tinggi cukup baik apabila hanya dinilai dari keterhubungan antara premis mayor dan premis minor. Padahal, ada cukup banyak perkara yang memiliki kompleksitas tinggi yang di dalamnya terbuka dilakukan penemuan-penemuan hukum.

Keempat; secara kuantitatif terlihat bahwa akomodasi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan dinilai cukup memadai baik dalam putusan perkara pidana maupun perdata.

Kelima, kecenderungan hakim untuk dinilai profesional atau tidak profesional sangat terkait dengan kemampuan hakim menjalankan prinsip-prinsip hukum acara. Dari aspek ini, hakim-hakim dapat dinyatakan telah bertindak profesional dalam catatan-catatan tertentu.

Apabila ditarik kebelakang, butir-butir kesimpulan di atas pun sebenarnya cukup konsisten dengan hasil penelitian tahun-tahun sebelumnya. Atas dasar kesimpulan ini, dapat saja saat ini dibangun pula satu hipotesis bahwa kecenderungan hasil kompilasi laporan-laporan penelitian tahun 2012 inipun tampaknya akan tiba pada butir-butir kesimpulan yang sama. Hipotesis

tersebut juga dibangun melalui kenyataan bahwa perubahan kualitas putusan-putusan pengadilan tidak akan berjalan secara serta merta tanpa didahului oleh langkah-langkah strategis yang dipakai sebagai momentum ke arah perubahan itu. Momentum untuk berubah tersebut tampaknya masih belum cukup dihadirkan, terlepas lembaga pengawas eksternal peradilan sudah berdiri dan instrumen pengawasan berupa Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) juga sudah disosialisasikan.¹

Hampir sama dengan penelitian tahun 2011, penelitian kali ini bertolak dari lima pertanyaan pokok, yakni: (1) apakah putusan-putusan hakim tersebut telah mengikuti prosedur hukum acara; (2) terkait dengan hukum material, apakah putusan-putusan telah dapat menyajikan proses pembuktian unsur-unsur yang didakwa/digugat; (3) apakah putusan-putusan telah mencerminkan penalaran hukum yang logis (runtut dan sistematis); (4) apakah putusan-putusan telah menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (aspek non-yuridis); dan (5) bagaimana gambaran profesionalisme hakim dalam penyelesaian perkara di dalam putusan-putusan tersebut? Kelima pertanyaan ini dapat dipaparkan hasil kompilasinya sebagai berikut:

¹ Beberapa perkembangan terakhir, seperti dikabulkannya oleh Mahkamah Agung permohonan uji material (putusan No. 36 P/Hum/2011) atas SKB Ketua MA dan Ketua KY tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dapat dimaknai sebagai masih cukup kuatnya semangat resistensi di kalangan penegak hukum terhadap atmosfer perubahan ini. Sementara itu, momentum reformasi politik dan pengungkapan hasil penelitian yang bernada negatif terhadap insitutusi yudikatif di Indonesia sebagaimana misalnya yang dipublikasi oleh Sebastiaan Pompe, terbukti belum cukup memicu semangat penyandang profesi hukum secara masif untuk memperbaiki diri dan lembaga masing-masing.

Aspek prosedural hukum acara

Sejauh yang dapat diamati oleh para peneliti melalui naskah putusan, tampaknya masalah ketaatan pada aspek formal yang diamanatkan ketentuan hukum acara, tidak mendapatkan catatan berarti. Para hakim sudah cukup memahami apa yang seharusnya dimuat secara kasat mata di dalam format putusan mereka sebagaimana digarisbawahi dalam Pasal 197 KUHAP, Pasal 164, 153, 154, 184 HIR (284, 180, 181, dan 195 RBG), serta dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.²

Catatan-catatan yang lebih spesifik biasanya baru muncul ketika penelitian dilakukan lebih jauh ke prosedur pembuktian. Proporsionalitas hakim dalam mengutip dan menuangkan pandangan hukum para pihak yang terlibat dalam suatu perkara, adalah salah satu celah yang bisa mencederai aspek prosedural ini. Peneliti cukup beralasan untuk memberi catatan atas ketidakcermatan hakim dalam menjalankan sistem pembuktian ini, mengingat asas audi alteram partem³ merupakan asas penting yang harus tercermin dalam putusan ini. Hal lain, misalnya, hakim tidak eksplisit mencantumkan minimal dua alat bukti yang dipertimbangkan di dalam putusannya, juga apakah alat-alat bukti itu telah mampu membangun keyakinannya ketika menjatuhkan putusan. Ketidakcermatan demikian terjadi tidak hanya pada saat kasus itu diperiksa di pengadilan tingkat pertama, tetapi juga berlanjut (tidak diperbaiki) pada

² Lihat beberapa laporan penelitian putusan dengan kode: UMM-1a, 1b; Untan-1a, 1b; Untan-2a, 2b; Untan-3a, 3b; Untan-4a, 4b; Unlam-5a, 5b; UII-4b; UII-5a, 5b; Unand-2a; Unand-5a; USU-3a; Unja-4a, 4b; Unsyiah-3a, 3b; Unsyiah-4a, 4b; Unsyiah-5a, 5b; HuMa- 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b; U45- 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b; Unud- 4a, 4b, 5a, 5b; Unila- 3a, 3b, 4b, 5a, 5b; Unpas- 2a, 3a, 3b, 4a, 4b, 5b.

³ Dalam beberapa referensi berbahasa Indonesia, asas ini sering ditulis secara keliru "audi et alteram partem". Istilah yang benar adalah tanpa kata "et". Mengenai ini, lihat Henry C. Black, *Black's Law Dictionary* (St. Paul: West Publishing Co., 1990), hlm. 131.

pengadilan tingkat banding.⁴

Kesalahan redaksional dalam pengetikan putusan bisa pula mencederai kesempurnaan putusan.⁵ Kekurang hati-hatian hakim dalam mengidentifikasi tempat terjadinya peristiwa hukum, antara lain ditemukan dalam satu perkara perceraian di Banjarmasin. Kesalahan seperti ini sesungguhnya terbilang fatal, namun kurang mendapat perhatian karena mungkin kebetulan bukan terjadi pada perkara pidana. Tempat terjadinya perkawinan antara pihak penggugat dan tergugat dinyatakan oleh hakim berlangsung di Gereja St. Yoakim Pangkalpinang, tetapi lalu disebutkan bahwa kota Pangkalpinang ini adalah juga kota Koba, yang terletak di Bangka Tengah.⁶

Hak-hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum, juga menjadi catatan penting lainnya karena dalam beberapa putusan ternyata tidak secara eksplisit disebutkan telah dipenuhinya hak ini,⁷ padahal untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara minimal lima belas tahun wajib didampingi penasihat hukum. Kriteria syarat ancaman pidana ini bahkan lebih rendah lagi bagi terdakwa yang tidak mampu membayar sendiri biaya penasihat hukumnya, karena bagi mereka yang diancam lima tahun penjara, juga wajib disediakan

⁴ Lihat misalnya laporan dari UMM-2a, 2b; UMM-3b; UMM-5a, 5b; Unlam-4b; UMM-4b.

⁵ Lihat putusan UII-1b dan Unand-1b. Patut dicatat, bahwa dalam praktik kebanyakan pengadilan menyerahkan tugas pengetikan putusan hakim ke panitera (i.c. panitera pengganti), yang dituangkan di atas kertas HVS dengan format tulisan sebanyak 30 baris per lembar, dengan margin kiri samping, atas, dan bawah 3 cm dan kanan samping 2 cm. Lalu, putusan (dalam perkara pidana) dibuat enam rangkap guna diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, penasihat hukum/terdakwa (jika diminta), pengadilan tinggi/MA, dan sebagai arsip. Lihat Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 205-206.

⁶ Lihat putusan Unlam-5b; HuMa- 1b,1b,4a.

⁷ Contoh putusan Unja-5a; Unila- 4a, Unpas- 5a.

penasihat hukum secara cuma-cuma (Pasal 56 KUHAP). Memang ada saja kemungkinan kecil bahwa terdakwa rupanya sudah ditawari “fasilitas” penasihat hukum, tetapi yang bersangkutan menolak karena alasan-alasan tertentu (misalnya ada persepsi bahwa hukumannya bakal lebih berat kalau didampingi penasihat hukum). Adanya tawaran ini biasanya dituangkan dalam berita acara, tidak dimuat dalam putusan. Kebiasaan seperti ini seharusnya dapat ditinggalkan. Artinya, hakim wajib memberikan “klarifikasi” di dalam putusannya apabila ada terdakwa yang tidak bersedia didampingi penasihat hukum sekalipun sudah ditawarkan, mengingat pengenyampingan hak terdakwa ini memiliki konsekuensi tersendiri terhadap kualitas putusan yang dihasilkannya. Dalam penelitian tahun-tahun sebelumnya, ketiadaan penasihat hukumnya berimplikasi sangat jauh pula pada imparialitas hakim dalam persidangan. Untuk kasus tindak pidana narkotika/psikotropika yang dilakukan oleh pemakai/pengedar dari kelompok masyarakat “kecil”, ketiadaan penasihat hukum membuat mereka tidak leluasa menghadirkan saksi-saksi *a-decharge*, karena mereka sendiri biasanya dalam keadaan ditahan selama proses persidangan berlangsung. Akibatnya, terdakwa harus berhadapan dengan saksi-saksi *a-charge* yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, termasuk saksi verbalisiant yang berasal dari aparat kepolisian yang menangkapnya dilapangan.⁸

Hal lain yang menjadi catatan terkait dengan objek putusan yang diteliti adalah posisi terdakwa setelah dijatuhi pidana. Sebuah kasus tentang perbuatan cabul terhadap anak yang terjadi di Maluku Utara, misalnya, telah diputus dengan menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi tidak disertai keterangan apakah terdakwa

⁸ Dalam penelitian ini ada pula putusan yang dikritik oleh peneliti karena hakim lebih mempertimbangkan keterangan saksi *verbalisiant* yang tidak disumpah daripada saksi yang disumpah. Lihat putusan Unand-3a.

diperintahkan untuk ditahan atau tidak.⁹ Berdasarkan amanat Pasal 197 ayat (2) KUHAP, putusan hakim yang tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, dinyatakan batal demi hukum.

Peran pengadilan tingkat banding untuk meluruskan pelanggaran aspek prosedural hukum acara, menjadi sangat penting. Ancaman batal demi hukum yang dialamatkan pada putusan pengadilan tingkat pertama akibat kelengkapan pemenuhan syarat formal ini, jelas merupakan beban tanggung jawab pengadilan tingkat berikutnya untuk menilainya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengadilan tingkat banding untuk tidak juga melakukan pengabaian yang sama. Tentu saja, pengertian aspek prosedural ini tidak semata-mata terbatas ketaatan pada format putusan menurut Pasal 197 KUHAP, Pasal 164, 153, 154, 184 HIR (284, 180, 181, dan 195 RBG), melainkan juga pada prinsip-prinsip hukum acara lainnya. Salah satunya adalah tentang kumulasi subjektif yang mensyaratkan adanya hubungan hukum di antara pada subjek, yang ternyata kurang mendapat perhatian majelis hakim pengadilan tingkat pertama, sehingga diperbaiki pada putusan banding.¹⁰

Idealnya majelis hakim memang perlu menyediakan waktu yang cukup untuk bermusyawarah sebelum mereka menjatuhkan putusan. Ketergesa-gesaan dapat berujung pada ketidakcermatan, ketidakjelasan, dan ketidaklengkapan.

⁹ Lihat Unja-3b; Unpas- 1a,1b. Sebenarnya perlu juga dilihat Surat Edaran MA No. 8 Tahun 1985 tentang Perintah agar Terdakwa Tetap Ditahan Menurut Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP. Intinya, surat putusan pemedanaan memang harus memuat perintah supaya terdakwa ditahan, tetapi kalau wewenang penahanan yang dimiliki pengadilan negeri/pengadilan tinggi sudah habis dipergunakan, maka hakim tidak dapat memerintahkan "agar terdakwa ditahan" di dalam putusannya.

¹⁰ Terjadi pada putusan UII-4b.

Itulah sebabnya, hari/tanggal musyawarah dianjurkan untuk berbeda dengan hari/tanggal pembacaan putusan. Dalam praktik, kecuali oleh MA, tidak selalu pengadilan tingkat pertama dan banding melaksanakan anjuran demikian.¹¹ Ada kemungkinan perkaranya sangat sederhana, sehingga majelis tidak menemukan kendala untuk mencapai permufakatan, sehingga tidak perlu ada jarak waktu yang lama antara musyawarah dan pembacaan putusan. Lain halnya apabila perkara itu memiliki kompleksitas yang tinggi, yang bahkan mengundang hakim-hakim mengajukan opini berbeda. Karakter perkara yang lazim disebut *hard case* atau penumbral case ini jelas tidak boleh diumumkan secara terburu-buru. Disadari bahwa ada dalih untuk tidak boleh berlama-lama menunda pembacaan putusan agar tidak terbuka kesempatan putusan itu diintervensi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (populer diberi sebutan “masuk angin”). Segala kemungkinan seperti kekhawatiran di atas seharusnya dapat diatasi apabila pengawasan terhadap etika dan perilaku hakim dapat berjalan efektif. Sebab, kesempatan bagi oknum hakim yang tidak etis untuk “bermain mata” sesungguhnya tidak usah harus menunggu jeda waktu antara saat musyawarah dan pembacaan putusan. Kesempatan demikian selalu saja terbuka sepanjang masa persidangan.

Setiap putusan yang sudah dibacakan di hadapan publik dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan itu serta merta menjadi produk hukum yang bisa dimiliki dan dikonsumsi publik (*public domain*). Itulah sebabnya, dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, putusan pengadilan termasuk dalam kategori informasi publik sehingga wajib dibuka seluas-luasnya bagi anggota masyarakat yang membutuhkan.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 129. Dalam penelitian ini ditemukan ada beberapa putusan dengan hari/tanggal bersamaan antara saat musyawarah dan pembacaan putusan, misalnya putusan UMM-1a,1b; Unand-2a; USU-4b; UPs- 1b,5b.

Dalam kaca mata publik, produk hukum adalah teks yang dapat dibedah kembali menurut kaca mata ilmiah dan nilai-nilai aksiologis yang diyakini harus ada di dalam suatu putusan. Di sinilah akhirnya, setiap putusan hakim wajib dibekali oleh pertimbangan-pertimbangan yang rasional (artinya benar secara ilmiah, khususnya menurut pakem-pakem keilmuan hukum) tetapi juga sekaligus akomodatif terhadap nilai-nilai (dimensi aksiologis) yang diharapkan, yaitu mengedepankan keadilan, menebar kemanfaatan, dan memberi kepastian. Putusan yang tidak dilandasi oleh itikad baik untuk memenuhi dimensi rasional dan nilai-nilai tersebut, akan mudah terdeteksi sekalipun dibungkus dengan formulasi tekstual yang berbelit-belit.

Aspek hukum material

Hukum material bersentuhan dengan sumber-sumber formal hukum positif yang dijadikan dasar dalam persidangan, baik untuk perkara perdata maupun pidana. Kelangkaan referensi berupa yurisprudensi dan doktrin sebagai sumber hukum di luar undang-undang adalah catatan yang banyak dikeluhkan oleh para peneliti. Ketika ada putusan yang mengutip yurisprudensi atau doktrin tertentu, putusan demikian langsung mendapat apresiasi.¹² Kelangkaan yang disebutkan di atas sebenarnya dapat dideteksi dari problematika kesulitan para hakim dalam mengakses yurisprudensi dan literatur yang mutakhir. Ada hakim yang berani menyebutkan bahwa pilihan untuk menggunakan dasar hukum lain yang tidak digunakan oleh jaksa penuntut umum adalah sebuah langkah yang didasarkan pada yurisprudensi, tetapi sayangnya ia tidak berhasil menunjuk nomor putusan yang diberi label yurisprudensi itu.¹³ Yurisprudensi yang dimaksud sebenarnya adalah putusan Mahkamah Agung

¹² Lihat putusan UII-3b; UII-4b; USU-4a; Unja-5a, 5b; Unpas- 2a,4a,4b.

¹³ Lihat putusan USU-4a.

No. 86 K/Pid/1982 dan No. 606 K/Pid/1984.¹⁴ Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber hukum yang lebih kaya dan komprehensif, mustahil untuk dipenuhi sepanjang para hakim tidak diberi fasilitas akses yang cepat dan mudah atas referensi terkait. Pengembangan sumber hukum berupa yurisprudensi, adalah salah satunya. Dari hasil wawancara dengan para hakim, semangat untuk terlebih dulu menggali yurisprudensi sebelum mereka menjatuhkan putusan, sama sekali tidak terlihat mencuat ke permukaan. Pandangan klasik, bahwa sistem *civil law* yang kita anut memang tidak mensyaratkan pendekatan seperti itu, boleh jadi ikut menyurutkan semangat itu. Padahal, di tengah tendensi menurunnya kualitas pembentukan dan produk peraturan perundang-undangan kita dewasa ini, menuntut kreativitas yang lebih tinggi dari para hakim yang berkuat pada kasus-kasus konkret, sehingga melalui putusan *in-concreto* itu dapat diangkat ke tingkat yang lebih tinggi menjadi sebuah “yurisprudensi”. Artinya, sangat diharapkan, melalui putusan-putusan *in-concreto* yang bernas, akan muncul kaidah-kaidah yang diabstraksi menjadi norma *in-abstracto* untuk dipakai mengisi ruang-ruang “kekosongan hukum” dalam peraturan perundang-undangan kita.

Motivasi untuk mencari tahu seberapa jauh motivasi para hakim untuk berkreasi mengisi “kekosongan hukum” melalui penemuan-penemuan hukum seperti diutarakan diatas, adalah juga faktor yang melatarbelakangi desain penelitian putusan hakim tahun 2012 ini. Untuk itu para hakim pengadilan tinggi yang dipandang berpotensi menjadi calon hakim agung, dimintakan informasi tentang putusan-putusan mereka yang dianggap layak untuk dijadikan objek analisis. Putusan-putusan tersebut selayaknya berkategori

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 114, mengutip Yurisprudensi Indonesia Tahun 1983 Jilid II (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1985), hlm. 43-49.

sebagai putusan dengan kompleksitas relatif tinggi,¹⁵ sehingga terbuka luas peluang mereka untuk melakukan penemuan hukum. Sayangnya, dari banyak putusan yang disodorkan oleh para hakim tersebut, tidak cukup banyak putusan yang dapat diklasifikasikan sebagai kasus dengan kompleksitas tinggi. Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara dengan para hakim itu sendiri, yang menyatakan bahwa kasus yang melatarbelakangi putusan yang mereka berikan (untuk menjadi objek kajian dalam penelitian ini) hanyalah biasa-biasa saja.¹⁶ Dalam konteks untuk memfasilitasi pembentukan yurisprudensi dan penyebaran informasi yurisprudensi tersebut, peran Mahkamah Agung tampaknya sangat dominan dan strategis, mengingat di pengadilan tingkat terakhir inilah produk yurisprudensi itu biasanya ditetapkan.¹⁷

Di luar akses terhadap yurisprudensi, kemampuan hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat juga sangat penting. Kearifan lokal melalui hukum adat dan kebiasaan adalah hukum material yang juga bisa digunakan. Dalam kasus hukum perdata, diversifikasi sumber formal hukum ini wajib untuk digarisbawahi. Perkara yang dialami

¹⁵ Sangat menarik, bahwa ketika ditanyakan oleh pewawancara (peneliti) kepada para hakim tentang kompleksitas kasus, beberapa hakim menyodorkan indikator kompleksitas ini secara lebih beragam. Misalnya, ada yang mengatakan bahwa suatu kasus dinilai kompleks karena ancaman hukumannya tertinggi (pidana mati), atau melibatkan seorang dokter ternama dan kasusnya menarik perhatian publik, atau pihak-pihaknya adalah pengusaha besar, para pemegang kekuasaan, dan para buruh, atau jika efek sampingan (*side-effect*) dari kasus tersebut sangat tinggi (misalnya pengadilan didatangi demonstran, diancam bom, dll.). Mengenai hal ini lihat antara lain transkrip wawancara peneliti UMM dengan para hakim pada putusan UMM-2b, 3b, 4b, dan 5b.

¹⁶ Lihat misalnya wawancara dengan hakim pengadilan tinggi yang dilakukan dalam analisis putusan, antara lain dalam putusan UPs- 4b,5b.

¹⁷ Selain publikasi berbentuk buku yang terbit dua tahunan, Mahkamah Agung RI juga telah mengunggah cukup banyak putusan yang diberi label “yurisprudensi”. Sangat disayangkan, tidak cukup transparan kriteria yang dipakai untuk penyebutan yurisprudensi tersebut. Bahkan, kaidah hukum baru yang dimunculkan dalam suatu putusan untuk layak diberi berlabel “yurisprudensi” sering tidak dinyatakan secara jelas.

oleh pengadilan agama, sejak lama dikenal dekat dengan sumber formal hukum selain undang-undang, mengingat hampir keseluruhan norma yang dijadikan acuan memang sudah berangkat dari sumber kitab suci dan/atau al-hadits dengan berbagai pendekatan mazhab. Ketentuan hukum positif bahkan tidak ditempatkan pada derajat yang lebih tinggi daripada Al-Quran dan al-hadits.

Dalam kasus-kasus pidana, kemampuan hakim untuk memahami hukum material dengan cara mensubsumsi norma hukum positif terhadap fakta hukum merupakan sebuah keniscayaan. Dalam kasus-kasus perdata, posisi norma hukum positif ini digantikan oleh dasar gugatan, baik karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Diatas kertas (secara teoretis) dapat diasumsikan bahwa dilihat dari dimensi hukum material yang dipakai sebagai dasar penyusunan premis mayor, hakim memiliki keleluasaan lebih luas untuk “berkreasi” menemukan hukum pada kasus-kasus perdata daripada pada kasus-kasus pidana. Metode penemuan hukum dengan cara konstruksi, misalnya, banyak dihindari dalam penyelesaian kasus-kasus pidana, tetapi dapat diterima dalam kasus-kasus perdata. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, misalnya, cukup lazim dipakai sebagai alasan pengajuan gugat cerai.¹⁸ Namun, ada kemungkinan hakim menetapkan bahwa perbedaan agama yang muncul di kemudian hari ketika di dalam masa perkawinan ada pihak yang berpindah ke agama lain, dapat juga dipakai sebagai dalih pengakhiran perkawinan,¹⁹ kendati alasan ini tidak disebutkan secara spesifik dalam Undang-Undang Perkawinan.

Metode penemuan hukum secara konstruksi, sempat disinggung dalam salah satu perkara pidana yang dijadikan objek kajian penelitian. Kasus yang disidangkan di Pengadilan

¹⁸ Lihat putusan UMM-1a, 1b.

¹⁹ Lihat putusan Unlam-5a, 5b.

Negeri Bangkinang ini terjadi sudah cukup lama (2001), berkenaan dengan tuntutan terhadap terdakwa karena secara melawan hukum sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Perihal yang dikonstruksikan adalah unsur sengaja. Tindakan terdakwa yang menyadari/ mengetahui betul bahwa sebagian besar lahannya mempunyai potensi sangat tinggi untuk terjadinya kebakaran, tetapi terdakwa tetap membiarkannya sehingga akhirnya kebakaran terjadi berulang kali, maka hal demikian berdasarkan teori kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*) dapat diterapkan dalam kasus tersebut. Peneliti memandang pertimbangan hakim seperti ini menunjukkan hakim sudah melakukan konstruksi secara *a-contrario*. Konstruksi ini dibedakannya dengan konstruksi linier (normatif) yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili kasus ini ditingkat banding. Hakim di pengadilan tinggi menilai bahwa tidak berhasilnya upaya preventif yang dilakukan oleh terdakwa tidak bisa serta merta disebut kesengajaan. Hakim pengadilan banding berpendapat bahwa kebakaran adalah peristiwa yang terpisah dengan upaya preventif itu. Hakim pengadilan tinggi berpendapat teori kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*) sebagaimana diyakini hakim pengadilan tingkat pertama tidak dapat diterapkan untuk kasus ini dan hakim lebih memilih untuk menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.²⁰

Di samping itu, penggunaan metode penafsiran juga didapatkan dalam perkara pidana yang juga dijadikan objek kajian penelitian, yaitu kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon. Hakim PN dalam memutus perkara pidana tentang Perdagangan Orang, menafsirkan kriteria usia dewasa

²⁰ Lihat putusan U11-2a, 2b.

bagi korban berdasarkan hukum adat, yaitu meskipun korban belum berusia 18 tahun tapi sudah pernah menikah atau belum menikah tetapi sudah pernah berhubungan seks, maka hakim menganggap korban dalam kasus ini sebagai dewasa. Peneliti memandang hal ini bertentangan dengan prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, khususnya kepentingan terbaik bagi anak, karena meskipun telah menikah atau berhubungan seks, namun orang yang berumur di bawah 18 tahun tetap saja secara psikologis adalah anak.²¹ Oleh karena itu, penggunaan penafsiran dalam perkara ini, dipandang tidak tepat.

Keberanian hakim untuk melakukan penemuan hukum dalam menyikapi problematika yang muncul dalam kasus yang ditanganinya, patut dihargai. Sebagaimana tersimpulkan dari penelitian-penelitian serupa yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI beberapa tahun terakhir ini, kreativitas hakim untuk melakukan penemuan hukum sangat jarang dilakukan, sehingga cikal-bakal munculnya terobosan yang mencerahkan melalui putusan-putusan yang bernas (*landmark decision*) merupakan fenomena langka dalam penelitian-penelitian tersebut.

Catatan-catatan yang bernada sebaliknya justru banyak ditemukan, misalnya karena hakim dinilai gagal mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan, antara lain karena ada unsur "itikad tidak baik" dan unsur "perbuatan melawan hukum" yang tidak ikut dipertimbangkan atau tidak lengkap dipertimbangkan atau ketidaktepatan penafsiran terhadap unsur "setiap orang" pada suatu kasus.²² Hakim juga dinilai bias dan tidak cermat dalam membuktikan karena barang buktinya tidak dihadapkan dipersidangan dan hakim tidak mempertimbangkan secara teliti semua

²¹ Lihat putusan Unpas- 5a.

²² Lihat putusan Unlam-4a, 4b.

fakta yang terungkap di persidangan.²³ Di sisi lain, ada juga catatan yang bisa diklasifikasikan sebagai kecacatan dalam penalaran, misalnya terjadinya dualisme karena di satu sisi amar putusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, tetapi hakim justru memeriksa pokok perkara.²⁴

Aspek penalaran hukum

Dalam kaitannya dengan penalaran hukum, para peneliti umumnya menilai hakim-hakim yang putusan-putusannya dijadikan objek kajian kali ini telah memberikan analisis yang tuntas terhadap fakta dan hukum atas kasus-kasus yang mereka tangani,²⁵ atau putusan-putusan itu sudah dianggap logis dan amar putusannya telah dicapai melalui penarikan kesimpulan yang benar.²⁶

Terlepas dari penilaian positif di atas, tampaknya ada sejumlah catatan yang perlu diberikan perhatian. Tetap ada beberapa putusan yang dinilai tidak dicapai melalui penalaran yang runtut dan sistematis, serta ada penarikan kesimpulan yang melompat (*jumping to conclusion*).²⁷ Sebagai contoh, ada unsur “setiap orang” yang telah mengubah konstruksi yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).²⁸

²³ Lihat putusan Untan-2b dan Untan 1-b, HuMa- 3a,3b,4b.

²⁴ Lihat putusan UMM-4a.

²⁵ Lihat antara lain putusan UMM-1a, 1b; Unlam-3a, 3b; UII-1b, UII-3a.

²⁶ Lihat putusan UMM-1a, 1b; Untan-1a; Untan-2a; Untan-3a, 3b; Untan-4b; Untan-5b; Unlam-1a; Unlam-2a, 2b; Unlam-5a, 5b; UII-2a, 2b; UII-5a, 5b; Unand-3a, 3b; Unand-5a; USU-3b; USU-4b; USU-5a, 5b; Unja-3a, 3b; Unja-4b; Unja-5a, 5b; Unsyiah-4a, 4b; HuMa- 1a,1b,4a,4b,5a,5b; UPs- 2a,5a; Unpas- 3b,4a,4b; U45-3a,3b,5a,5b; Unud- 4a,4b,5a,5b; Unila- 3a,3b,4b.

²⁷ Lihat putusan UMM-2a, 2b; UMM-5a, 5b; Untan-1b; Untan-2b; Untan-4a; Unlam-1b; Unlam-4a, 4b; UII-1a; HuMa- 2a,2b; UPs- 1a,1b,2a,3a; Unpas- 1a,1b,3a,5a; Unila- 5a.

²⁸ Lihat putusan Unlam-4b.

Dalam kasus yang terakhir disinggung, ada putusan Mahkamah Agung No. 868 K/Pid.Sus/2008, yang menyatakan unsur “setiap orang” ini akan bermakna apabila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur yang lain, sehingga Pasal 2 tersebut juga berlaku terhadap pegawai negeri, karena walaupun perkara tipikor berlaku asas spesialis, tetapi mengenai pengertian “setiap orang” tersebut tidak bersifat khusus. Jadi, jika seorang pegawai negeri didakwa dengan Pasal 2 dan Pasal 3 secara subsidiaritas, maka jika terbukti, terdakwa dikenakan Pasal 2 undang-undang tersebut karena unsur “setiap orang” dalam tersebut berarti siapapun baik pegawai negeri/pejabat atau swasta. Hakim pengadilan tinggi dalam putusan kasus di atas menilai keliru pemahaman majelis hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa dakwaan primer (Pasal 2 ayat [1]) tidaklah dapat dibuktikan dan lebih memilih dakwaan subsider (Pasal 3). Oleh sebab itu, hakim tingkat banding menyatakan pertimbangan hakim tingkat pertama itu harus diperbaiki.²⁹

Dalam proses penalaran hukum, terbukti bahwa pemaknaan terhadap terma-terma hukum memegang peranan sangat penting. Sebab, dari pemaknaan inilah premis mayor dibangun. Premis mayor tersebut dipakai sebagai landasan inferensial (penarikan kesimpulan) dalam logika deduktif. Tentu saja, satu pemaknaan definitif harus ditetapkan pada akhirnya oleh majelis hakim. Pemaknaan definitif baru ditampilkan setelah hakim mendengarkan pemaknaan-pemaknaan yang mungkin berbeda sebagaimana ditunjukkan oleh para pihak yang bersengketa. Apabila ada pemaknaan yang tidak terwakilkan, misalnya ada argumentasi penasihat hukum yang tidak ikut ditunjukkan di dalam pertimbangan

²⁹ Sayangnya perbaikan penafsiran atas “setiap orang” ini pada akhirnya tidak memiliki pengaruh pada amar putusan hakim di tingkat banding karena majelis setuju bahwa unsur “secara melawan hukum” pada dakwaan primer ini tetap tidak terbukti. Artinya, dakwaan subsider itulah yang dipakai oleh hakim pengadilan tingkat banding.

hukum,³⁰ maka dengan mudah akan melahirkan anggapan bahwa hakim tidak cukup menalar putusannya dengan runtut dan sistematis.

Ternyata keseriusan hakim untuk memperhatikan berbagai alternatif pemaknaan sebelum ia mengambil satu makna definitif, sama halnya dengan kebutuhan hakim untuk mempertimbangkan setiap pandangan yang muncul dipersidangan secara proporsional sesuai asas *audi alteram partem*. Termasuk dalam pengertian “pihak” di sini adalah putusan atau penetapan hukum dari lembaga lain, misalnya putusan pengadilan lain yang sudah muncul sebelumnya. Sebagai contoh, terungkap dalam penelitian ini ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang isinya membatalkan sebuah sertifikat tanah, tetapi pembatalan ini diabaikan sehingga mencederai kepastian hukum bagi pihak yang berperkara.³¹ Suatu ketika, terjadi pula ada akta hibah yang mengalihkan kepemilikan tanah kepada pihak lain, tetapi kemudian atas permintaan dan kepentingan pemberi hibah itu, di atas tanah yang sama justru bisa diterbitkan lagi sertifikat hak atas tanah.³² Dalam hal hukum dipahami sebagai suatu sistem, maka tidak ada pilihan lain kecuali pengadilan wajib mengupayakan sejauh mungkin selalu ada konsistensi pemaknaan-pemaknaan ini agar kepastian hukum dapat diperlihatkan.

Implikasi dari putusan-putusan yang dikesankan tidak dilakukan secara menjamin datangnya kepastian, dapat saja kemudian bermuara pada tudingan putusan itu telah “sesat hukum” dan “sesat sosial”.³³ Peneliti menilai demikian karena dalam putusan-putusan tersebut ditemukan ada pertimbangan hukum yang hanya sampai pada pembuktian

³⁰ Lihat antara lain putusan Unand-4b.

³¹ Lihat putusan USU-3a.

³² Lihat putusan Unja-4a.

³³ Istilah ini ditemukan dalam laporan putusan UMM-2a, 2b; UMM-5a, 5b.

satu sampai dua unsur perbuatan saja, sementara selebihnya dikatakan tidak perlu lagi dibuktikan. Dengan demikian, analisis unsur-unsur perbuatan tidak tuntas dilakukan dan berpotensi melukai perasaan keadilan masyarakat. Model putusan seperti ini tidak dapat diharapkan banyak untuk mengubah perilaku antisosial yang hendak diakhiri melalui mekanisme peradilan ini.

Aspek penggalian nilai-nilai yang hidup

Keterbatasan sumber hukum tertulis berupa undang-undang membutuhkan penyiasatan, mengingat hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan ke hadapannya dengan alasan tidak ada hukum yang berkenaan dengan kasus konkret tersebut. Salah satu metode untuk mengatasi keterbatasan itu adalah dengan cara melakukan penggalian terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Penggalian ini diharapkan dapat memberi cakrawala berpikir yang jauh lebih kaya dan komprehensif dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Inilah yang antara lain pernah ditekankan oleh Satjipto Rahardjo dengan menjelaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Putusan yang lahir dan berjalan di dalam lingkup koridor undang-undang yang sempit, akan terbuka untuk diserang sebagai produk hukum yang mengedepankan legisme (positivisme sempit) atau diberi istilah “keadilan birokratis”.³⁴

Para peneliti tidak selalu seragam dalam memahami apa yang disebut nilai-nilai yang hidup ini, karena dapat saja mencakup faktor-faktor psikologis³⁵, sosial, ekonomis, edukatif, lingkungan, religius, dan sebagainya. Seperti contoh yang telah dikemukakan diatas, aspek perbedaan agama telah

³⁴ Lihat putusan UMM-4a, 4b; USU-3a, Unja-5a; Untan-1a; Untan-4b; UII-3a.

³⁵ Lihat putusan U45-4a,4b

dipakai oleh pengadilan untuk menjadi dasar diputuskannya perceraian.³⁶ Bahkan, faktor politik pun bisa dipakai juga sebagai bahan pertimbangan, yaitu kemungkinan ada protes dari negara asing terhadap asap yang muncul dari pembakaran lahan.³⁷ Selain itu ada juga peneliti yang memaknai hakim “telah menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat” sebagai tindakan hakim yang telah kelayakan dan kepatutan serta asas-asas keadilan dalam masyarakat³⁸, atau bahkan dengan cara hakim menawarkan perdamaian sebelum putusan.³⁹

Untuk konflik-konflik yang memiliki dimensi adat, tuntutan pada hakim agar melakukan penggalian nilai-nilai yang hidup ini menjadi lebih nyaring lagi disuarakan. Kasus sengketa tanah adat adalah salah satunya.⁴⁰ Di sisi lain, ada pula desakan agar penggalian nilai-nilai yang hidup ini bisa lebih bernuansa universal, misalnya terkait dengan hak asasi manusia. Hal ini terjadi misalnya dalam perkara aborsi yang melibatkan pelaku (terdakwa) seorang dokter senior di Surabaya. Dalam kasus tersebut, terdakwa bersikeras bahwa pengertiannya tentang “awal kehidupan” berbeda karena didasarkan pada penafsiran menurut ketentuan agama, sehingga ia berkeyakinan perbuatannya tidak dalam konteks “membunuh” janin karena saat aborsi dilakukan, kehidupan itu belum dimulai.⁴¹ Seharusnya, putusan yang bersinggungan dengan konsep-konsep yang sangat mendasar, atau bahkan filosofis, seperti tentang kapan kehidupan dimulai, atau kapan kematian dapat dipastikan terjadi, atau apa hakikat hak milik, atau apa kriteria keadilan-kepastian-kemanfaatan,

³⁶ Lihat putusan Unlam-5a,5b.

³⁷ Lihat putusan Unand-4b.

³⁸ Lihat putusan HuMa-3a

³⁹ Lihat putusan Unila-3a,3b

⁴⁰ Lihat putusan Unand-1b. Juga perhatikan putusan-putusan lain seperti Untan-3a, 3b; Untan-5a, 5b; Unlam-1b; Unlam-2a, 2b; UII-2b; UII-3a; Unand-1b; Unand-3b; Unand-5a; USU-4a; USU-5a, 5b; Unja-3a, 3b; Unja-4a, 4b; Unsyiah-5a, 5b.

⁴¹ Lihat putusan UMM-3b.

adalah contoh putusan-putusan yang sangat membutuhkan elaborasi secara mendalam. Putusan-putusan perkara demikian berpotensi melahirkan *landmark decisions*. Oleh sebab itu, hakim seyogianya tertantang untuk memaparkan terlebih dulu berbagai sumber hukum, khususnya doktrin dan yurisprudensi berkenaan dengan konsep-konsep kunci di atas, sebelum ia sendiri sampai pada satu sikap tertentu dalam menyelesaikan kasus yang ada dihadapannya. Tanpa elaborasi demikian, argumentasi yang disodorkan oleh dokter (seperti dikemukakan dalam contoh kasus aborsi) di atas, sama sekali tidak mendapat sanggahan berarti. Publik yang kritis ingin mendapatkan pencerahan dari putusan itu, yang kurang lebih menyakinkan mereka bahwa pemaknaan normatif yang disodorkan oleh peraturan perundang-undangan (seandainya hakim memang lebih mengedepankan bunyi undang-undang) jauh lebih argumentatif daripada pemaknaan intuitif si dokter.

Dalam penelitian ini juga muncul skeptisisme para peneliti terhadap kualitas putusan-putusan tatkala bersinggungan dengan isu seputar filosofi pemidanaan.⁴² Jika mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, terlihat sekali bahwa filosofi pemidanaan yang ingin diusung oleh lembaga peradilan adalah retributivisme. Surat edaran bertanggal 30 Juni 2000 yang ditujukan kepada para ketua pengadilan tinggi dan pengadilan negeri seluruh Indonesia ini penting untuk dikutip secara lengkap, dengan bunyi sebagai berikut:

Dengan era reformasi yang melanda negara kita, telah membawa dampak yang sangat luas di segala aspek kehidupan bernegara. Terutama di bidang ekonomi mengakibatkan kecenderungan meningkatnya kuantitas serta kualitas tindak pidana yang memerlukan penanganan serta kebijakan pemidanaan secara khusus.

⁴² Lihat catatan peneliti terhadap putusan Untan-2a, 2b; UII-3b.

Oleh karena itu, terhadap tindak pidana, antara lain, ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat.

Tidak berlebihan dikemukakan bahwa di era reformasi sekarang ini telah terjadi perubahan nilai serta perkembangan hukum yang sangat cepat sehingga nilai dan moralitas hukum positif telah tertinggal, untuk mana Mahkamah Agung sekali lagi mengharapkan kiranya para hakim mampu berperan sebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat.

Demikian untuk diperhatikan para hakim.

Jadi filosofi retributivisme ini direkomendasikan dipakai oleh para hakim tatkala harus memidana pelaku tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, dan lingkungan hidup. Dengan pemidanaan demikian, diyakini hakim akan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Tugas hakimlah, menurut surat edaran ini, untuk menjadi katalisator yang menyesuaikan kesenjangan antara hukum positif dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam perkembangan akhir-akhir ini, rekomendasi yang disampaikan oleh Mahkamah Agung di atas pun ada yang perlu ditinjau kembali. Untuk kasus narkoba, misalnya, pelaku yang berstatus sebagai pemakai seyogianya tidak dipandang sama berat dan sifat kejahatannya dengan pengedar. Untuk itu, para hakim dihimbau saat ini untuk lebih mengedepankan filosofi pemidanaan rehabilitatif (kerap disebut juga restoratif atau terapeutic).

Aspek profesionalisme

Filosofi pemidanaan yang dipakai oleh para hakim ketika menjatuhkan putusan banyak dijadikan tolok ukur bagi para peneliti ketika mempersoalkan seberapa profesional hakim tersebut dalam menangani suatu perkara. Tolok ukur lainnya adalah soal kekeliruan atau ketidakcermatan dalam beracara dan berargumentasi.

Para peneliti yang membaca putusan suatu perkara, pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, dengan sendirinya disodorkan pada dua dokumen yang bisa langsung dikomparasi. Kerap terjadi, hakim pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama, tetapi ia sekadar mengoreksi amar putusannya. Jika amarnya berupa pemidanaan, maka koreksi tersebut tentu akan mengerucut pada sanksi yang meringankan atau memberatkan. Di sinilah diperlukan tersedianya argumentasi yang memadai dari hakim pengadilan tinggi untuk menunjukkan bahwa si pelaku memang layak mendapat keringanan atau pemberatan sanksi. Jadi, faktor-faktor peringan atau pemberat ini tidak boleh disebut “ala kadarnya” tanpa penjelasan.⁴³ Melakukan koreksi dengan memperingan sanksi pidana pun harus dilakukan secara cermat karena boleh jadi akan bertabrakan dengan rumusan pasal-pasal yang memberi ancaman pidana minimal. Sebagai contoh, ada putusan yang menjatuhkan pidana 1 tahun, sementara ancaman pidana menurut Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah 3 tahun.⁴⁴

Lemahnya komitmen hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, padahal hal ini sudah diamanatkan dalam undang-undang dan kode etik, juga

⁴³ Lihat putusan USU-4b.

⁴⁴ Lihat putusan Unja-3b.

menjadi indikator ketidakprofesionalan.⁴⁵ Namun, secara umum, para peneliti akan menetapkan sendiri indikator profesionalisme ini secara lebih terbuka dan tidak spesifik pada satu atau dua kelemahan saja.⁴⁶

Rekomendasi Peneliti

Terkait dengan hasil analisis para peneliti ini, dimunculkan pula beberapa rekomendasi menarik yang perlu dijadikan perhatian. Dalam panduan penelitian, perihal rekomendasi ini sengaja dibiarkan terbuka, sehingga para peneliti dapat mengajukan rekomendasi mereka secara leluasa. Alhasil, rekomendasi-rekomendasi tersebut ada yang cukup relevan, tetapi ada pula yang sudah di luar koridor penelitian ini (misalnya merekomendasikan pencalonan figur hakim tertentu). Butir-butir yang relevan untuk disampaikan antara lain:

1. Dalam prosedur beracara, khususnya dalam perkara perdata, upaya hakim melakukan perdamaian masih perlu diintensifkan sehingga tidak semua sengketa harus bermuara di pengadilan. Dalam analisis ini, terlihat cukup banyak kasus sederhana yang sesungguhnya dapat didekati secara non-litigasi, apalagi sampai harus berlarut-larut sampai ke tingkat pengadilan banding. Rekomendasi: perlu ada sosialisasi terus-menerus terkait intensifikasi upaya non-litigasi ini dalam rangka mengikis beban perkara yang masuk di ruang pengadilan.

⁴⁵ Lihat putusan UMM-3a,3b; Untan-1b; Untan-2a; Untan-5a; UPS- 1a,1b,2a,3a,5a,5b; Unpas- 1a,1b,3a,4a,4b,5a; Unud- 4b; Unila- 5a,5b; HuMa- 4a.

⁴⁶ Kebanyakan para peneliti memang menilai hakim-hakim sudah profesional dalam menjalankan pekerjaannya, terlepas dari adanya catatan kelemahan yang ditunjukkan dalam analisis putusan itu. Lihat antara lain putusan UMM-1a, 1b; Untan-1a; Untan-3b; Untan-4b; Unlam-1a; Unlam-2a; Unlam-3a; Unlam-5a, 5b; Ull-1b; Ull-2a, 2b; Ull-4b; Ull-5a, 5b; Unand-2a; Unand-3b; Unand-5a; USU-3a, 3b; USU-4a; USU-5a, 5b; Unja-4b; Unja-5b; Unsyiah-3a, 3b; Unsyiah-4a; HuMa-2a,2b,4b,5a,5b; Unpas- 2a,3b,5b; Unila- 3a,3b,4b; Unud- 5a,5b; UPS- 2b,3b,4b; U45- 3a,3b,4a,4b,5a,5b.

2. Lembaga peradilan perlu menghidupkan kembali mekanisme kontrol (internal) terhadap putusan pengadilan. Usulan ini mengingatkan kembali pada eksaminasi yang pernah dilakukan oleh hakim-hakim pengadilan tinggi terhadap putusan-putusan pengadilan tingkat pertama, yang kemudian ditiadakan pada awal era Orde Baru. Rekomendasi: perlu dipertimbangkan kembali untuk menghidupkan peran eksaminasi demikian agar fungsi pengawasan internal yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dapat didelegasikan secara lebih efektif dan efisien ke lembaga peradilan di bawahnya.
3. Pemahaman hakim terhadap metode penemuan hukum dan penalaran hukum masih perlu ditingkatkan. Rekomendasi: ada pelatihan-pelatihan khusus dengan fokus perhatian pada penguasaan metode penemuan hukum dan penalaran hukum.
4. Topik atau isu hukum yang mutakhir dan mendasar, seperti tentang penghormatan pada kode etik dan hak asasi manusia, harus dijadikan agenda pelatihan tematik bagi para hakim, khususnya bagi mereka yang ditempatkan pada daerah-daerah yang berpotensi tinggi terjadinya kasus-kasus terkait. Rekomendasi: ada pelatihan tematik yang diagendakan, bisa dilakukan sendiri oleh Komisi Yudisial dan/atau bekerja sama dengan instansi lain.
5. Keberanian hakim untuk berbeda pendapat dalam hal menyikapi hal-hal yang prinsipil juga masih kurang dihargai. Rekomendasi: ada upaya untuk membuat hakim lebih berani menyuarakan keyakinan dan suara hatinya, sekalipun pandangannya tidak berada dalam barisan *mainstream*. Penelitian-penelitian yang khusus diadakan untuk memetakan eksistensi dan kualitas putusan hakim-hakim yang berani melakukan *dissenting-opinion*, bisa menjadi opsi menarik.

6. Kecenderungan hakim untuk memperkaya wawasannya, antara lain terhadap yurisprudensi-yurisprudensi terbaru juga perlu difasilitasi. Untuk itu perlu ada media informasi yang bisa mereka akses dengan mudah sampai ke daerah-daerah. Media ini juga seyogianya memuat pula ringkasan teori-teori hukum terbaru (contoh ada usul untuk menggunakan teori atribusi "*correspondence inference*" dari Jones & Davis dalam mempertimbangkan berat-ringan hukuman) agar penguasaan doktrinal mereka dalam disiplin hukum tidak ketinggalan. Rekomendasi: media yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial dapat didesain untuk keperluan ini, bekerja sama dengan penulis-penulis potensial yang tersebar diberbagai perguruan tinggi, termasuk mereka yang sudah terlibat sebagai bagian jejaring penelitian ini.
7. Peningkatan profesionalitas hakim perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penyegaran tentang materi hukum baik material maupun formal, atau melalui peningkatan kualitas keilmuan pada jenjang pendidikan hukum yang lebih tinggi, agar hakim tetap membekali diri dengan pengetahuan hukum yang baru terutama terkait dengan aspek filosofis, yuridis, sosiologis, dan moral, sehingga putusan yang dijatuhkan diperkaya dengan doktrin dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum agama dan hukum adat
8. Komisi Yudisial sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, perlu bekerjasama dengan Mahkamah Agung untuk melakukan penyegaran keterampilan hukum terhadap hakim-hakim di Indonesia, agar terwujud hakim-hakim yang mampu memberikan keadilan bagi masyarakat.



Bab 3

Penutup

A. Rangkuman

Secara metodologis substansi analisis yang disajikan dalam bab terdahulu, yakni subbab analisis kuantitatif akan sinkron dengan substansi dalam subbab analisis kualitatif. Untuk memastikan hal ini, maka dalam bab ini, kedua materi analisis tersebut akan dipersandingkan. Hasil dari persandingan itu akan menjadi rangkuman sebagaimana disajikan di bawah ini.

Khusus untuk saran, dalam bab ini tidak lagi diberikan, mengingat pada subbab “rekomendasi” pada sebelumnya telah disampaikan proyeksi yang perlu dilakukan terkait dengan penelitian serupa di masa-masa mendatang.

Aspek Prosedural Hukum Acara

Secara kuantitatif, mayoritas putusan yang dianalisis diidentifikasi tidak bermasalah dengan pemenuhan prosedural hukum acara. Untuk putusan-putusan perkara pidana di tingkat pengadilan tinggi terlihat bahwa ketaatan pada hukum acara ini sudah mencapai 61% dan untuk perkara perdata mencapai 56,99%. Persentase ini bahkan lebih tinggi pada putusan-putusan pengadilan negeri, yakni di atas 77%

(pidana) dan 72,58% (perdata). Sekilas, dengan membaca angka-angka di atas, dapat diasumsikan bahwa hakim-hakim di pengadilan *judex factie* tingkat pertama lebih cermat dalam menjalankan prosedur hukum acara. Selain itu, hakim-hakim yang mengadili perkara pidana di kedua tingkatan pengadilan tampaknya jauh lebih berhati-hati dalam mengikuti ketentuan hukum acara ini dibandingkan tatkala mereka menangani perkara perdata.

Kendati demikian, jika diamati dari sisi sebaliknya, berarti masih ada sekitar 20-30% dari putusan-putusan itu yang dinilai menyimpan kelemahan dari sudut hukum acara. Hal-hal yang masih menjadi catatan antara lain:

1. Masih dijumpai sejumlah putusan yang tidak menghormati asas "*audi alteram partem*" yang ditandai dengan tidak diberikannya porsi yang seimbang kepada para pihak di dalam pertimbangan hakim.
2. Dalam pembuktian, masih ditemukan ada putusan yang tidak secara eksplisit mencantumkan minimal dua alat bukti yang telah dipertimbangkan, dan apakah keyakinan hakim terbangun melalui pembuktian tersebut.
3. Hak-hak terdakwa untuk didampingi oleh penasihat hukum, khususnya dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP, masih belum sepenuhnya dihormati.
4. Ada pengabaian atas ketentuan aspek prosedural ini, tercatat pula pada kasus dengan terdakwa anak-anak yang di dalam amar putusannya tidak diberi keterangan apakah terdakwa diperintahkan untuk ditahan atau tidak ditahan.
5. Kesalahan pengetikan, bahkan ketidakcermatan

dalam penyebutan tempat terjadinya peristiwa hukum juga masih ditemukan.

6. Walaupun tidak merupakan kewajiban, khusus untuk perkara-perkara yang tergolong "*hard cases*" seyogianya majelis hakim menyediakan waktu yang cukup untuk bermusyawarah sebelum putusan itu dibacakan di hadapan sidang yang terbuka untuk umum. Dalam perkara-perkara kompleks demikian, kesan ketergesa-gesaan akan muncul apabila hari/tanggal musyawarah dilakukan bersamaan dengan hari/tanggal pembacaan putusan.

Aspek Hukum Material

Dalam penelitian ini terlihat titik lemah muncul dalam penerapan hukum pidana material. Untuk putusan-putusan pengadilan tinggi, ada 61% yang diidentifikasi tidak menerapkan hukum pidana material secara memadai. Angka ini lebih baik pada putusan pengadilan tinggi untuk perkara perdata, yaitu berkisar pada angka 45,70%. Fenomena yang kurang lebih sama tampak pada putusan-putusan pengadilan tingkat pertama, yaitu 44,5% (pidana) dan 54,19% (perdata).

Kontribusi terbesar dari kelemahan ini, baik pada tingkatan pengadilan negeri maupun banding, disebabkan oleh:

1. Para hakim tidak cukup rajin mengelaborasi sumber-sumber hukum yang tersedia, khususnya sumber berupa yurisprudensi dan doktrin. Kelangkaan literatur dan keterbatasan akses dapat diduga sebagai faktor penyebabnya.
2. Motivasi hakim untuk mengelaborasi aspek hukum material dibatasi oleh keyakinan bahwa

tugas para pihaklah (jaksa atau penasihat hukum; penggugat dan tergugat) dan bukan hakim untuk menentukan dasar hukum yang digunakan. Hakim relatif bersifat pasif, sehingga ruang lingkup penafsiran substansi hukum ditentukan sepenuhnya oleh para pihak tersebut.

Aspek Penalaran Hukum

Secara umum, aspek penalaran hukum yang logis, runtut, dan sistematis masih dinilai kurang maksimal diperagakan. Untuk putusan-putusan pengadilan tinggi ada sekitar 52% (pidana) dan 48,39% (perdata) yang diidentifikasi belum mencerminkan penalaran yang baik. Pada pengadilan tingkat pertama, kondisinya tidak banyak berbeda, yaitu 51% (pidana) dan 53,76% (perdata). Hal ini menunjukkan separuh dari putusan-putusan yang diteliti ini dinilai mengandung kelemahan dari sisi penalaran hukumnya.

Sejumlah faktor yang dapat dikaitkan dengan kecenderungan di atas adalah sebagai berikut:

1. Ada logika melompat (*jumping to conclusion*), yang terjadi karena kesimpulan ditarik berdasarkan premis-premis yang tidak terhubung secara valid. Sebagai contoh, ada unsur sebuah pasal yang dikonstruksikan secara berbeda dengan rumusan awalnya tanpa diberikan alasan yang cukup atas perubahan makna ini.
2. Beberapa putusan tidak mendukung asas kepastian hukum, misalnya bertolak belakang dengan putusan sebelumnya dari pengadilan (yang sudah berkekuatan hukum tetap).
3. Hakim memberi pertimbangan tidak tuntas, yaitu hanya atas satu atau dua unsur dari perbuatan, sedangkan unsur selebihnya dinyatakan tidak

perlu lagi dibuktikan.

4. Hakim tidak konsisten dalam menyikapi suatu kasus, misalnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima tetapi ternyata tetap memeriksa pokok perkara.

Aspek Penggalian Nilai-Nilai yang Hidup

Untuk menyiasati ketidaklengkapan dan/atau ketidakjelasan sumber-sumber hukum tertulis, hakim diamanatkan untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini memantau seberapa jauh hakim-hakim telah menjalankan amanat ini, khususnya tatkala mereka harus melakukan “penemuan hukum” dalam menangani perkara-perkara hukum yang kompleks.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa 42,50% (pidana) dan 41,94% (perdata) dari putusan-putusan di tingkat pengadilan tinggi sudah melakukannya. Pada jenjang pengadilan tingkat pertama, angkanya jauh lebih tinggi, yaitu 67,50% untuk perkara pidana, tetapi sayangnya, terindikasi menurun untuk putusan-putusan perkara perdata, yakni sekitar 30,65%. Namun, harus diakui bahwa para peneliti juga tampak menemui kesulitan untuk dapat langsung mengidentifikasi ada tidaknya upaya penggalian nilai-nilai ini dalam suatu perkara (khususnya pada perkara perdata), sehingga persentase “tidak teridentifikasi” juga cukup tinggi.

Secara kualitatif, kecenderungan di atas dapat diindikasikan terkait faktor-faktor sebagai berikut:

1. Beberapa putusan yang bersinggungan dengan nilai-nilai yang dinamis, seperti kasus aborsi (kapan awal kehidupan) atau filosofi pemidanaan yang tepat (untuk pelaku tindak pidana anak dan pemakai narkoba), belum didekati dengan

menengok ke nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hakim masih condong memberi makna mengikuti bunyi undang-undang semata.

2. Faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan yang dicantumkan sebelum penjatuhan amar putusan, kerap tidak dilandasi oleh semangat untuk berpihak kepada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan filosofi pemidanaan yang tepat. Sebagai contoh, untuk perkara-perkara yang pelakunya dicap sebagai musuh bersama (*public enemy*), seperti koruptor, faktor yang meringankan justru kerap lebih ditonjolkan.

Aspek Profesionalisme Hakim

Berangkat dari indikator-indikator yang dikemukakan di atas, secara umum penelitian ini menunjukkan penilaian atas profesionalisme hakim dalam penanganan perkara pidana pada pengadilan tingkat banding cukup baik (67,50%) dan pada perkara perdata lebih baik lagi (75,81%). Pada pengadilan tingkat pertama, profesionalisme hakim dinilai sedikit lebih rendah, yaitu 50% (pidana) dan 53,23% (perdata). Apabila fokus pada penelitian kali ini lebih ditujukan kepada profil para hakim pengadilan tinggi yang dijadikan subjek penelitian, maka lebih dari separuh para hakim tinggi tersebut dipandang telah menjalani tugas pokoknya secara cukup profesional (dalam konteks penjatuhan putusan perkara-perkara terkait).

B. Simpulan

Dengan mengacu pada rumusan masalah sebagaimana dicantumkan dalam bab pertama laporan penelitian ini, maka dapat disampaikan sebuah simpulan yang secara garis besar menjawab pokok-pokok pertanyaan yang diajukan.

1. Dari aspek prosedur hukum acara, sebagian besar putusan yang dijadikan objek kajian telah cukup mematuhi.
2. Dari aspek hukum material, putusan-putusan masih belum cukup memadai menelaah sumber-sumber hukum yang tersaji, di luar yang disodorkan para pihak. Unsur-unsur yang didakwakan/digugat akan lebih terelaborasi apabila sumber-sumber hukum ini lebih diperkaya dan para hakimnya sendiri termotivasi untuk memperkaya kajian-kajian sumber-sumber tadi di dalam putusan mereka.
3. Penalaran hukum yang logis (runtut dan sistematis) memang diperlihatkan oleh sebagian putusan yang dijadikan objek kajian dalam penelitian ini, tetapi sebagian lagi tetap mengandung kelemahan yang cukup signifikan.
4. Sekalipun telah dilakukan untuk beberapa kasus, para hakim ternyata belum optimal melakukan penggalian terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, khususnya untuk perkara-perkara yang membutuhkan terobosan makna melalui penemuan hukum.
5. Terlepas dari segala kelemahan dan catatan yang telah diberikan, mayoritas dari para hakim yang putusan-putusannya dijadikan obyek kajian dalam penelitian ini dapat dipandang cukup profesional dalam mengemban tugas-tugas mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Blumberg, Abraham S. *Criminal Justice*. Toronto: Burns and Mac Eachem Ltd., 1970.
- Chambliss, William J. dan Robert B Seidman, *Order and Power, Reading. Mass.*; Addison-Westley & Sons, 1974.
- Holmes, Oliver W. *The Common Law*. Boston: Little Brown, 1963.
- Marke, Julius J. *The Holmes Reader*. New York: Oceana's Docket Books, 1955.
- Menski, Werner. *Comparative Law in Global Context: the Legal system of Asia and Africa*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Pizzi, William T. *Trials Without Truth*. New York: New York University Press, 1999.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Prrogresif*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Sampford, Charles. *The Disorder of Law: A Critique Legal Theorie*. Oxford: Basil Blackwell, 1989.
- Tamanaha, Brian Z. *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford: Oxford University Press, 2006.

Lampiran

Lampiran 1

Tabel III: Daftar Para Hakim Tinggi yang Putusannya Dianalisis

Jejaring: Universitas Muhammadiyah Malang

| No | Nama Hakim | Riwayat Pekerjaan | |
|----|------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | HESMU PURWANTO, SH, MH | 01-03-81 | CP CH PN KUPANG |
| | | 01-09-82 | PNS PN KUPANG |
| | | 28-09-83 | HK PN NEGARA |
| | | 18-06-90 | HK PN BANGKALAN |
| | | 28-07-97 | HK PN DENPASAR |
| | | 04-12-00 | HK PN JAKARTA SELATAN |
| | | 02-01-03 | WKPN GRESIK |
| | | 01-06-05 | KPN GRESIK |
| | | 26-09-06 | WKPN JAKARTA BARAT |
| | | 08-08-08 | HT PT PALEMBANG |
| | | 04-05-10 | HT PT SURABAYA |

| | | | |
|---|----------------------------------|----------|-----------------------|
| 2 | H. WAHJONO, SH, M. Hum | 01-03-84 | CP CH PN MALANG |
| | | 01-10-85 | PNS PN MALANG |
| | | 12-04-86 | HK PN RAHA |
| | | 28-11-90 | HK PN BANTHAENG |
| | | 10-07-93 | HK PN KAB MADIUN |
| | | 23-12-98 | HK PN SAMPANG |
| | | 18-09-01 | WKPN SAMPANG |
| | | 27-02-02 | KPN PASURUAN |
| | | 14-06-05 | HK PN JAKARTA SELATAN |
| | | 30-01-08 | HT PT SAMARINDA |
| | | 02-08-10 | HT PT SURABAYA |
| 3 | NY. AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH | 01-12-67 | CP PN AMBON |
| | | 01-06-71 | PNS PN AMBON |
| | | 25-02-86 | HK PN BULUKUMBA |
| | | 06-03-89 | HK PN SUNGGUMINASA |
| | | 12-06-95 | HK PN MAROS |
| | | 26-11-98 | HK PN SIDOARJO |
| | | 11-08-04 | HT PT KUPANG |
| | | 20-08-07 | HT PT MATARAM |
| | | 15-09-09 | HT PT SURABAYA |

Komisi Yudisial RI

| | | | |
|---|----------------------------------|----------|------------------|
| 4 | MADE RAWA ARYAWAN, SH., M.Hum | 01-12-79 | CP CH PN KUPANG |
| | | 01-11-81 | PNS PN KUPANG |
| | | 13-11-82 | HK PN MAUMERE |
| | | 21-12-88 | HK PN TRENGGALEK |
| | | 01-11-93 | HK PN BLORA |
| | | 16-05-97 | WKPN MUARA TEWEH |
| | | 14-07-98 | KPN MUARA TEWEH |
| | | 12-07-99 | KPN MOJOKERTO |
| | | 27-02-02 | WKPN SIDOARJO |
| | | 04-12-03 | KPN BALIKPAPAN |
| | | 18-04-06 | HT PT AMBON |
| | | 24-09-08 | HT PT SURABAYA |
| | | 27-08-10 | WKPT MANADO |
| | | | |
| 5 | Drs. H. Jaliansyah, S.H., M.H, | | HT PA SAMARINDA |
| | | | HT PA SURABAYA |

Jejaring: Universitas Jambi

| No | Nama Hakim | Riwayat Pekerjaan | |
|----|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | PARTOMUAN SIHOMBING, SH, MH | 01-03-85 | CP PT PONTIANAK |
| | | 01-05-85 | PNS PT PONTIANAK |
| | | 25-03-85 | CH PN PONTIANAK |
| | | 08-12-86 | HK PN BANGKINANG |
| | | 18-12-90 | HK PN PANGKALPINANG |
| | | 16-08-95 | HK PN LUWUK |
| | | 18-12-97 | HK PN INDRAMAYU |
| | | 25-10-99 | WKPN KUNINGAN |
| | | 07-12-00 | KPN KUNINGAN |
| | | 07-07-03 | HK PN JAKARTA UTARA |
| | | 19-04-07 | KPN PALANGKARAYA |
| | | 07-08-08 | HT PT JAMBI |
| 2 | DHARMA EDWARD DAMANIK, SH, MH | 10-07-82 | CP PN MEDAN |
| | | 26-12-83 | PNS PN MEDAN |
| | | 25-03-85 | CH PN BINJAI |
| | | 04-07-87 | HK PN SIDIKALANG |
| | | 12-01-93 | HK PN KISARAN |
| | | 05-05-99 | HK PN BINJAI |
| | | 30-03-00 | WKPN STABAT |
| | | 21-03-02 | KPN SINTANG |
| | | 06-06-05 | HK PN SURABAYA |
| | | 07-08-08 | HT PT PALANGKARAYA |
| | | 18-05-11 | HT PT JAMBI |

Komisi Yudisial RI

| | | | |
|---|---------------------|----------|-------------------------|
| 3 | WAHIDIN, SH, MH | 01-01-78 | CP LP PEKANBARU |
| | | 01-04-78 | PNS LP PEKANBARU |
| | | 07-05-85 | KANWIL DEPKEH PEKANBARU |
| | | 02-12-86 | CH PN PEKANBARU |
| | | 27-02-91 | HK PN BENGKALIS |
| | | 23-12-96 | HK PN BENGKULU |
| | | 27-09-99 | WKPN PAINAN |
| | | 05-01-04 | KPN SAWAHLUNTO |
| | | 26-07-07 | KPN TARAkan |
| | | 07-08-08 | HT PT MALUKU UTARA |
| | | 18-05-11 | HT PT JAMBI |
| | | | |
| 4 | BENAR KARO-KARO, SH | 01-03-85 | CP CH PN CIREBON |
| | | 01-05-86 | PNS PN CIREBON |
| | | 04-07-87 | HK PN TANJUNG |
| | | 30-12-92 | HK PN KISARAN |
| | | 04-12-87 | HK PN BOYOLALI |
| | | 27-09-99 | WKPN BAJAWA |
| | | 14-12-01 | KPN RUTENG |
| | | 01-03-04 | HK PN TANGERANG |
| | | 07-08-08 | HT PT KENDARI |
| | | 26-09-11 | HT PT JAMBI |
| | | | |

| | | | |
|---|--------------------------|----------|---------------------------|
| 5 | EDDY PANGARIBUAN, SH, MH | 01-03-84 | CP PN PEKALONGAN |
| | | 01-10-85 | PNS PN PEKALONGAN |
| | | 01-03-86 | HK PN MUARATEWEH |
| | | 29-12-89 | HK PN SAMPIT |
| | | 21-12-91 | HK PN PEMATANG SIANTAR |
| | | 21-10-97 | HK PN BALE BANDUNG |
| | | 05-01-04 | WKPN SALATIGA |
| | | 17-01-07 | WKPN INDRAMAYU |
| | | 07-08-08 | HT PT KUPANG |
| | | 26-09-11 | HT PT JAMBI |

Jejaring: Universitas Pasundan

| No | Nama Hakim | Riwayat Pekerjaan | |
|----|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | R. HENRY SILAEN, SH, MH | 01-03-80 | CP/CH PN PALEMBANG |
| | | 01-07-81 | PNS PN PALEMBANG |
| | | 13-11-82 | HK PN SUNGAI LIAT |
| | | 16-03-89 | HK PN METRO |
| | | 29-01-94 | HK PN CIANJUR |
| | | 31-12-97 | WK PN TASIKMALAYA |
| | | 04-02-99 | KPN KUNINGAN |
| | | 04-05-00 | HK PN JAKARTA UTARA |
| | | 08-07-03 | WKPN KUPANG |
| | | 23-01-04 | KPN KUPANG |
| | | 01-07-05 | HT PT SAMARINDA |
| | | 07-08-08 | HT PT PADANG |
| | | 04-05-09 | HT PT BANDUNG |

Komisi Yudisial RI

| | | | |
|---|---------------------------------------|----------|-----------------------|
| 2 | SOEBAGYO WIRO SOEMARTO, SH., M.Hum | 01-03-81 | CP/CH PN PONTIANAK |
| | | 01-11-82 | PNS PN PONTIANAK |
| | | 10-01-84 | HK PN SUMENEP |
| | | 19-06-90 | HK PN BANGIL |
| | | 03-10-95 | HK PN MOJOKERTO |
| | | 15-07-98 | WK PN MOJOKERTO |
| | | 25-10-99 | KPN BANGIL |
| | | 08-07-03 | KPN JEMBER |
| | | 01-07-05 | HT PT DENPASAR |
| | | 02-11-07 | HT PT SURABAYA |
| | | 04-05-10 | HT PT BANDUNG |
| 3 | H. ARIANSYAH B. DALI P, SH, MH | 01-09-75 | CP PN TANJUNG |
| | | 01-07-77 | PNS PN TANJUNG |
| | | 26-02-79 | PT BANJARMASIN |
| | | 07-01-81 | CH PN BANJARMASIN |
| | | 18-04-83 | HK PN KOTABARU |
| | | 12-10-87 | HK PN SAMPIT |
| | | 12-01-93 | HK PN BALIKPAPAN |
| | | 18-12-97 | WKPN KOTABARU |
| | | 22-12-98 | KPN AMUNTAI |
| | | 09-07-03 | HK PN JAKARTA SELATAN |
| | | 13-04-06 | WKPN JAKARTA SELATAN |
| | | 15-06-07 | KPN BEKASI |
| | | 07-08-08 | HT PT MEDAN |
| | | 02-08-10 | HT PT BANDUNG |

| | | | |
|---|-----------------------------|----------|---------------------------|
| 4 | ROBINSON TARIGAN, SH, MH | 01-03-81 | CP PUSDIKLAT DEPKEH |
| | | 01-04-82 | PNS PUSDIKLAT DEPKEH |
| | | 25-02-82 | CH PN JAKARTA SELATAN |
| | | 01-08-84 | HK PN PUTUSSIBAU |
| | | 15-06-88 | HK PN MEMPAWAH |
| | | 03-02-93 | HK PN PEMATANG SIANTAR |
| | | 21-12-97 | WKPN RENGAT |
| | | 15-07-98 | KPN RENGAT |
| | | 11-06-01 | KPN MEMPAWAH |
| | | 29-01-04 | HK PN JAKARTA BARAT |
| | | 30-06-06 | WKPN MEDAN |
| | | 13-09-07 | KPN JAKARTA TIMUR |
| | | 03-06-09 | HT PT MAKASAR |
| | | 07-02-11 | HT PT BANDUNG |
| 5 | NY. ANDRIANI NURDIN, SH, MH | 01-03-82 | CP CH PN CIREBON |
| | | 01-02-84 | PNSPN CIREBON |
| | | 22-12-84 | HK PN PURWAKARTA |
| | | 07-03-89 | HK PN WONOGIRI |
| | | 15-01-91 | HK PN SUMBER |
| | | 23-10-93 | HK YUST. MARI |
| | | 30-06-00 | WKPN CIBINONG |
| | | 11-07-02 | HK PN JAKARTA PUSAT |
| | | 23-01-04 | KPN BOGOR |
| | | 01-11-05 | WKPN JAKARTA PUSAT |
| | | 13-09-07 | KPN JAKARTA PUSAT |
| | | 03-06-09 | HT PT PALEMBANG |
| | | 07-02-11 | HT PT BANDUNG |

Jejaring: Universitas Pancasila

| No | Nama Hakim | Riwayat Pekerjaan | |
|----|---|-------------------|---------------------------|
| 1 | Prof. DR. JATINAR NABABAN, SH, M.Hum | 01-12-67 | CP PN BATUSANGKAR |
| | | 01-01-68 | PNS PN BATUSANGKAR |
| | | 01-04-80 | HK PN PADANG |
| | | 24-10-83 | HK PN KUTACANE |
| | | 15-07-87 | HK PN KISARAN |
| | | 05-09-91 | HK. YUST.MEDAN |
| | | 01-12-94 | HK PN PEMATANG SIANTAR |
| | | 16-09-98 | WKPN GN. SITOLI |
| | | 31-01-00 | HK PN MEDAN |
| | | 02-01-03 | HT PT MANADO |
| | | 20-04-06 | HT PT PALEMBANG |
| | | 24-09-08 | HT PT MEDAN |
| | | 22-02-10 | HT PT BANTEN |
| | | | |
| 2 | H. WIDIONO, SH, MBA, MH | 01-03-84 | CP CH PN SERANG |
| | | 01-07-85 | PNS PN SERANG |
| | | 31-01-86 | HK PN SOLOK |
| | | 26-12-91 | HK PN CIANJUR |
| | | 09-07-97 | HK PN DENPASAR |
| | | 07-11-00 | WKPN REMBANG |
| | | 02-01-03 | KPN KEBUMEN |
| | | 07-06-05 | WKPN KARAWANG |
| | | 18-09-06 | KPN LUBUK PAKAM |
| | | 07-08-08 | HT PT JAMBI |
| | | 18-05-11 | HT PT BANTEN |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|----------|-------------------------|
| 3 | DR. MARNI EMMY MUSTAFA, SH, MH | 01-12-67 | CP PN PALEMBANG |
| | | 01-06-70 | PNS PN PALEMBANG |
| | | 16-07-79 | CH PN PALEMBANG |
| | | 30-01-81 | HK PN SEKAYU |
| | | 03-09-86 | HK PN SERANG |
| | | 06-11-92 | HK PN TANGERANG |
| | | 03-04-97 | WKPN CIANJUR |
| | | 16-07-98 | HK PN JAKARTA PUSAT |
| | | 27-02-02 | WKPN JAKARTA UTARA |
| | | 25-03-03 | KPN BANDUNG |
| | | 13-04-06 | HT PT TANJUNG KARANG |
| | | 02-11-07 | HT PT JAKARTA |
| | | 05-11-08 | WKPT PALEMBANG |
| | | 18-03-09 | WKPT BANTEN |
| 02-03-10 | KPT BANJARMASIN | | |

Komisi Yudisial RI

| | | | |
|----------|-----------------------|----------|----------------------|
| 4 | ZHRUL RABAIN, SH, MH | 01-03-83 | CP CH PN BUKITINGGI |
| | | 01-10-84 | PNS PN BUKITINGGI |
| | | 20-09-85 | HK PN TAKENGON |
| | | 18-12-90 | HK PN LUBUK SIKAPING |
| | | 22-05-96 | HK PN JAMBI |
| | | 23-02-99 | WKPN MUARA BULIAN |
| | | 25-10-99 | KPN BANGKO |
| | | 04-12-03 | WKPN PEKANBARU |
| | | 28-11-05 | KPN PEKANBARU |
| | | 13-09-07 | KPN JAKARTA SELATAN |
| | | 03-06-09 | HT PT MAKASAR |
| | | 07-02-11 | HT PT JAKARTA |
| | | | |
| 5 | CHAIRIL ANWAR, SH, MH | 01-03-80 | CP CH PN KUPANG |
| | | 01-09-81 | PNS PN KUPANG |
| | | 13-11-82 | HK PN LARANTUKA |
| | | 21-06-88 | HK PN NEGARA |
| | | 01-11-93 | HK PN BANYUWANGI |
| | | 16-09-97 | WKPN SAMPANG |
| | | 31-08-98 | WKPN GRESIK |
| | | 18-08-99 | KPN TEMANGGUNG |
| | | 26-11-01 | WKPN JAMBI |
| | | 16-09-03 | KPN JAMBI |
| | | 12-10-06 | HT PT BANJARMASIN |
| | | 28-04-09 | HT PT SURABAYA |
| 18-05-11 | HT PT JAKARTA | | |

Jejaring: Universitas Lambung Mangkurat

| No | Nama Hakim | Riwayat Pekerjaan | |
|----|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | YAKUP GINTING, SH., CN., MKn. | 01-06-77 | CP DEPKES BANDUNG |
| | | 25-05-78 | PNS DEPKES BANDUNG |
| | | 10-02-86 | CH PN BANDUNG |
| | | 02-09-89 | HK PN SIMALUNGUN |
| | | 21-12-94 | HK PN RUTENG (BATAL) |
| | | 10-04-95 | HK PN GN. SITOLI |
| | | 29-12-97 | HK PN LUBUK PAKAM |
| | | 07-01-02 | WKPN ATAMBUA |
| | | 04-12-03 | KPN ATAMBUA |
| | | 27-06-05 | HK PN SURABAYA |
| | | 07-08-08 | HT PT BANJARMASIN |
| 2 | DR. HJ. SRI SUTATIEK, SH, M.Hum. | 01-03-82 | CP CH PN SURABAYA |
| | | 01-02-84 | PNS PN SURABAYA |
| | | 01-06-85 | HK PN SUMENEP |
| | | 09-08-89 | HK PN JOMBANG |
| | | 25-06-97 | HK PN SIDOARJO |
| | | 25-10-99 | WKPN JOMBANG |
| | | 28-03-00 | KPN JOMBANG |
| | | 01-03-04 | HK PN SEMARANG |
| | | 20-04-07 | HK PN JAKARTA TIMUR |
| | | 07-08-08 | HT PT MATARAM |
| | | 15-09-09 | HT PT BANJARMASIN |

Komisi Yudisial RI

| | | | |
|---|-----------------------------|----------|--------------------|
| 3 | GATOT SUPRAMONO, SH, M. Hum | 01-03-83 | CP CH PN CIREBON |
| | | 01-08-84 | PNS PN CIREBON |
| | | 25-01-86 | HK PN SELAYAR |
| | | 29-12-89 | HK PN SUNGGUMINASA |
| | | 12-06-95 | HK PN TEGAL |
| | | 13-09-01 | HK PN TANGERANG |
| | | 28-11-05 | WKPN BANGIL |
| | | 12-10-06 | KPN BANGIL |
| | | 02-08-07 | HT PT PEKANBARU |
| | | 25-01-10 | HT PT BANJARMASIN |
| 4 | ESTER SIREGAR, SH, MH | 01-03-83 | CP CH PN MEDAN |
| | | 01-09-84 | PNS PN MEDAN |
| | | 19-09-85 | HK PN RENGAT |
| | | 16-10-86 | HK PN MARTAPURA |
| | | 21-12-88 | HK PN GAMPENGREJO |
| | | 01-11-93 | HK PN TULUNGAGUNG |
| | | 05-10-98 | HK PN SIDOARJO |
| | | 02-11-07 | HT PT PONTIANAK |
| | | 25-01-10 | HT PT BANJARMASIN |

| | | | |
|---|------------------------|----------|-------------------|
| 5 | JULIANA WULLUR, SH, MH | 01-03-82 | CP PN SIDOARJO |
| | | 01-12-84 | PNS PN SIDOARJO |
| | | 23-07-85 | HK PN KOTAMOBAGU |
| | | 07-03-91 | HKPN MENADO |
| | | 18-06-97 | HK PN BITUNG |
| | | 30-03-00 | HK PN BOGOR |
| | | 21-08-01 | WKPN MANADO |
| | | 12-11-03 | KPN MANADO |
| | | 13-04-06 | HT PT BANJARMASIN |
| | | 24-09-08 | HT PT SURABAYA |

Jejaring: Universitas Syiah Kuala

| No | Nama Hakim | Riwayat Pekerjaan | |
|----|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | ALJAMAN SUTOPO, SH | 01-05-66 | CP PN TANGERANG |
| | | 01-11-66 | PNS PN TANGERANG |
| | | 09-11-81 | HK PN PURBALINGGA |
| | | 15-06-88 | HK PN SIMALUNGUN |
| | | 21-10-93 | HK PN SERANG |
| | | 12-07-95 | WK PN WONOSOBO |
| | | 16-05-97 | KPN RANGKASBITUNG |
| | | 26-09-00 | WK PN KARAWANG |
| | | 08-05-03 | KPN BENGKULU |
| | | 17-02-05 | HT PT BANGKA BELITUNG |
| | | 07-08-08 | HT PT PALEMBANG |
| | | 19-02-09 | WKPT BANDA ACEH |

Komisi Yudisial RI

| | | | |
|---|---------------------------|----------|-----------------------|
| 2 | JOHNY SANTOSO, SH, MH | 01-04-84 | CH PN JEMBER |
| | | 01-10-85 | PNS PN JEMBER |
| | | 08-12-86 | HK PN ATAMBUA |
| | | 08-08-89 | HK PN GIANYAR |
| | | 30-11-94 | HK PN SUKOHARJO |
| | | 09-08-99 | HK PN BANJARNEGARA |
| | | 25-09-01 | WKPN WONOSOBO |
| | | 02-01-04 | KPN BATANG |
| | | 07-07-06 | HK PN BANDUNG |
| | | 04-05-09 | HT PT BANDA ACEH |
| | | | |
| 3 | EDDY JOENARSO, SH., M.Hum | 01-03-84 | CP CH PN MADIUN |
| | | 01-01-86 | PNS PN MADIUN |
| | | 26-03-87 | HK PN WAINGAPU |
| | | 19-01-93 | HK PN TUBAN |
| | | 25-10-99 | HK PN BALIKPAPAN |
| | | 02-05-02 | KPN WAINGAPU |
| | | 17-06-04 | HK PN JAKARTA SELATAN |
| | | 02-11-07 | KPN METRO |
| | | 29-07-09 | HT PT BANDA ACEH |
| | | | |

| | | | |
|---|------------------|----------|-----------------------|
| 4 | EFFENDI, SH, MH | 01-03-84 | CP CH PN PADANG |
| | | 01-06-85 | PNS PN PADANG |
| | | 30-01-86 | HK PN TARUTUNG |
| | | 14-11-90 | HK PN SOLOK |
| | | 02-01-93 | HK PN KOTOBARU |
| | | 31-07-98 | HK PN PADANG |
| | | 30-06-00 | HK PN JAKARTA SELATAN |
| | | 14-09-04 | HK PN PALU |
| | | 26-07-07 | WKPN BULUKUMBA |
| | | 07-08-08 | HT PT BANDA ACEH |
| | | 18-05-11 | HT PT PADANG |
| | | | |
| 5 | AMRIDDIN, SH, MH | 01-01-86 | CH PN JAKSEL |
| | | 01-03-87 | PNS PN JAKSEL |
| | | 28-07-89 | HK PN SUNGAI PENUH |
| | | 19-01-95 | HK PN TN. GROGOT |
| | | 31-07-98 | HK PN MAJALENGKA |
| | | 23-02-00 | HK YUST MARI |
| | | 20-04-06 | WKPN TULUNG AGUNG |
| | | 26-07-07 | KPN TULUNG AGUNG |
| | | 07-08-08 | HT PT BANDA ACEH |
| | | 18-05-11 | HT PT PADANG |

Jejaring: Universitas Tanjung Pura

| No | Nama Hakim | Riwayat Pekerjaan | |
|----|--|-------------------|----------------------------|
| 1 | A. FADLOL TAMAM, SH.,M.Hum | 01-03-85 | CP CH PN MALANG |
| | | 01-08-86 | PNS PN MALANG |
| | | 18-09-87 | HK PN TANJUNG |
| | | 30-12-92 | HK PN SAMPIT |
| | | 29-12-97 | HK PN SLEMAN |
| | | 02-05-01 | HK PN BANDUNG |
| | | 11-08-04 | WKPN WAINGAPU |
| | | 20-04-06 | KPN WAINGAPU |
| | | 15-06-07 | KPN KEPANJEN |
| | | 15-09-09 | HT PT PONTIANAK |
| 2 | TORANG HALOMOAN TAMPUBOLON, SH., MH | 01-03-82 | CP PUSDIKLAT DEP.KEH. |
| | | 01-07-83 | PNS PUSDIKLAT DEP. KEH. |
| | | 14-03-84 | CH PN JAKARTA SELATAN |
| | | 14-11-90 | HK PN SINGKAWANG |
| | | 11-06-96 | HK PN BLORA |
| | | 28-08-98 | WKPN BANYUMAS |
| | | 28-02-00 | KPN SAMPIT |
| | | 14-11-01 | HK PN JAKARTA SELATAN |
| | | 10-11-03 | HK PN PALEMBANG |
| | | 02-11-07 | HK PN SEMARANG |
| | | 22-02-10 | HT PT PONTIANAK |

| | | | |
|---|--------------------|----------|--------------------|
| 3 | SUMANTO, SH, MH | 01-02-83 | CP CH PN SINGARAJA |
| | | 01-10-84 | PNS PN SINGARAJA |
| | | 02-01-86 | HK PN LABUHA |
| | | 28-12-89 | HK PN MAROS |
| | | 29-11-94 | HK PN BATANG |
| | | 07-02-00 | WKPN BATANG |
| | | 09-04-01 | KPN WATES |
| | | 27-02-02 | KPN UNGARAN |
| | | 08-04-05 | KPN SLEMAN |
| | | 26-07-07 | KPN SAMARINDA |
| | | 03-06-09 | HT PT PONTIANAK |
| 4 | DJUMAIN, SH, M.Hum | 01-04-84 | CP CH PN PASURUAN |
| | | 01-10-85 | PNS PN PASURUAN |
| | | 24-06-86 | HK PN MAMUJU |
| | | 28-11-90 | HK PN SAMPANG |
| | | 04-12-97 | HK PN LAMONGAN |
| | | 15-11-01 | WKPN BOJONEGORO |
| | | 25-11-02 | KPN BOJONEGORO |
| | | 14-06-05 | HK PN MEDAN |
| | | 26-11-08 | WKPN DENPASAR |
| | | 20-07-10 | HT PT PONTIANAK |

Komisi Yudisial RI

| | | | |
|---|--------------------|----------|---------------------|
| 5 | NECODEMUS, SH., MH | 01-03-85 | CP/CH PN PONTIANAK |
| | | 01-09-86 | PNS PN PONTIANAK |
| | | 04-07-87 | HK PN MARABAHAN |
| | | 11-09-91 | HK PN MUNGKID |
| | | 20-10-97 | HK PN SALATIGA |
| | | 30-06-00 | HK PN JAKARTA UTARA |
| | | 14-09-04 | WKPN PUTUSIBAU |
| | | 06-06-05 | KPN PUTUSSIBAU |
| | | 19-04-07 | KPN KALIANDA |
| | | 26-11-08 | HT PT KUPANG |
| | | 26-09-11 | HT PT PONTIANAK |

Jejaring: Universitas Sumatera Utara

| No | Nama Hakim | Riwayat Pekerjaan | |
|----------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Dr. MUH. DAMING SUNUSI, SH, M.Hum | 01-02-78 | CP/BTW UJUNG PANDANG |
| | | 01-04-79 | PNS BTW UJUNG PANDANG |
| | | 06-11-82 | PT UJUNG PANDANG |
| | | 14-03-83 | CH PN UJUNG PANDANG |
| | | 01-08-84 | HK PN SINJAI |
| | | 22-11-90 | HK PANGKAJENE |
| | | 23-04-96 | WK PN MAROS |
| | | 08-10-97 | KPN BARRU |
| | | 20-04-00 | HK PN JAKARTA PUSAT |
| | | 08-07-03 | WKPN BEKASI |
| | | 01-06-05 | KPN PALEMBANG |
| | | 04-09-06 | PANMUD PERDATA MARI |
| | | 07-08-08 | HT PT SURABAYA |
| 02-03-10 | WKPT MEDAN | | |

| | | | |
|----------|---------------------|----------|-------------------------|
| 2 | NUZUARDI, SH, MH | 12-01-67 | CP PN PALEMBANG |
| | | 05-01-70 | PNS PN PALEMBANG |
| | | 26-03-85 | CH PN PALEMBANG |
| | | 26-03-87 | HK PN PADANG PANJANG |
| | | 06-01-93 | HK PN SERANG |
| | | 23-02-99 | WKPN TG. PANDAN |
| | | 25-10-99 | KPN SIBOLGA |
| | | 14-12-01 | KPN GARUT |
| | | 16-09-03 | KPN KEDIRI |
| | | 01-06-05 | KPN AMBON |
| | | 02-08-07 | HT PT PADANG |
| | | 25-01-10 | HT PT MEDAN |
| 3 | H. MAENONG, SH., MH | 01-04-71 | CP PN UJUNG PANDANG |
| | | 01-07-72 | PNS PN UJUNG PANDANG |
| | | 21-02-84 | CH PN UJUNG PANDANG |
| | | 19-06-86 | HK PN POSO |
| | | 27-11-91 | HK PN TERNATE |
| | | 04-06-97 | HK PN BANGIL |
| | | 25-10-99 | HK PN JEMBER |
| | | 26-09-00 | WKPN RANGKASBITUNG |
| | | 02-01-04 | KPN RANGKASBITUNG |
| | | 01-06-05 | WKPN AMBON |
| | | 17-01-07 | KPN SERANG |
| | | 08-08-08 | HT PT JAMBI |
| 22-02-10 | HT PT MEDAN | | |

Komisi Yudisial RI

| | | | |
|---|---|----------|-------------------|
| 4 | UNTUNG WIDARTO, SH, MH | 01-03-84 | CP CH PN SEMARANG |
| | | 01-09-85 | PNS PN SEMARANG |
| | | 12-04-86 | HK PN KEFAMENANU |
| | | 16-11-90 | HK PN BANTUL |
| | | 17-05-96 | HK PN SUMENEP |
| | | 05-04-99 | HK PN SURAKARTA |
| | | 05-02-01 | WKPN SUKOHARJO |
| | | 03-12-03 | KPN SLAWI |
| | | 18-09-06 | WKPN MADIUN |
| | | 30-01-08 | HT PT JAYAPURA |
| | | 04-05-10 | HT PT MEDAN |
| 5 | OHAN BURHANUDDIN PURWAWANGGA, SH, MH | 01-03-83 | CP PN CIREBON |
| | | 01-08-84 | PNS PN CIREBON |
| | | 25-01-86 | HK PN BANTHAENG |
| | | 04-03-91 | HK PN GARUT |
| | | 11-09-95 | HK PN TANGERANG |
| | | 05-04-99 | HK PN PURWOKERTO |
| | | 14-06-05 | WKPN BANGIL |
| | | 28-11-05 | KPN BANGIL |
| | | 12-10-06 | KPN MAROS |
| | | 20-08-07 | WKPN MAKASSAR |
| | | 07-08-08 | HT PT SAMARINDA |
| | | 04-05-10 | HT PT MEDAN |

Jejaring: Universitas Islam Indonesia

| No | Nama Hakim | Riwayat Pekerjaan | |
|----|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | HARDJONO C, SH., MH | 01-03-80 | CH PN JAYAPURA |
| | | 01-01-82 | PNS PN JAYAPURA |
| | | 18-04-83 | HK PN WAMENA |
| | | 03-07-85 | HK PN BARRU |
| | | 04-12-88 | HK PN TULUNG AGUNG |
| | | 01-11-93 | HK PN BANYUWANGI |
| | | 20-05-97 | WKPN KARANGANYAR |
| | | 16-07-98 | KPN TANJUNG BALAI |
| | | 07-06-01 | KPN CIREBON |
| | | 27-02-04 | HK PN PALEMBANG |
| | | 13-04-06 | HT PT MANADO |
| | | 24-09-08 | HT PT YOGYAKARTA |
| 2 | MARIA ANNA SAMIYATI, SH, MH | 01-04-79 | CP PT SEMARANG |
| | | 01-06-80 | PNS PT SEMARANG |
| | | 01-05-85 | HK PN NEGARA |
| | | 08-08-89 | HK PN BATANG |
| | | 19-01-95 | HK PN SALATIGA |
| | | 09-12-98 | HK PN UNGARAN |
| | | 29-03-00 | HK PN KUDUS |
| | | 08-02-06 | HK PN MAKASSAR |
| | | 15-06-07 | HT PT MATARAM |
| | | 15-09-09 | HT PT YOGYAKARTA |

Komisi Yudisial RI

| | | | |
|---|-------------------------------|----------|-----------------------|
| 3 | DR (HC) SATRIA U.S. GUMAY, SH | 01-03-76 | CP DIT PBPU |
| | | 01-04-77 | PNS DIT PBPU |
| | | 19-01-81 | CH PN JAKARTA SELATAN |
| | | 14-04-84 | HK PN JANTHO |
| | | 19-06-90 | HK PN LAHAT |
| | | 22-04-97 | WKPN SOLOK |
| | | 31-12-97 | KPN PAYAKUMBUH |
| | | 28-07-99 | HK PN TANGERANG |
| | | 03-10-01 | KPN SRAGEN |
| | | 04-12-03 | WKPN JAMBI |
| | | 12-10-06 | HT PT AMBON |
| | | 07-08-08 | HT PT MAKASAR |
| | | 25-02-10 | HT PT YOGYAKARTA |
| 4 | H. HAMDI, SH., M.Hum | 04-06-84 | CP CH PN KLATEN |
| | | 04-08-85 | PNS PN KLATEN |
| | | 11-04-86 | HK PN ENREKANG |
| | | 21-12-91 | HK PN SUNGAI LIAT |
| | | 10-04-97 | HK PN PURWOREJO |
| | | 25-02-00 | WKPN BANGKINANG |
| | | 28-02-01 | KPN BANGKINANG |
| | | 09-07-03 | HK PN JAKARTA PUSAT |
| | | 13-04-06 | KPN MAGELANG |
| | | 21-05-08 | HT PT BANJARMASIN |
| | | 04-05-10 | HT PT YOGYAKARTA |

| | | | |
|---|------------------------------------|----------|-----------------------|
| 5 | YOHANNES ETHER BINTI, SH, M.Hum | 01-03-82 | CP CH PN BANJARMASIN |
| | | 01-03-84 | PNS PN BANJARMASIN |
| | | 14-04-85 | HK PN AMUNTAI |
| | | 16-06-90 | HK PN LAMONGAN |
| | | 13-05-97 | HK PN JEMBER |
| | | 24-02-99 | WKPN TUBAN |
| | | 05-02-01 | KPN PROBOLINGGO |
| | | 07-07-03 | HK PN JAKARTA SELATAN |
| | | 17-01-07 | HT PT BANJARMASIN |
| | | 28-04-09 | HT PT MEDAN |
| | | 27-08-10 | WKPT PALANGKARAYA |

Jejaring: Universitas Jenderal Soedirman

| No | Nama Hakim | Riwayat Pekerjaan | |
|----|----------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH | 01-03-83 | CP CH PN KUPANG |
| | | 01-10-84 | PNS PN KUPANG |
| | | 19-09-85 | HK PN KALABAHI |
| | | 27-12-89 | HK PN SUMBAWA BESAR |
| | | 03-04-95 | WKPN TUAL |
| | | 31-07-98 | HK PN MADIUN |
| | | 30-06-00 | HK PN JAKARTA TIMUR |
| | | 15-09-04 | KPN KUALA KAPUAS |
| | | 26-09-06 | HT PT GORONTALO |
| | | 07-08-08 | HT PT SEMARANG |

Komisi Yudisial RI

| | | | |
|---|---------------------------------|----------|--------------------|
| 2 | NY. Dr. HERU IRIANI, SH., M.Hum | 01-03-82 | CP CH PN CIREBON |
| | | 01-02-83 | PNS PN CIREBON |
| | | 22-12-84 | HK PN WONOSARI |
| | | 09-08-89 | HK PN SALATIGA |
| | | 30-01-95 | HK PN BOYOLALI |
| | | 27-09-99 | WKPN SALATIGA |
| | | 07-07-03 | KPN WONOSARI |
| | | 01-06-05 | WKPN SUKABUMI |
| | | 31-01-07 | HT PT JAMBI |
| | | 24-09-08 | HT PT SEMARANG |
| 3 | KORNEL SIANTURI, SH, M.Hum | 01-03-80 | CP PN JAMBI |
| | | 22-02-83 | PNS PN JAMBI |
| | | 04-05-84 | HK PN SUNGAI PENUH |
| | | 16-11-90 | HK PN TARUTUNG |
| | | 18-04-96 | HK PN PURWAKARTA |
| | | 29-10-96 | WKPN PURWAKARTA |
| | | 30-09-98 | KPN KAYU AGUNG |
| | | 09-08-99 | HK PN MEDAN |
| | | 28-09-01 | HK PN JAK PUS |
| | | 26-06-03 | HT PT MANADO |
| | | 20-04-06 | HT PT PALEMBANG |
| | | 24-09-08 | HT PT SEMARANG |

| | | | |
|----------|----------------------------|----------|------------------------|
| 4 | DR. SOEDARMADJI, SH, M.Hum | 01-03-82 | CP SEK JEN DEP KEH |
| | | 01-06-83 | PNS SEK JEN DEP KEH |
| | | 03-04-85 | CH PN KEDIRI |
| | | 04-07-87 | HK PN LIMBOTO |
| | | 16-01-93 | HK PN BONDOWOSO |
| | | 30-09-98 | WKPN LUMAJANG |
| | | 30-03-00 | KPN LUMAJANG |
| | | 07-01-02 | KPN KEPANJEN |
| | | 06-06-05 | HK PN JAKARTA SELATAN |
| | | 19-04-07 | WKPN SURABAYA |
| | | 04-09-08 | HT PT MANADO |
| | | 25-01-10 | HT PT SEMARANG |
| 5 | H. BACHTIAR AMS, SH | 01-02-75 | CP PN RANTAU |
| | | 01-06-76 | PNS PN RANTAU |
| | | 28-03-78 | CH PN CURUP |
| | | 24-08-82 | HK PN ARGAMAKMUR |
| | | 15-03-89 | HK PN LAHAT |
| | | 31-01-94 | HK PN TG. PINANG |
| | | 02-06-97 | WKPN PADANG SIDEMPUNAN |
| | | 28-12-98 | KPN CIAMIS |
| | | 05-02-01 | HK PN JAKARTA SELATAN |
| | | 08-07-03 | WKPN PONTIANAK |
| | | 07-06-05 | HT PT GORONTALO |
| | | 07-08-08 | HT PT MAKASAR |
| 04-05-10 | HT PT SEMARANG | | |

Jejaring: Universitas Andalas

| No | Nama Hakim | Riwayat Pekerjaan | |
|----------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | ANASROEL HAROEN, SH., MH | 01-03-70 | CP KANWIL BINA LINDUNG |
| | | 01-09-80 | PNS SUMBAR |
| | | 29-01-83 | CH PN BUKITTINGGI |
| | | 11-02-85 | HK PN TAKENGON |
| | | 20-06-90 | HK PN PAYAKUMBUH |
| | | 13-06-95 | HK PN PARIMAN |
| | | 28-10-96 | KPN RAHA |
| | | 28-07-99 | KPN LIWA |
| | | 05-02-00 | KPN BUKITTINGGI |
| | | 02-01-04 | HT PT JAYAPURA |
| | | 19-04-06 | HT PT PADANG |
| | | 19-02-09 | WKPT PADANG |
| | | 2 | NY. DESNAYETI, SH, MH |
| 01-05-81 | PNS PN PADANG PANJANG | | |
| 25-03-85 | CH PN PADANG | | |
| 04-07-87 | HK PN PADANG PANJANG | | |
| 16-11-90 | HK PN PARIAMAN | | |
| 17-05-96 | HK PN PADANG | | |
| 21-11-03 | WKPN PADANG PANJANG | | |
| 18-04-05 | KPN MUARO BUNGO | | |
| 31-01-07 | HT PT PONTIANAK | | |
| 28-04-09 | HT PT PADANG | | |

| | | | |
|---|----------------------------|----------|---------------------------|
| 3 | IRAMA CHANDRA ILJA, SH, MH | 01-03-83 | CP CH PN PADANG |
| | | 01-01-85 | PNS PN PADANG |
| | | 20-09-85 | HK PN LUBUK BASUNG |
| | | 18-12-90 | HK PN PAINAN |
| | | 07-05-96 | HK PN PARIAMAN |
| | | 04-08-98 | HK PN BUKITTINGGI |
| | | 23-04-01 | HK PN PADANG |
| | | 18-06-04 | HK PN YOGYAKARTA |
| | | 30-06-06 | WKPN BINJAI |
| | | 26-07-07 | KPN BINJAI |
| | | 07-08-08 | HT PT SAMARINDA |
| | | 04-05-10 | HT PT PADANG |
| 4 | HERMAN NURMAN, SH, MH | 01-12-83 | CP KANWIL RIAU |
| | | 01-09-85 | PNS KANWIL RIAU |
| | | 25-03-85 | CH PN PEKANBARU |
| | | 04-07-87 | HK PN LHOKSUKON |
| | | 30-12-92 | HK PN KOTOBARU |
| | | 04-12-97 | HK PN PADANG SIDEMPUAN |
| | | 30-03-00 | WKPN MUARO |
| | | 09-07-03 | KPN PARIAMAN |
| | | 26-05-05 | HK PN JAKARTA UTARA |
| | | 07-08-08 | HT PT KENDARI |
| | | 26-09-11 | HT PT PADANG |

Komisi Yudisial RI

| | | | |
|---|-----------------|----------|-----------------------|
| 5 | EFFENDI, SH, MH | 01-03-84 | CP CH PN PADANG |
| | | 01-06-85 | PNS PN PADANG |
| | | 30-01-86 | HK PN TARUTUNG |
| | | 14-11-90 | HK PN SOLOK |
| | | 02-01-93 | HK PN KOTOBARU |
| | | 31-07-98 | HK PN PADANG |
| | | 30-06-00 | HK PN JAKARTA SELATAN |
| | | 14-09-04 | HK PN PALU |
| | | 26-07-07 | WKPN BULUKUMBA |
| | | 07-08-08 | HT PT BANDA ACEH |
| | | 18-05-11 | HT PT PADANG |

Jejaring: Universitas 45 Makassar

| No | Nama Hakim | Riwayat Pekerjaan | |
|----|-------------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | MARGONO, SH, M.Hum, M.M | 01-03-85 | CP CH PN JAKARTA BARAT |
| | | 01-05-86 | PNS PN JAKARTA BARAT |
| | | 26-03-87 | HK PN MUARA TEWEH |
| | | 10-01-91 | HK PN TERNATE |
| | | 03-04-97 | HK PN BALIK PAPAN |
| | | 26-09-01 | WK PN TENGGARONG |
| | | 19-08-03 | KPN SANGATA |
| | | 17-11-05 | KPN LIMBOTO |
| | | 07-08-08 | HT PT MATARAM |
| | | 04-05-10 | HT PT MAKASAR |

| | | | |
|---|-------------------------|----------|---------------------|
| 2 | MUH. TARID PALIMARI, SH | 01-04-71 | CP PN PARE-PARE |
| | | 01-08-72 | PNS PN PARE-PARE |
| | | 13-08-73 | PNS PN PINRANG |
| | | 06-02-84 | CH PN PINRANG |
| | | 24-06-86 | HK PN LIMBOTO |
| | | 27-11-91 | HK PN KANDANGAN |
| | | 28-07-97 | HK PN KETAPANG |
| | | 26-02-99 | WKPN KETAPANG |
| | | 14-02-00 | KPN BUNTOK |
| | | 07-01-02 | KPN KUALA KAPUAS |
| | | 15-09-04 | HK PN JAKARTA BARAT |
| | | 02-11-07 | WKPN PALU |
| | | 07-08-08 | HT PT KENDARI |
| | | 18-03-11 | HT PT MAKASAR |
| 3 | HERI SUKEMI, SH, MH | 01-03-85 | CP CH PN JEMBER |
| | | 01-10-86 | PNS PN MALANG |
| | | 04-07-87 | HK PN ENREKANG |
| | | 02-01-93 | HK PN KEBUMEN |
| | | 05-03-99 | HK PN SITUBONDO |
| | | 17-02-04 | WKPN BLITAR |
| | | 06-07-06 | KPN BLITAR |
| | | 07-08-08 | HT PT AMBON |
| | | 18-03-11 | HT PT MAKASAR |

Komisi Yudisial RI

| | | | |
|---|-------------------------------|----------|-----------------------|
| 4 | H. SUHARDJONO, SH, MH | 01-03-85 | CP CH PN SIDOARJO |
| | | 01-07-86 | PNS PN SIDOARJO |
| | | 26-03-87 | HK PN WAIKABUKAK |
| | | 15-01-91 | HK PN DILLI |
| | | 02-08-95 | HK PN KRAKSAN |
| | | 24-08-99 | HK PN BALE BANDUNG |
| | | 23-03-04 | WKPN LAMONGAN |
| | | 14-06-05 | KPN MOJOKERTO |
| | | 07-08-08 | HT PT GORONTALO |
| | | 18-05-11 | HT PT MAKASAR |
| 5 | IDA BAGUS PUTU MADEG, SH., MH | 01-03-74 | CP PN KARANG ASEM |
| | | 01-07-75 | PNS PN KARANG ASEM |
| | | 04-04-83 | CH PN DENPASAR |
| | | 21-11-84 | HK PN RUTENG |
| | | 07-03-89 | HK PN SELONG |
| | | 03-04-95 | HK PN TABANAN |
| | | 19-02-99 | WK PN TABANAN |
| | | 30-06-00 | HK PN JAKARTA SELATAN |
| | | 03-12-04 | HK PN MATARAM |
| | | 26-07-07 | HK PN DENPASAR |
| | | 07-08-08 | HT PT PALU |
| | | 18-05-11 | HT PT MAKASAR |

Jejaring: Universitas Udayana

| No | Nama Hakim | Riwayat Pekerjaan | |
|----|--------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | I WAYAN SUGAWA, SH, MHum | 01-09-79 | CP PN SINGARAJA |
| | | 01-02-83 | PNS PN SINGARAJA |
| | | 28-09-83 | HK PN KUPANG |
| | | 18-06-90 | HK PN BANYUWANGI |
| | | 03-04-96 | WK PN BANGLI |
| | | 16-07-98 | KPN NEGARA |
| | | 01-03-01 | HK PN DENPASAR |
| | | 16-09-03 | KPN MALANG |
| | | 17-11-05 | HT PT AMBON |
| | | 07-08-08 | HT PT DENPASAR |
| 2 | A.A. ANOM HARTANINDITA, SH, MH | 01-03-75 | CP DIJEN. PBP |
| | | 01-03-76 | PNS DIJEN PBP |
| | | 10-02-82 | CH PN JAKSEL |
| | | 01-10-84 | HK PN KOTABUMI |
| | | 19-12-90 | HK PN CIAMIS |
| | | 03-03-93 | HK YUST. MARI |
| | | 02-01-03 | WKPN CIREBON |
| | | 01-06-05 | KPN SUKABUMI |
| | | 31-01-07 | HT PT AMBON |
| | | 24-09-08 | HT PT DENPASAR |

Komisi Yudisial RI

| | | | |
|---|----------------------------------|----------|---------------------|
| 3 | SUTOTO HADI, SH, M. Hum. | 01-03-83 | CP CH PN PURWOKERTO |
| | | 01-10-84 | PNS PN PURWOKERTO |
| | | 23-07-85 | HK PN BUNTOK |
| | | 27-12-89 | HK PN KANDANGAN |
| | | 25-01-92 | HK PN SUBANG |
| | | 31-07-98 | HK PN TANGERANG |
| | | 15-11-02 | HK PN SAMARINDA |
| | | 16-09-03 | WKPN WATAMPONE |
| | | 08-06-04 | KPN BULUKUMBA |
| | | 17-11-05 | KPN MALANG |
| | | 19-11-07 | WKPN JAKARTA UTARA |
| | | 02-06-09 | KPN JAKARTA TIMUR |
| | | 20-07-10 | HT PT DENPASAR |
| 4 | H. MOHAMMAD IDROES, SH, M.Hum | 22-06-83 | CH CP PN SURABAYA |
| | | 01-10-84 | PNS PN SURABAYA |
| | | 19-07-85 | HK PN TANJUNG |
| | | 19-12-90 | HK PN TABANAN |
| | | 08-08-95 | HK PN MOJOKERTO |
| | | 09-02-00 | WKPN NGANJUK |
| | | 08-05-01 | HK PN SURABAYA |
| | | 01-06-05 | WKPN KLATEN |
| | | 17-07-06 | KPN KLATEN |
| | | 21-08-07 | WKPN BALIKPAPAN |
| | | 26-11-08 | KPN BALIKPAPAN |
| | | 07-02-11 | HT PT DENPASAR |

| | | | |
|---|---------------------------------|----------|------------------|
| 5 | HARTONO ABDUL MURAD, SH., MH | 01-03-84 | CP/CH PN KLATEN |
| | | 01-08-85 | PNS PN KLATEN |
| | | 12-04-86 | HK PN KOTABARU |
| | | 29-12-89 | HK PN SINGKAWANG |
| | | 06-06-95 | HK PN SUKABUMI |
| | | 25-10-99 | HK PN SIDOARJO |
| | | 21-09-04 | WKPN DEMAK |
| | | 27-06-05 | KPN DEMAK |
| | | 15-06-07 | HK PN MEDAN |
| | | 07-08-08 | HT PT PALU |
| | | 18-05-11 | HT PT DENPASAR |

Jejaring: Universitas Lampung

| No | Nama Hakim | Riwayat Pekerjaan | |
|----|----------------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | SABUNGAN PARHUSIP, SH., MH | 01-03-82 | CP CH PN MEDAN |
| | | 01-02-84 | PNS PN MEDAN |
| | | 15-04-85 | HK PN SIDIKALANG |
| | | 18-12-80 | HK PN METRO |
| | | 26-06-95 | HK PN PEMALANG |
| | | 18-08-99 | WKPN KAB. MADIUN |
| | | 16-07-01 | KPN KAB. MADIUN |
| | | 28-03-05 | KPN SORONG |
| | | 26-09-06 | HT PT AMBON |
| | | 29-01-09 | HT PT TANJUNGPALANG |

Komisi Yudisial RI

| | | | |
|---|----------------------|----------|------------------------|
| 2 | SUDIRMAN W.P, SH, MH | 01-03-84 | CP CH PN CIREBON |
| | | 01-07-85 | PNS PN CIREBON |
| | | 07-03-86 | HK PN KUALA KAPUAS |
| | | 07-03-91 | HK PN WONOSOBO |
| | | 25-06-97 | HK PN PURBALINGGA |
| | | 30-06-00 | HK PN JAKARTA BARAT |
| | | 19-08-03 | WKPN BONTANG |
| | | 04-12-03 | WKPN TENGGARONG |
| | | 07-06-05 | KPN TENGGARONG |
| | | 02-08-07 | HT PT JAMBI |
| | | 25-01-10 | HT PT TANJUNGPINANG |
| | | | |
| 3 | SUTARTO K.S., SH | 01-03-85 | CP CH PN SURAKARTA |
| | | 01-06-86 | PNS PN SURAKARTA |
| | | 26-03-87 | HK PN PELAIHARI |
| | | 30-12-92 | HK PN BARABAI |
| | | 03-10-95 | HK PN REMBANG |
| | | 08-03-99 | WKPN LUBUK BASUNG |
| | | 27-02-02 | WKPN PURWAKARTA |
| | | 23-04-03 | KPN PACITAN |
| | | 06-06-05 | HK PN JAKARTA BARAT |
| | | 07-08-08 | HT PT AMBON |
| | | 07-02-11 | HT PT TANJUNGPINANG |
| | | | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------|--------------------------|
| 4 | DR. NOMMY HT. SIAHAAN, SH., MH | 01-02-81 | CP BPHN DEP KEH |
| | | 01-02-82 | PNS BPHN DEP KEH |
| | | 13-07-82 | KANWIL BANDUNG |
| | | 21-04-83 | CH PN BOGOR |
| | | 23-07-85 | HK PN TANAH GROGOT |
| | | 15-06-88 | HK PN KALIANDA |
| | | 14-10-92 | HK YUSTISIAL MARI |
| | | 02-01-03 | WK PN SUKABUMI |
| | | 01-06-05 | HT PT BANGKA BELITUNG |
| | | 12-10-06 | HT PT TANJUNG KARANG |
| | | 26-11-08 | HT PT BANTEN |
| | | 19-02-09 | WKPT PALANGKARAYA |
| | | 02-03-10 | KPT PALANGKARAYA |
| 5 | HJ. NURLELA KATUN, SH | 01-03-79 | CP PN PALEMBANG |
| | | 01-05-80 | PNS PN PALEMBANG |
| | | 06-01-81 | CH PN PALEMBANG |
| | | 21-11-84 | HK PN KOTOBARU |
| | | 11-02-88 | HK PN MUARA ENIM |
| | | 14-10-92 | HK PN JAMBI |
| | | 08-05-99 | WKPN LAHAT |
| | | 03-01-01 | HK PN PALEMBANG |
| | | 20-04-06 | KPN MUARA BULIAN |
| | | 10-08-06 | KPN BINJAI |
| | | 02-08-07 | HT PT BANGKA BELITUNG |
| | | 26-11-08 | HT PT BENGKULU |

Jejaring: Perkumpulan HUMA

| No | Nama Hakim | Riwayat Pekerjaan | |
|----|---------------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | BAHTERA PARANGIN-ANGIN,SH | 03-07-85 | CP PN JAKARTA SELATAN |
| | | 17-06-86 | PNS PN JAKARTA SELATAN |
| | | 26-03-87 | HK PN PUTUSIBAU |
| | | 08-01-91 | HK PN TARUTUNG |
| | | 23-12-96 | HK PN PEMATANG SIANTAR |
| | | 20-11-02 | WKPN SIDIKALANG |
| | | 18-06-04 | KPN SIDIKALANG |
| | | 06-07-06 | HK PN MAKASSAR |
| | | 15-09-09 | HT PT PALANGKARAYA |
| 2 | ANDREAS DON RADE, SH., MH | 01-03-84 | CP CH PN KUPANG |
| | | 01-08-85 | PNS PN KUPANG |
| | | 28-06-86 | HK PN LARANTUKA |
| | | 03-11-92 | HK PN DILLI |
| | | 21-10-93 | HK PN SO'E |
| | | 23-02-99 | WKPN KALABAHI |
| | | 25-09-00 | KPN KALABAHI |
| | | 19-08-03 | HK PN SURABAYA |
| | | 02-11-07 | HT PT PALANGKARAYA |
| | | 25-01-10 | HT PT MANADO |

| | | | |
|---|-----------------------------|----------|------------------------|
| 3 | HJ. JURNALIS AMRAD, SH, MH | 01-12-67 | CP PN TG. PINANG |
| | | 01-09-70 | PNS PN TG.PINANG |
| | | 21-02-84 | CH PN TG. PINANG |
| | | 23-06-86 | HK PN TG. PINANG |
| | | 25-11-91 | HK PN INDRAMAYU |
| | | 12-09-94 | HK YUST. MARI |
| | | 02-01-03 | HT PT TG KARANG |
| | | 29-08-05 | HT PT PADANG |
| | | 07-08-08 | HT PT JAKARTA |
| 4 | HENDRIK PARDEDE, SH., M.Hum | 01-03-82 | CP CH PN UJUNG PANDANG |
| | | 01-03-84 | PNS UJUNG PANDANG |
| | | 21-11-84 | HK PN JENEPONTO |
| | | 16-11-90 | HK PN BATANG |
| | | 03-10-95 | WKPN TG. BALAI |
| | | 22-02-99 | KPN SIDIKALANG |
| | | 06-06-01 | HK PN MEDAN |
| | | 01-03-04 | HK PN JAKARTA UTARA |
| | | 12-10-06 | HT PT BANGKA BELITUNG |
| | | 04-05-09 | HT PT MATARAM |

Komisi Yudisial RI

| | | | |
|---|-----------------------|----------|--------------------|
| 5 | SRI MURYANTO, SH., MH | 01-02-75 | CP PN SUKOHARJO |
| | | 01-02-76 | PNS PN SUKOHARJO |
| | | 20-02-84 | CH PN SUKOHARJO |
| | | 02-01-86 | HK PN BAU - BAU |
| | | 23-01-92 | HK PN WONOGIRI |
| | | 29-12-97 | HK PN SRAGEN |
| | | 05-02-01 | WKPN PURWODADI |
| | | 27-08-01 | HK PN SEMARANG |
| | | 17-07-06 | HT PT PALANGKARAYA |
| | | 28-04-09 | HT PT MATARAM |

Tabel IV: Kode Jejaring dan Putusan yang Dianalisis

| KODE | NOMOR PUTUSAN | PERKARA |
|----------|---------------------------------|--|
| UMM-1a | No. 1270/Pdt.G/2011/PA.Kab. Mlg | Cerai gugat secara Islam |
| UMM-1b | No. 236/Pdt.G/2011/PTA.SBY | |
| UMM-2a | No. 343/Pid.B/2010/PN.Bdw | Pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama |
| UMM-2b | No. 228/Pid/2011/PT.SBY | |
| UMM-3a | No. 1077/Pid.B/2011/PN.SBY | Aborsi oleh dokter |
| UMM-3b | No. 438/Pid/2011/PT.SBY | |
| UMM-4a | No. 691/Pdt.G/2008/PN.SBY | Perbuatan melawan hukum oleh penguasa |
| UMM-4b | No. 334/Pdt/2009/PT.SBY | |
| UMM-5a | No. 4094/Pid.B/2009/PN.SBY | Pidana UU Perlindungan Konsumen |
| UMM-5b | No. 967/Pid/2010/PT.SBY | |
| Unlam-1a | No. 179/Pid.Sus/2011/PN.AMT | Bujuk anak melakukan persetubuhan |
| Unlam-1b | No. 08/Pid.Sus/2012/PT.BJM | |
| Unlam-2a | No. 133/Pid.Sus/2010/PN.MTP | Penggelapan, perbankan syariah, pencucian uang |
| Unlam-2b | No. 149/Pid.Sus/2010/PT.BJM | |
| Unlam-3a | No. 89/Pid.B/2008/PN.MRB | Kejahatan terhadap nyawa |
| Unlam-3b | No. 85/Pid/2008/PT. BJM | |
| Unlam-4a | No. 302/Pid.Sus/2009/PN.Plh | Korupsi pengadaan barang |
| Unlam-4b | No. 62/Pid.Sus/2010/PT.BJM | |

| | | |
|----------|----------------------------------|--|
| Unlam-5a | No. 51/Pdt.G/2011/PN.BJM | Perceraian |
| Unlam-5b | No. 83/Pdt/2011/PT.BJM | |
| Untan-1a | No. 01/Pdt.G/2010/PN.PTSB | Perbuatan melawan hukum (sengketa goa burung walet) |
| Untan-1b | No. 06/Pdt/2011/PT.PTK | |
| Untan-2a | No. 471/Pid.B/2010/PN.PTK | Penggelapan |
| Untan-2b | No. 283/Pid/2010/PT.PTK | |
| Untan-3a | No. 21/Pdt/2010/PN.SKW | Perbuatan melawan hukum (kerugian rusaknya lahan sawit) |
| Untan-3b | No. 44/Pdt/2011/PT.PTK | |
| Untan-4a | No. 103/Pdt.G/2010/PN.PTK | Perbuatan melawan hukum (putus sewa-menyewa sepihak) |
| Untan-4b | No. 27/Pdt/2011/PT.PTK | |
| Untan-5a | No. 19/Pid.B/2011/PN.MMR | Kelalaian yang mengakibatkan kematian. |
| Untan-5b | No. 73/Pid/2011/PT.PTK | |
| UII-1a | No. 268/Pid.Sus/2010/PN.Btl | Korupsi secara berlanjut |
| UII-1b | No. 73/Pid.Sus/2011/PTY | |
| UII-2a | No. 19/Pid.B/2011/PT.BNK | Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup |
| UII-2b | No. 75/Pid/2011/PTR | |
| UII-3a | No. 1098/Pid.Sus/2009/PN.BJM | Korupsi bersama-sama dan berlanjut |
| UII-3b | No. 13/Pid.Sus/2010/PT.BJM | |
| UII-4a | No. 106/Pdt.Plw/2010/PN.Slmm | Sengketa tanah hak milik |
| UII-4b | No. 42/Pdt/2011/PTY | |
| UII-5a | No. 133/Pdt.G/2010/PN.Slmm | Sengketa tanah HGB |
| UII-5b | No. 44/Pdt/2011/PTY | |
| Unja-1a | No. 17/Pdt.G/2010/PN.Mab. | Sengketa jual beli |
| Unja-1b | No. 26/Pdt/2011/PT.JBI | |
| Unja-2a | No. 68/Pdt.G/2011/PN.JBI | Perbuatan melawan hukum oleh penguasa |
| Unja-2b | No. 02/Pdt/2012/PT.JBI | |
| Unja-3a | No. 77/Pid.Sus/2009/PN.SS | Perbuatan cabul terhadap anak |
| Unja-3b | No. 09/Pid.Sus/2010/PN.MALUT | |
| Unja-4a | No. 03/Pdt.G/2009/PN.Unh | Sengketa tanah hak milik |
| Unja-4b | No. 44/Pdt/2010/PT.SULTRA | |
| Unja-5a | No. 36/Pid.B/2009/PN.MSH di Piru | Kekerasan seksual terhadap anak |
| Unja-5b | No. 15/Pid/2009/PN.MAL | |

Komisi Yudisial RI

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| USU-1a | No. 28/Pdt.G/2010/PN.TTD | Sengketa Tanah |
| USU-1b | No. 363Pdt/2011/PT.Mdn | |
| USU-2a | No. 73/Pdt.G/2010.PN.Mdn | Sengketa Tanah |
| USU-2b | No. 22/Pdt/2011/PT.Mdn | |
| USU-3a | No. 129/Pdt.G/2010/PN.Mdn | Sengketa tanah hak milik |
| USU-3b | No. 111/Pdt/2011/PT.Mdn | |
| USU-4a | No. 1.223/Pid.B/2011/PN.Mdn | Tindak pidana narkotika |
| USU-4b | No. 660/Pid/2011/PT.Mdn | |
| USU-5a | No. 2.664/Pid.B/2011/PN.Mdn | Tindak pidana narkotika |
| USU-5b | No. 760/Pid/2011/PT.Mdn | |
| Unsyiah-1a | No. 296/Pid/2010/PN.BNA | Penipuan |
| Unsyiah-1b | No. 265/Pid/2010/PT.BNA | |
| Unsyiah-2a | No. 85/Pid/2011/PN.SGI | Narkotika |
| Unsyiah-2b | No. 136/Pid.B/2011/PT.BNA | |
| Unsyiah-3a | No. 08/Pdt.G/2009/PN.Mbo | Sengketa tanah |
| Unsyiah-3b | No. 16/Pdt/2010/PT.BNA | |
| Unsyiah-4a | No. 78/Pid.B/2010/PN.CAG | Korupsi secara berlanjut |
| Unsyiah-4b | No. 85/Pid/2011/PT.BNA | |
| Unsyiah-5a | No. 152/Pid.B/2011/PN.Mbo | Membantu pencurian dalam keadaan memberatkan |
| Unsyiah-5b | No. 243/Pid/2011/PT.BNA | |
| <p>Catatan: Laporan Unand di bawah ini tidak mengikuti panduan penelitian (TOR) yang sudah disampaikan, sehingga antara putusan a dan b tidak terkait pada perkara yang sama (kecuali untuk 3a dan 3b). Oleh sebab itu, untuk keperluan analisis kuantitatif hanya putusan Unand-3a dan 3b yang dipakai, sedangkan selebihnya diabaikan.</p> | | |
| Unand-1a | No. 02/Pdt.G/2000/PN.BT | Sengketa kepemilikan tanah (melawan hukum) |
| Unand-1b | No. 04/Pdt/2011/PT.BNA | Sengketa tanah hak milik |
| Unand-2a | No. 12/Pdt.G/1991/PN.PYK | Sengketa sawah pusaka tinggi. |
| Unand-2b | No. 23/Tipikor/2011/PT.PDG | Korupsi |
| Unand-3a | No. 80/Pid.B/2011/PN.MR | Pemeriksaan dan pembunuhan |
| Unand-3b | No. 237/Pid/2011/PT.PDG | Pembunuhan dan Pemeriksaan |
| Unand-4a | No. 65/Pdt/G/2002/PN.PDG | Sengketa tanah ulayat |
| Unand-4b | No. 97/Pid/2007/PT.PDG | Pembunuhan berencana |
| Unand-5a | No. 31/Pdt.G/2004/PN.PRM | Sengketa tanah hak milik |
| Unand-5b | No. 65/Pdt.G/2010/PT.PDG | Sengketa tanah ulayat |

| | | |
|---------|----------------------------------|---|
| HuMa-1a | No.120/Pid.B/2010/PN.THNA | Tindak Pidana Lingkungan Hidup |
| HuMa-1b | No.71/Pid/2011/PT.MDO | |
| HuMa-2a | No. 107/PDT.G/2009/PN.MTR | Sengketa kepemilikan tanah (melawan hukum) |
| HuMa-2b | No. 112/PDT/2010/PT.MTR | |
| HuMa-3a | No. 485/PID.B/2010/PN.MTR | Tindak pidana narkotika |
| HuMa-3b | No. 31/PID/2011/PT.MTR | |
| HuMa-4a | No. 212/Pid.Sus/2011/PN.SPT | Tindak Pidana di bidang perburuhan |
| HuMa-4b | No. 41/Pis.Sus/2011/PT.PR | |
| HuMa-5a | No. 31/Pid.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst | Tindak pidana korupsi |
| HuMa-5b | No. 22/Pid.B/TPK/2011/PT.DKI | |

| | | |
|------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Unpas - 1a | No.503/ Pid.Sus/ 2009/ PN. BGR | Tindak pidana korupsi |
| Unpas -1b | No.06/ TIPIKOR/2011/PT.BDG | |
| Unpas -2a | No.26/Pdt.G/2011/PN.Tsm | Perbuatan melawan hkum |
| Unpas -2b | No. 361/Pdt/2011/PT.Bdg | |
| Unpas -3a | No. 16/Pdt.G/2008/PN.CJ | Perbuatan melawan hukum |
| Unpas -3b | No. 291/Pdt/2009/PT.Bdg | |
| Unpas -4a | No. 26/PDT.G/2010/PN.DPK | Sengketa kepemilikan tanah |
| Unpas -4b | No. 103/PDT/2011/PT.Bdg | |
| Unpas -5a | No. 444/Pid.B/2011/PN.CBN | Tindak pidana perdagangan orang |
| Unpas -5b | No. 369/PID/2011/PT.Bdg | |

| | | |
|-------|---------------------------------|-------------------------|
| UP-1a | No. 1291/Pid.B/2011/PN.TNG | Penipuan/penggelapan |
| UP-1b | No. 173/PID/2001/PT.BTN | |
| UP-2a | No.300/PDT.G/2009/PN. Medan | Perbuatan melawan hukum |
| UP-2b | No. 06/PDT/2012/PT. Medan | |
| UP-3a | No. 197/PDT.G/2008/PN. MEDAN | Perbuatan Melawan Hukum |
| UP-3b | No. 381/PDT/2009/PT.MEDAN | |
| UP-4a | No. 20/PDT/2009/PN.Maros | Perbuatan Melawan Hukum |
| UP-4b | No. 216/PDT/2010/PT.MKS | |
| UP-5a | No. 1776/Pid.B/2010/PN. JKT.PST | Tindak Pidana Penipuan |
| UP-5b | No. 69/PID/2012/PT.DKI | |

| | | |
|--------|-----------------------|--------------------------------------|
| U45-1a | 08/PID/2012/PT.MKS | Bujuk anak melakukan persetubuhan |
| U45-1b | 269/Pid.B/2011/PN.BLK | |

Komisi Yudisial RI

| | | |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------|
| U45-2a | 44/Pdt.G/2010/PN.MKS | Sengketa hak tanggungan |
| U45-2b | 317/PDT/2011/PT.MKS | |
| U45-3a | No. 237/PID.B/2009/PN.MKS | Tindak Pidana Korupsi |
| U45-3b | No. 288/PID/2010/PT.MKS | |
| U45-4a | No. 02/Pdt.G/2011/PN.JO | Sengketa hak milik |
| U45-4b | No. 240/PDT/2011/PT.MKS | |
| U45-5a | No. 313/PDT.G/2009/PN.Mks | Sengketa hak milik tanah |
| U45-5b | No. 423/PDT/2011/PT.Mks | |
| | | |
| Unud-1a | 42/PDT/2009/PT.DPS | Sengketa hak milik tanah |
| Unud-1b | 01/Pdt/G/2008/PN.BLi. | |
| Unud-2a | 20/PID/2010/PT.DPS | Kekerasan seksual terhadap anak |
| Unud-2b | 69/Pid.B/2009/PN.BLi | |
| Unud-3a | No. 385/PDT.G/2010/PN.Dps | Gugatan Harta Bersama |
| Unud-3b | No. 69/PDT/2011/PT.DPS | |
| Unud-4a | No. 172/PDT.G/2010/PN.SGR | Perbuatan Melawan Hukum |
| Unud-4b | No. 127/PDT/2011/PT/DPS | |
| Unud-5a | No. 0398/Pid.B/2010/PN.Dps | Pencurian |
| Unud-5b | No. 122/PID/2010/PT/DPS | |
| | | |
| Unsoed-1a | 03/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg | Tindak pidana korupsi |
| Unsoed-1b | 56/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg | |
| Unsoed-2a | 283/Pid/2011/PT.Smg | Penggelapan |
| Unsoed-2b | 45/Pid.B/2011/PN.Pwi | |
| Unsoed-3a | 262/Pdt/2011/PT.Smg | Sengketa hak tanggungan |
| Unsoed-3b | 24/Pdt.Plw/2010/PN.Kds | |
| Unsoed-4a | 356/Pdt/2009/PT.Smg. | Sengketa hak tanggungan |
| Unsoed-4b | 150/Pdt.G/2008/PN.Ska | |
| Unsoed-5a | 120/Pid/sus/2011/PT.Smg | Narkotika |
| Unsoed-5b | 07/Pid.Sus/2011/PN.Pwt | |
| | | |
| Unila-1a | 115/Pid/2009/PT.TK | Penipuan |
| Unila-1b | 283/Pid.B/2009/PN.TK | |
| Unila-2a | 01/Pid/TPK/2011/PT.TK | Korupsi secara berlanjut |
| Unila-2b | 694/Pid.Sus/2010/PN.TK | |

| | | |
|----------|---------------------------|-------------------------------------|
| Unila-3a | No. 13/Pdt.G/2008/PN.KTA | Sengketa kepemilikan tanah |
| Unila-3b | No. 45/Pdt/2009/PT.TK | |
| Unila-4a | No. 06/PID/2011/PN.BU | Tindak pidana membawa senjata tajam |
| Unila-4b | No. 34/Pid/2011/PT.TK | |
| Unila-5a | No. 1819/PID.B/2009/PN.TK | Penyalahgunaan keuangan daerah |
| Unila-5b | No. 109/Pid/2010/PT.TK | |

Tabel V: Putusan dan Majelis Hakim di Pengadilan Tingkat Banding

| KODE | NOMOR PUTUSAN | HAKIM PT TERKAIT (**) Hakim yang diwawancara langsung; (*) Hakim tersebut mengisi lembar kuesioner |
|----------|---------------------------------|---|
| UMM-1a | No. 1270/Pdt.G/2011/PA.Kab. Mlg | H. Jalihsyah**, Ayunah M. Zabidi; Munardi |
| UMM-1b | No. 236/Pdt.G/2011/PTA.SBY | |
| UMM-2a | No. 343/Pid.B/2010/PN.Bdw | Agustina Pattiellohy**, H. Wahjono; Sonny Noerhendro |
| UMM-2b | No. 228/Pid/2011/PT.SBY | |
| UMM-3a | No. 1077/Pid.B/2011/PN.SBY | H. Wahjono**, Arifin Rusli Hutagaol; V. Misnan |
| UMM-3b | No. 438/Pid/2011/PT.SBY | |
| UMM-4a | No. 691/Pdt.G/2008/PN.SBY | H. Damsuri Nungtjik; Juliana Wullur; Made Rawa Aryawan** |
| UMM-4b | No. 334/Pdt/2009/PT.SBY | |
| UMM-5a | No. 4094/Pid.B/2009/PN.SBY | Hesmu Purwanto**, Abdul Kadir; V. Misnan |
| UMM-5b | No. 967/Pid/2010/PT.SBY | |
| Unlam-1a | No. 179/Pid.Sus/2011/PN.AMT | Gatot Supramono*; Hizbullah; Sutrisni |
| Unlam-1b | No. 08/Pid.Sus/2012/PT.BJM | |
| Unlam-2a | No. 133/Pid.Sus/2010/PN.MTP | Ester Siregar*; Sutrisni; Hidayat |
| Unlam-2b | No. 149/Pid.Sus/2010/PT.BJM | |
| Unlam-3a | No. 89/Pid.B/2008/PN.MRB | Soltoni Mohdally; Juliana Wullur; H.Hamdi |
| Unlam-3b | No. 85/Pid/2008/PT. BJM | |
| Unlam-4a | No. 302/Pid.Sus/2009/PN.Plh | Hj.Sri Sutatiek; Subaryanto; H.Muhammad Yusuf (Oleh karena Sri Sutatiek tidak lagi bertugas di PT Kalsel, maka peneliti mewawancarai penasihat hukum terdakwa, yaitu Masdari Tamin). |
| Unlam-4b | No. 62/Pid.Sus/2010/PT.BJM | |

Komisi Yudisial RI

| | | |
|----------|------------------------------|---|
| Unlam-5a | No. 51/Pdt.G/2011/PN.BJM | Yakub Ginting; Purwanto; Subaryanto (diwawancara; tapi tak ada transkrip) |
| Unlam-5b | No. 83/Pdt/2011/PT.BJM | |
| Untan-1a | No. 01/Pdt.G/2010/PN.PTSB | Ida Bagus Ngurah Somya; Lief Sofijullah; T.H. Tampubolon* |
| Untan-1b | No. 06/Pdt/2011/PT.PTK | |
| Untan-2a | No. 471/Pid.B/2010/PN.PTK | Ida Bagus Ngurah Somya; Bersiaf Sitanggang; H.Sumanto*; Tjahjono; T.H.Tampubolon |
| Untan-2b | No. 283/Pid/2010/PT.PTK | |
| Untan-3a | No. 21/Pdt/2010/PN.SKW | H.Edwarman; Hari Almusahadi; Djumain* |
| Untan-3b | No. 44/Pdt/2011/PT.PTK | |
| Untan-4a | No. 103/Pdt.G/2010/PN.PTK | Ida Bagus Somya; H.Fadlol Tamam*; Ahmad Subaidi |
| Untan-4b | No. 27/Pdt/2011/PT.PTK | |
| Untan-5a | No. 19/Pid.B/2011/PN.MMR | Eddy Pangaribuan; Necodemus*; Mega Boena |
| Untan-5b | No. 73/Pid/2011/PT.PTK | |
| Unand-1a | No. 02/Pdt.G/2000/PN.BT | H.Effendi; Amriddin; Amsar Joenaga (tak ada wawancara) |
| Unand-1b | No. 04/Pdt/2011/PT.BNA | |
| Unand-2a | No. 12/Pdt.G/1991/PN.PYK | Hj. Irama Chandra Ilja **, Hj. Reflinar Nurman, Firdaus. |
| Unand-2b | No. 23/Tipikor/2011/PT.PDG | |
| Unand-3a | No. 80/Pid.B/2011/PN.MR | Anasroel Haroen; Herman Nurman**; Rosidin |
| Unand-3b | No. 237/Pid/2011/PT.PDG | |
| Unand-4a | No. 65/Pdt/G/2002/PN.PDG | Hj.Nuraina Agus; H.Sjarnubi; Anasroel Haroen** |
| Unand-4b | No. 97/Pid/2007/PT.PDG | |
| Unand-5a | No. 31/Pdt.G/2004/PN.PRM | Asmaini Adlis, Desnayeti **, Tewel Nussa Steven. |
| Unand-5b | No. 65/Pdt.G/2010/PT.PDG | |
| UII-1a | No. 268/Pid.Sus/2010/PN.Btl | Maria Anna Samiyati**; H.Hamdi; Johan Erwin Isharyanto |
| UII-1b | No. 73/Pid.Sus/2011/PTY | |
| UII-2a | No. 19/Pid.B/2011/PT.BNK | Imam Soekarno; K.Saragih Siadari; H.A.Gatam Taridi; Aspar Siagian; Navia Siahaan |
| UII-2b | No. 75/Pid/2011/PTR | |
| UII-3a | No. 1098/Pid.Sus/2009/PN.BJM | H.Hamdi**; Mulijanto; Yakup Ginting |
| UII-3b | No. 13/Pid.Sus/2010/PT.BJM | |
| UII-4a | No. 106/Pdt.Plw/2010/PN.Slmm | Hj.Endang Sri Murwati; Satria U.S. Gumay; H.Hamdi** |
| UII-4b | No. 42/Pdt/2011/PTY | |

| | | |
|------------|----------------------------------|---|
| UII-5a | No. 133/Pdt.G/2010/PN.Slman | R.R.Sri Hertati Soemantoro; Djuwarni; Maria Anna Samiyati** |
| UII-5b | No. 44/Pdt/2011/PTY | |
| Unja-1a | No. 17/Pdt.G/2010/PN.Mab. | Partomuan Sihombing **, Tumpak Situmorang, Ewit Soetriadi. |
| Unja-1b | No. 26/Pdt/2011/PT.JBI | |
| Unja-2a | No. 68/Pdt.G/2011/PN.JBI | Dharma E. Damanik, Eddy Pangaribuan*, Wahidin. |
| Unja-2b | No. 02/Pdt/2012/PT.JBI | |
| Unja-3a | No. 77/Pid.Sus/2009/PN.SS | H. Wahidin*; I Madu Nandu; Firzal Arzi |
| Unja-3b | No. 09/Pid.Sus/2010/PN.MALUT | |
| Unja-4a | No. 03/Pdt.G/2009/PN.Unh | H.M. Tarid Palimari; Benar Karo Karo*; Agustinus |
| Unja-4b | No. 44/Pdt/2010/PT.SULTRA | |
| Unja-5a | No. 36/Pid.B/2009/PN.MSH di Piru | Tumpak Situmorang*; Daniel Rimpan; Heri Sukemi |
| Unja-5b | No. 15/Pid/2009/PN.MAL | |
| USU-1a | No. 28/Pdt.G/2010/PN.TTD | Djoko Sediono, H. Maenong**, H.M, H., Moch. Hatta |
| USU-1b | No. 363Pdt/2011/PT.Mdn | |
| USU-2a | No. 73/Pdt.G/2010.PN.Mdn | Rivai Rasyad, Sudi Wardono, Untung Widarto* |
| USU-2b | No. 22/Pdt/2011/PT.Mdn | |
| USU-3a | No. 129/Pdt.G/2010/PN.Mdn | H.Daming Sanusi**; Saut H.Pasaribu; H.Nardiman |
| USU-3b | No. 111/Pdt/2011/PT.Mdn | |
| USU-4a | No. 1.223/Pid.B/2011/PN.Mdn | H.Syahrir Hasibuan, OhanBurhanuddin**, Syafaruddin (ada penjelasan wawancara via telepon) |
| USU-4b | No. 660/Pid/2011/PT.Mdn | |
| USU-5a | No. 2.664/Pid.B/2011/PN.Mdn | Nuzuardi; Margono; Gatot Suharnoto (ada penjelasan wawancara gagal dilakukan) |
| USU-5b | No. 760/Pid/2011/PT.Mdn | |
| Unsyiah-1a | No. 296/Pid/2010/PN.BNA | Al Jaman Sutopo, Johny Santosa, Eddy Joenarso. |
| Unsyiah-1b | No. 265/Pid/2010/PT.BNA | |
| Unsyiah-2a | No. 85/Pid/2011/PN.SGI | Eddy Joenarso**, Eddy Risdianto, M. Syafuruddin Adam. Hasil wawancaranya cuma selembar dan tidak mendalam. |
| Unsyiah-2b | No. 136/Pid.B/2011/PT.BNA | |
| Unsyiah-3a | No. 08/Pdt.G/2009/PN.Mbo | Hj.Rooslya Hambali; Johny Santosa*; Eddy Joenarso* (wawancara dengan 2 orang; dibuat ringkasannya [?]) |
| Unsyiah-3b | No. 16/Pdt/2010/PT.BNA | |

Komisi Yudisial RI

| | | |
|------------|----------------------------------|---|
| Unsyiah-4a | No. 78/Pid.B/2010/PN.CAG | Johny Santosa*, H.M. Syarifuddin Adam; Hartadi |
| Unsyiah-4b | No. 85/Pid/2011/PT.BNA | |
| Unsyiah-5a | No. 152/Pid.B/2011/PN.Mbo | Al Jaman Sutopo; Johny Santosa*; Hidayat Hasyim |
| Unsyiah-5b | No. 243/Pid/2011/PT.BNA | |
| | | |
| HuMa-1a | No.120/Pid.B/2010/PN.THNA | Andreas Don Rade **, M.M.P. Sitompul, Hanung Iskandar |
| HuMa-1b | No.71/Pid/2011/PT.MDO | |
| HuMa-2a | No. 107/PDT.G/2009/PN.MTR | Hendrik Pardede **, Retno Pudyaningtyas, Chrisno Lampodji |
| HuMa-2b | No. 112/PDT/2010/PT.MTR | |
| HuMa-3a | No. 485/PID.B/2010/PN.MTR | Sri Muryanto,Chrisno Rampalodji,Wayan Kota. |
| HuMa-3b | No. 31/PID/2011/PT.MTR | |
| HuMa-4a | No. 212/Pid.Sus/2011/PN.SPT | Bahtera Perangin-Angin, B.W.C.Ndaumanu, Dina Krisnawati. (Hakim tidak bersedia diwawancara; yang diwawancarai terdakwa dan saksi, tapi hasil wawancara tidak digunakan untuk analisis) |
| HuMa-4b | No. 41/Pis.Sus/2011/PT.PR | |
| HuMa-5a | No. 31/Pid.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst | Tjokorda Rai Suamba, Jupriyadi, H. Dudu Duswara. (Tidak teridentifikasi nama CHA dalam putusan yang diteliti) |
| HuMa-5b | No. 22/Pid.B/TPK/2011/PT.DKI | |
| | | |
| Unpas - 1a | No.503/ Pid.Sus/ 2009/ PN. BGR | Soebagio Wirosoemarto**, Pasti Serefina Sinaga, H. Fontian Munzil. |
| Unpas -1b | No.06/ TIPIKOR/2011/PT.BDG | |
| Unpas -2a | No.26/Pdt.G/2011/PN.Tsm | Hj. Robbiah, Hj. Asmaini, H. Ariansyah B. Dali **. |
| Unpas -2b | No. 361/Pdt/2011/PT.Bdg | |
| Unpas -3a | No. 16/Pdt.G/2008/PN.CJ | Robbah,Wiwik Widiastuti, R. Hendry Silaen** |
| Unpas -3b | No. 291/Pdt/2009/PT.Bdg | |
| Unpas -4a | No. 26/PDT.G/2010/PN.DPK | H. Sjam Amansjah, Robinson Tarigan, **, Andriani Nurdin. |
| Unpas -4b | No. 103/PDT/2011/PT.Bdg | |
| Unpas -5a | No. 444/Pid.B/2011/PN.CBN | Syam Amansyah, P. Manalu Rambe, Andriani Nurdin |
| Unpas -5b | No. 369/PID/2011/PT.Bdg | |
| | | |
| UP-1a | No. 1291/Pid.B/2011/PN.TNG | H. Fauzie Ishak, H. Widiono**, H. Effendi Gayo. |
| UP-1b | No. 173/PID/2001/PT.BTN | |

| | | |
|---------|--------------------------------|--|
| UP-2a | No.300/PDT.G/2009/PN.Mdn | Marni Emmy Mustafa **, Kresna Menon, Gatot Suharnoto. |
| UP-2b | No. 06/PDT/2012/PT.Mdn | |
| UP-3a | No. 197/PDT.G/2008/PN.Mdn | JatinarNababan, R. Nohantoro, SudrajadDimiyati. |
| UP-3b | No. 381/PDT/2009/PT.Mdn | |
| UP-4a | No. 20/PDT/2009/PN.Maros | Nurtini, Hamimang, Zahrul Rabain** |
| UP-4b | No. 216/PDT/2010/PT.MKS | |
| UP-5a | No. 1776/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst | Chairil Anwar**,Chaidir, ZahrulRabain. |
| UP-5b | No. 69/PID/2012/PT.DKI | |
| | | |
| U45-1a | 08/PID/2012/PT.MKS | H. Sudirman Hadi, Eko Tunggul Pribadi, H. Suhardjono**. |
| U45-1b | 269/Pid.B/2011/PN.BLK | |
| U45-2a | 44/Pdt.G/2010/PN.MKS | Ida Bagus Putu Madeg**, Djamer Pasaribu, Suhardjono. |
| U45-2b | 317/PDT/2011/PT.MKS | |
| U45-3a | No. 237/PID.B/2009/PN.MKS | Sudirman Hadi, RosminaAgus, Margono** |
| U45-3b | No. 288/PID/2010/PT.MKS | |
| U45-4a | No. 02/Pdt.G/2011/PN.JO | A.K.Paruasan, RosminaAgus, Muh. Tarid Palimari** |
| U45-4b | No. 240/PDT/2011/PT.MKS | |
| U45-5a | No. 313/PDT.G/2009/PN.Mks | Ida Bagus Putu Madeg, Heri Sukemi**, Zainuddin |
| U45-5b | No. 423/PDT/2011/PT.Mks | |
| | | |
| Unud-1a | 42/PDT/2009/PT.DPS | I Wayan Sugawa, Ni Wayan Mariati, A.A. Anom Hartanindita**. |
| Unud-1b | 01/Pdt/G/2008/PN.BLi. | |
| Unud-2a | 20/PID/2010/PT.DPS | I Wayan Sugawa**, A.A. Anom Hartanindita, Hj. Nursiah Kadir. |
| Unud-2b | 69/Pid.B/2009/PN.BLi | |
| Unud-3a | No. 385/PDT.G/2010/PN.Dps | I Made Ariwangsa, Ida Bagus Djagra, Mohammad Idroes. (Tidak teridentifikasi nama CHA dalam putusan yang diteliti) |
| Unud-3b | No. 69/PDT/2011/PT.DPS | |
| Unud-4a | No. 172/PDT.G/2010/PN.SGR | I Wayan Sugawa, Sonhaji, Hartono Abdul Murad. |
| Unud-4b | No. 127/PDT/2011/PT/DPS | |
| Unud-5a | No. 0398/Pid.B/2010/PN.Dps | Siti Moezainah, Amiryat, Sutoto Hadi. (Tidak teridentifikasi nama CHA dalam putusan yang diteliti) |
| Unud-5b | No. 122/PID/2010/PT/DPS | |
| | | |

Komisi Yudisial RI

| | | |
|-----------|--------------------------------|--|
| Unsoed-1a | 03/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg | Hj. Sri Iskandaryati, Syamsul Bachri Bapatua **, Dermawan S Djamian. |
| Unsoed-1b | 56/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg | |
| Unsoed-2a | 283/Pid/2011/PT.Smg | Kornel Sianturi, Abi Saleh Mendrof, H. Bachtiar. |
| Unsoed-2b | 45/Pid.B/2011/PN.Pwi | |
| Unsoed-3a | 262/Pdt/2011/PT.Smg | 1. H. Bachtiar AMS., ** Kornel Sianturi, Abid Saleh Mendrofa. |
| Unsoed-3b | 24/Pdt.Plw/2010/PN.Kds | |
| Unsoed-4a | 356/Pdt/2009/PT.Smg. | Kornel Sianturi, Sudjono, Heru Iriani** |
| Unsoed-4b | 150/Pdt.G/2008/PN.Ska | |
| Unsoed-5a | 120/Pid/sus/2011/PT.Smg | I Made Tengah Sidharta, Hj. Susilowati, H. Soedarmadji** |
| Unsoed-5b | 07/Pid.Sus/2011/PN.Pwt | |
| | | |
| Unila-1a | 115/Pid/2009/PT.TK | P. Manalu Rambe, Sabungan Parhusip**, H. Sarifuddin. |
| Unila-1b | 283/Pid.B/2009/PN.TK | |
| Unila-2a | 01/Pid/TPK/2011/PT.TK | Moerino, Sutarto KS, F. Willem Saija, Selamat Haryadi **, Sudirman Sitepu. |
| Unila-2b | 694/Pid.Sus/2010/PN.TK | |
| Unila-3a | No. 13/Pdt.G/2008/PN.KTA | Sabungan Parhusip, P. Manalu Rambe, Sarifudin |
| Unila-3b | No. 45/Pdt/2009/PT.TK | |
| Unila-4a | No. 06/PID/2011/PN.BU | Zulkarnain Pak Negara, Sabungan Parhusip**, Sudirman W.P. |
| Unila-4b | No. 34/Pid/2011/PT.TK | |
| Unila-5a | No. 1819/PID.B/2009/PN.TK | Sutoyo, Ulibasa Hutagalung, F. Willem Saija. (Tidak teridentifikasi nama CHA dalam putusan yang diteliti) |
| unila-5b | No. 109/Pid/2010/PT.TK | |

Lampiran II

Tabel VII: Jumlah Putusan Perkara Pidana

| No | Jejaring | Putusan PT | Nama Hakim | Putusan PN pasangannya | Putusan PT bukan pasangannya | Putusan PN bukan pasangannya |
|----|----------|------------|--|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | UII | 1 | Imam Soekarno; K. Saragih Siadari; H.A. Gatam Taridi; Aspar Siagian; Navia Siahaan | 19/Pid.B/2001/PN.BKN | | |
| | | 2 | H. Hamdi, S.H., M. Hum Muljianto, S.H.; Yakup Ginting, S.H., CN. M.Kn. | 1098/PID.SUS/2009/PN.BJM | | |
| | | 3 | Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.; H. Hamdi, S.H., M.Hum.; Johan Erwin Isharyanto, S.H. M.H. | 73/PID. SUS/2011/PTJ | 268/Pid.Sus/2010/PN.BH | |

Lampiran

Komisi Yudisial RI

| | | | | | | | |
|---|----------------|---|-------------------------|--|----------------------------|--|--|
| 2 | 45 Makassar | 1 | 08/PID/2012/ PT.MKS | H. Sudirman Hadi; Eko Tunggul Pribadi; Sudirman Sitepu | 269/Pid.B/2011/ PN.BLK | | |
| | | 2 | 288/PID/2010/ PT.MKS | Margono, S.H., M.Hum, M.M. | 237/PID.B/2009/ PN- MKS | | |
| 3 | Untan | 1 | 283/PID/2010/ PT.PTK | Torang Tampubolon; H. Sumanto | 471/PID.B/2010/ PN.PTK | | |
| | | 2 | 73/PID/2011/ PTK | Eddy Pangaribuan, S.H., M.H.; Necodennus, S.H., M.H.; Mega Boena, S.H. | 19/PID.B/2011/ PN.MMIR | | |
| 4 | Udayana | 1 | 20/PID/2010/ PT.DPS | I Wayan Sugawa; A.A. Anom Hartamindita; Hj. Nursiah Kadir | 69/Pid.B/2009/PN.BLI | | |
| | | 2 | 122/PID/2010/ PT.DPS | Hj. Siti Moezainah, H., S.H.; Amiryat, S.H.; Sutoto Hadi, S.H., M.Hum. | 0398/Pid.B/2010/ PN.Dps | | |
| 5 | UMM | 1 | 228/PID/2011/ PT.SBY | H. Wahjono | 343/Pid.B/2010/ PN.Bdw | | |
| | | 2 | 967/PID/2010/ PT.SBY | Hesmu Purwanto; Abdul Kadir, S.H.; V. Misnan, S.H. | 4094/Pid.B/2009/ PN.SBY | | |
| | | 3 | 438/PID/2011/ PT.SBY | H. Wahjono; Arifin Rusli Hutagaol; V. Misnan | 1077/Pid.B/2011/ PN.SBY | | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|---|-----------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 6 | Unsoed | 1 | 03/Pid. Sus/2012/PT.TPK.Smg | Syamsul Bachri Bapatua | 56/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg | | |
| | | 2 | 283/Pid/2011/PT.Smg | Kornel Sianturi | 45/Pid.B/2011/PN.Pwi | | |
| 7 | Unpas | 3 | 120/Pid/sus/2011/PT.Smg | I Made Tengah Sidharta, S.H., M.Hum.; Hj. Susilowati, S.H., CN. MKn.; Dr.H.Soedarmadji, S.H., M.Hum. | 07/Pid.Sus/2011/PN.Pwt | | |
| | | 1 | 06/Tipikor/2011/PT.Bdg | Soebagio Wirosoemarto, S.H., M.Hum. | 503/Pid.Sus/2009/PN.Bgr | | |
| 8. | Univ. Pancasila | 2 | 369/PID/2011/PT.Bdg | Ny. Dr. Andriani Nuridin, S.H., M.H. | 444/Pid.B/2011/PN.CBN | | |
| | | 1 | 173/PID/2001/PT.BTN | H. Widiono | 1291/Pid.B/2011/PN.TNG. | | |
| 9. | USU | 2 | 69/PID/2012/PT.DKI | Chairil Anwar, S.H., M.H. | 1776/Pid.B/2010/PN.JKT.PST | | |
| | | 1 | 660/PID/2011/PT.MDN | Ohan Burhanuddin P., S.H., M.H. | 1.223/Pid.B/2011/PN.Mdn | | |
| | | 2 | 760/PID/2011/PT.MDN | Nuzuardi, S.H., M.H. | 2.664/Pid.B/2011/PN.Mdn | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|----------------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|
| 10. | | Andalas | 1 | 237/PID/2011/ PT.PDG | Anasroel Haroen, S.H.M.H. | 80/PID.B/2011/ PN. MR | 23/TIPIKOR/2011/ PT.PDG | |
| | | | | | | | 97/PID/2007/ PT.PDG | |
| 11. | | Univ. Jambi | 1 | 09/Pid. Sus/2010/ PT.MALUT | H. Wahidin, S.H., M.H. | 77/Pid.Sus/2009/ PN.SS | | |
| | | | 2 | 15/PID/2009/ PT.MAL | Tumpak Situmorang, S.H. | 36/Pid.B/2009/ PN.MSH di Piru | | |
| 12. | | Unsyiah | 1 | 265/PID/2010/ PT.BNA | Johny Santosa, S.H., M.H. | 296/PID/2010/ PN.BNA | | |
| | | | 2 | 136/ Pid.B/2011/ PT.BNA | Eddy Joenarso, S.H., M.Hum. | 85/Pid.B/2011/ PN.SGI | | |
| | | | 3 | 85/PID/2011/ PT.BNA | Johny Santosa, S.H., M.H. | 78/Pid.B/2010/ PN.CAG | | |
| | | | 4 | 243/PID/2011/ PT.BNA | Al Jaman Sutopo, S.H., M.H. Dan Johny Santosa, S.H., M.H. | 152/Pid.B/2011/ PN.MBO | | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|--|--|
| 13. | HuMa | 1 | 71/Pid/2011/ PT.MDO | Andreas Don Raede, S.H., M.H. | 120/Pid.B/2010/ PN. THAN | | |
| | | 2 | 41/Pid. Sus/2011/ PT.PR | Bahtera Perangin Angin, S.H. | 212/Pid.Sus/2011/PN.Spt | | |
| | | 3 | 31/PID/2011/ PT.MTR | Sri Muryanto, S.H., M.H. | 485/PID.B/2010/ PN.MTR | | |
| | | 4 | 22/Pid.B/ TPK/2011/ PT.DKI | Jurnalis Amrad | 31/Pid.B/TPK/2010/ PN.Jkt.Pst | | |
| 14. | Univ. Lampung | 1 | 115/Pid/2009/ PT.TK | Sabungan Parhusip, S.H., M.H. | 283/Pid.B/2009/ PN.TK | | |
| | | 2 | 01/Pid/ TPK/2011/ PT.TK | Sutarto, KS, S.H., M.H. | 694/Pid.Sus/2010/ PN.TK | | |
| | | 3 | 109/Pid/2010/ PT.TK | Sutoyo, S.H., M.H.; Ulilbasa Hutagulung, S.H.; F. Willem Saija, S.H., M.H. | 1819/Pid.B/2009/ PN.TK | | |
| | | 4 | 34/Pid/2011/ PT.TK | H. Zulkarnain Pak Negara, S.H.; Sabungan Parhusip, S.H., M.H.; Sudtman WP, S.H. | 06/Pid.B/2011/ PN.BU | | |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 15. | Univ. Lambung Mngkurat | 1 | 08/PID. SUS/2012/ PT.BJM | Gatot Supramono,S.H.,M.H. | 179/Pid.Sus/2011/ PN.Amt | | |
| | | 2 | 149/PID. SUS/2010/ PT.BJM | Ester Siregar, S.H., M.H | 133/Pid.SUs/2010/ PN.Mtp | | |
| | | 3 | 85/PID/2008/ PT.BJM | Juliana Wullur, S.H., M.H. | 89/PID.B/2008/ PN.MRB. | | |
| | | 4 | 62/PID. SUS/2010/ PT.BJM | DR. Hj. Sri Sutatiek, S.H., M.Hum | 302/PID.SUS/2009/ PN.Plh | | |
| Total | | 40 Putusan PT | | | 40 Putusan PN | 2 Putusan PT bukan pasangan | 0 |

Tabel VIII: Jumlah Putusan Perkara Perdata

| No. | Jejaring | Putusan PT pasangan | Nama Hakim | Putusan PN (pasangannya) | Putusan PN bukan pasangan | Putusan PN bukan pasangannya |
|-----|------------|------------------------------|---|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1. | UJI | 1 42/PDT/2011/ PT.Y | H. Hamdi, S.H., M.H.um. | 106/Pdt.Plw/ 2010/ PN.Slm | | |
| | | 2 44/PDT/2011/ PTY. | Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. | 133/Pdt.G/2010/ PN.Slmm | | |
| 2. | 45 Makasar | 1 317/PDT/2011/ PT.MKS | Ida Bagus Putu Madeg, Djamer, Pasaribu, Suhardjono | 44/Pdt.G/2010/ PN.MKS | | |
| | | 2 240/PDT/2011/ PT.MKS | A.K. Paruasari, S.H., M.H.; Hj. Rosmina Agus, S.H., M.H.; Muh. Tarid Palimari, S.H., M.H. | 02/Pdt.G/2011/ PN.JO | | |
| | | 3 423/PDT/2011/ PT.MKS | Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.; Heri Sukemi, S.H., M.H.; Dr. H. Zaimuddin, S.H., M.H. | 313/Pdt.G/2009/ PN.MKS | | |

Lampiran

| | | | | | | | |
|----|---------|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 3. | Untan | 1 | 06/PDT/2011/ PT.PTK | Torang H. Tampubolon, S.H., M.H | 01/Pdt.G/2010/ PN.PTSSB | | |
| | | 2 | 44/PDT/2011/ PT.PTK | H. Edwarman, S.H.; Hari Almusahadi, S.H.; Djumain, S.H., M.Hum. | 21/Pdt.G/2010/ PN.SKW | | |
| | | 3 | 27/PDT/2011/ PT.PTK | Ida Bagus Somya, S.H., M.H.; H. Fadlol Tamaam, S.H., M.Hum.; Ahmad Subaidi, S.H., M.H | 103/PDT.G/2010/ PN.PTK | | |
| 4. | Udayana | 1 | 42/PDT/2009/ PT.DPS | I Wayan Sugawa, A.A. Anom Hartanindita | 01/Pdt/G/2008/ PN.Bli | | |
| | | 2 | 127/PDT/2011/ PT.Dps | I Wayan Sugawa, S.H., M.Hum.; Sonhaji, S.H.; Hartono Abdul Murad, S.H., M.H. | 172/PDT.G/2010/ PN.SGR | | |
| | | 3 | 69/PDT/2011/ PT.DPS | I Made Ariwangsa, S.H.; Ida Bagus Djagra, S.H.; H. Mohammad Idroes, S.H., M.Hum. | 385/PDT.G/2010/ PN.Dps | | |
| 5. | UMM | 1 | 236/Pdt.G/2011/ PTA.Sby | Drs. H. Jaliansyah | 1270/Pdt.G/2011/ PA.Kab.Mlg | | |
| | | 2 | 334/PDT/2009/ PT.SBY | H. Damsuri Nungjik, S.H., M.H.; Juliana Wullur, S.H., M.H.; Maede Rawa Ariyawan, S.H., M.Hum. | 691/Pdt.G/2008/ PN.SBY | | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|---|--------------------------|---|-----------------------------|--|--|
| 6. | Unsoed | 1 | 262/Pdt/2011/ PT.Smg | H. Bachtiar AMS, S.H.; Kornel Sianturi, S.H., M.Hum; Abid Saleh Mendrofa, S.H. | 24/Pdt.Plw/2010/ PN.Kds | | |
| | | 2 | 356/Pdt/2009/ PT.Smg | Kornel Sianturi, S.H., M.Hum; Sudjono, S.H.; Heru Iriani, SH, M.Hum | 150/Pdt.G/2008/PNSka | | |
| 7. | Unpas | 1 | 361/Pdt/2011/ PT.Bdg | H. Ariansyah B. Dali P. | 26/Pdt.G/2011/ PN. Tsm | | |
| | | 2 | 291/PDT/2009/ PT.Bdg | R. Henry Silaen, S.H. | 16/PDT.G/2008/ PN.CJ | | |
| | | 3 | 103/PDT/2011/ PT.Bdg | Robinson Tarigan, S.H., M.H. | 26/PDT.G/2010/ PN.DPK | | |
| 8. | Univ. Pancasila | 1 | 06/PDT/2012/ PT.Medan | Dr. Hj. Marni Emmy Mustafa | 300/PDT.G/2009/ PN.Medan | | |
| | | 2 | 216/PDT/2010/ PT.MKS | H. Zahruil Rabain, S.H., M.H. | 20/PDT.G/2009/ PN.Maros | | |
| | | 3 | 381/PDT/2009/ PT.MDN | Prof. Dr. Jatinar Nababan, S.H., M.Hum. | 197/PDT.G./2008/ PN.MDN | | |
| 9. | USU | 1 | 363/Pdt/2011/ PT.Mdn | H. Maenong, S.H., M.H. | 28/Pdt.G/2010/ PN.TTD | | |
| | | 2 | 22/Pdt/2011/ PT.Mdn | Untung Widarto | 73/Pdt.G/2010/ PN.Mdn | | |
| | | 3 | 111/PDT/2011/ PT.MDN | Dr. H. Muh. Daming Sunusi, S.H., M.H. | 129/Pdt.G/2010/ PN.Mdn | | |

Komisi Yudisial RI

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------|----|----------------------------|--|--|----|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 10. | Andalas | | | | | | | 65/Pdt.G./2010/ PT.PDG | 65/Pdt.G./2002/ PN.Pdg | |
| | | | | | | | | 04/PDT/2011/ PT.BNA | 02/Pdt/G/2000/ PN.BT | |
| | | | | | | | | | 31/PDT.G/2004/ PN.PRM | |
| | | | | | | | | | 12/PDT.G./1991/ PN.PYK | |
| 11. | Univ. Jambi | 1 | 26/PDT/2011/ PT.JBI | | Partomuan Sihombing | | 17/Pdt.G/2010/ PN.Mab. | | | |
| | | 2 | 02/Pdt/2012/ PT.JBI | | Eddy Pangaribuan | | Putusan Sela Nomor: 68/ Pdt.G/2011/ PN.JBI | | | |
| | | 3 | 44/Pdt/2010/ PT. Sultra | | Benar Karo-Karo, s.H., M.H. | | 03/Pdt.G/2009/ PN. Unh | | | |
| 12. | Unsyiah | 1 | 16/PDT/2010/ PT.BNA | | Johny Santoso, S.H. dan Eddy Jecnarso, S.H. | | 08/Pdt.G/2009/ PN.Mbo | | | |
| 13. | HuMa | 1 | 112/PDT/2010/ PT.MTR | | Hendrik Pardeede | | 107/PDT.G/2009/ PN.MTR | | | |
| 14. | Univ. Lampung | 1 | 45/Pdt/2009/ PT.TK | | Sabungan Parhusip, S.H., M.H. ; P. Manalu Rambe, S.H., M.H. ; H. Sarifudin, S.H. | | 13/Pdt.G/2008/ PN.KTA | | | |
| 15. | Univ. Lambung Mngkurat | 1 | 83/PDT/2011/ PT.BJM | | Yakup Ginting, S.H., CN, MKN; Purwanto; Subaryanto, S.H., M.H. | | 51/Pdt.G/2011/ PN.Bjm | | | |
| Total | | 31 | putusan PT | | | 31 | Putusan PN | 2 | putusan PT bukan pasangan | |
| | | | | | | | | | 4 | putusan PN bukan pasangan |

Lampiran III

Rekapitulasi Catatan dari Para Peneliti

| Aspek prosedural hukum acara | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| No. | Catatan Peneliti Jejaring | Catatan Tim Analisis | Kode Jejaring |
| 1 | Putusan hakim sudah memenuhi prosedur hukum acara perdata (Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG). | | UMM-1a, 1b Untan-1a, 1b Untan-2a, 2b Untan-3a, 3b Untan-4a, 4b Unlam-5a, 5b UII-4b UII-5a, 5b Unand-2a Unand-5a USU-3a Unja-4a, 4b Unsyiah-3a, 3b Unsyiah-4a, 4b Unsyiah-5a, 5b |
| 2 | Secara formalitas telah memenuhi prosedur hukum acara pidana. | Belum dimaknai menghasilkan putusan yang adil (UMM-4a). Meski ada ketidakcermatan redaksional (UII-1b). Tapi terdakwa tidak didampingi penasihat hukum (Unja-5a). | UMM-4a Untan-5a, 5b Unlam-1a, 1b Unlam-2a, 2b Unlam-3a, 3b UII-1a, 1b UII-2a, 2b UII-3a, 3b Unand-3a, 3b USU-4a, 4b USU-5a, 5b Unja-3a, 3b Unja-5a, 5b |
| 3 | Secara formalitas telah memenuhi prosedur hukum acara, juga kecukupan dua alat bukti, tetapi secara substansial belum memenuhi. | | UMM-3a |

Komisi Yudisial RI

| | | | |
|----|---|---|--|
| 4 | Hakim belum menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara benar. | Ada ketidakcermatan dalam sistem pembuktian | UMM-2a, 2b UMM-3b UMM-5a, 5b Unlam-4b |
| 5 | Hakim gagal memeriksa aspek formal putusan (menilai kompetensi absolut peradilan dan tuntutan provisional), ada keberpihakan (unfair trial). | | UMM-4b |
| | Hakim memenuhi Pasal 197 ayat (1) huruf d, tetapi tak menyebutkan alat bukti, juga tidak menyebutkan adanya keyakinan. | | Unlam-4a |
| 6 | Putusan hakim pengadilan agama memenuhi minimal alat bukti yang sah sesuai Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBC. | | UMM-1a, 1b |
| 7 | Tidak ada alat bukti tambahan. | | UMM-1a, 1b |
| 8 | Majelis hakim pengadilan agama telah melakukan penerapan hukum pembuktian sesuai dengan perjanjian/ undang-undang, doktrin ahli hukum, yurisprudensi. | UMM-1a: dalam butir 2 dinyatakan yurisprudensi tidak digunakan. | UMM-1a, 1b |
| 9 | Majelis hakim pengadilan agama sudah memuat secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat/JPU dan penasihat hukum di dalam pertimbangannya. | | UMM-1a, 1b Unlam-4a |
| 10 | Hari/ tanggal musyawarah ditetapkan berbeda dengan hari/ tanggal putusan diucapkan. | | Unlam-4a UII-1a UII-3a USU-3a |
| 11 | Hari/ tanggal musyawarah ditetapkan sama dengan hari/ tanggal putusan diucapkan. | | UMM-1a, 1b Unand-2a USU-4b |

| Aspek hukum material | | | |
|----------------------|--|--|--|
| No. | Catatan Peneliti Jejaring | Catatan Tim Analis | Kode Jejaring |
| 1 | Hakim telah membuktikan unsur-unsur perbuatan yang didakwakan selama persidangan berdasarkan UU dan fakta-fakta hukum. | <p>Dakwaan subsider yang dibuktikan (UII-1a).</p> <p>Dalam amar putusan tidak disebutkan perintah agar terdakwa ditahan (Unja-3b).</p> <p>Hakim menyatakan PN keliru dalam menerapkan hukum, lalu mengadili sendiri (Unja-4b).</p> | <p>Untan-2a</p> <p>Unlam-1a</p> <p>UII-1a, 1b</p> <p>UII-2a</p> <p>UII-3a</p> <p>Unand-3a, 3b</p> <p>USU-5a, 5b</p> <p>Unja-3a, 3b</p> <p>Unja-4b</p> <p>Unja-5a, 5b</p> <p>Unsyiah-4a, 4b</p> <p>Unsyiah-5a, 5b</p> |
| 2 | Dasar gugatan sama dengan dasar hukum yang dipakai oleh hakim. | <p>Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (UMM-1a)</p> <p>Dipicu perbedaan agama (Unlam-5a, 5b).</p> <p>Telah memperhatikan kelengkapan sumber hukum terkait unsur-unsur substansial (UII-5a).</p> | <p>UMM-1a, 1b</p> <p>Unlam-5a, 5b</p> <p>UII-5a, 5b</p> |
| 3 | Putusan telah memenuhi unsur substansial dari gugatan/dakwaan, dari perspektif pemaknaan material tentang peristiwa hukum dan pembuktian dalil dan pemaknaan hukum adat dalam memutus perkara. | | <p>Untan-1a</p> <p>Untan-4b</p> |
| 4 | Hakim sudah tepat dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. | | Untan-3a, 3b |

Komisi Yudisial RI

| | | | |
|----|---|--|--|
| | Ada yurisprudensi dan doktrin yang dipakai sebagai acuan. | Yurisip No 275K/ Pid/1982 & 01K/ Pid/2000 (UII-3b). Yurisip. No. 2177K/ Pdt/1983 jo No. 1742K/ Pdt/1983 jo No. 343K/ Sip/1975 (UII-4b) Tak menyebut nomor yurisip; hakim menggunakan pasal berbeda dari dakwaan (USU-4a). Ada teori-teori yang dikutip (Unja-5a). | UII-3b UII-4b USU-4a Unja-5a, 5b |
| 5 | Hakim telah mencerminkan pemaknaan hukum material, tetapi hakim menyimpangi unsur yang didakwakan dengan mengadili sendiri. | | Untan-5b |
| 6 | Tidak ada yurisprudensi yang digunakan, tetapi ada doktrin dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang digunakan (hukum adat dan kebiasaan). | Doktrin dimaksud terkait masalah hadonah (wali). Seharusnya ada putusan MA No. 44 K/AG/1998. | UMM-1a, 1b |
| 7 | Hakim dapat membuktikan dengan menggunakan konstruksi hukum. | Konstruksi a-contrario (UII-2a) Konstruksi linier atau normatif (UII-2b) | UII-2a, 2b |
| 8 | Hakim mempertimbangkan semua unsur dasar gugatan yang diajukan para pihak | Untuk kasus tanah, hakim juga mempertimbangkan UUPA (USU-3a). | UMM-1a, 1b USU-3a |
| 9 | Tidak teridentifikasi adanya konklusi yang terlalu dipaksakan. | | UMM-1a, 1b |
| 10 | Hakim tidak dapat membuktikan unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, terdapat penafsiran yang tidak tepat. | Ada etiket tidak baik yang tidak dipertimbangkan (Untan-2b). Belum maksimal karena hakim tidak menggunakan doktrin/ yurisprudensi (Unlam-3a) Ada kesalahan penafsiran "setiap orang" (Unlam-4a, 4b) | Untan-2b Unlam-1b Unlam-3a,3b(?) Unlam-4a, 4b |
| 11 | Hakim tidak mampu membuktikan unsur tindak pidana dan unsur kesalahan terdakwa secara lengkap, sesuai dengan ketentuan hukum pidana material dalam dakwaan primer dan subsider JPU. | | UMM-2a, 2b UMM-5a, 5b |
| 12 | Unsur tindak pidana terbukti, tetapi hakim tidak berupaya membuktikan dakwaan alternatif kedua (karena itu tidak cermat) | | UMM-3a |

| | | | |
|----|---|---|----------------------|
| 13 | Argumentasi dan pertimbangan hakim disusun secara kontradiktif. | | UMM-3b |
| 14 | Terjadi dualisme putusan, di satu sisi amar menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, tetapi hakim memeriksa pokok perkara. | | UMM-4a |
| 15 | Hakim belum memenuhi unsur substansial dari dakwaan/gugatan, yakni dari perspektif pemaknaan material tentang peristiwa hukum dan pembuktian dalil-dalil. | | Untan-4a Untan-5a |
| 16 | Hakim gagal membuktikan unsur-unsur yang digugat dan telah melampaui batas kewenangan dalam melakukan judicial review terhadap objek perkara. | | UMM-4b |
| 17 | Hakim belum melakukan analisis unsur PMH secara cermat. | | Untan-1b |
| 18 | Hakim tidak mencantumkan faktor apa yang membuatnya meringankan sanksi. | Sebenarnya ada disebutkan faktor kepribadian terkait kultur (Unlam-4b). | Unlam-4b (?) |
| 19 | Hakim banding menilai ada cacat formal putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga putusan dibatalkan tanpa mempertimbangkan pokok perkara. | Kumulasi subjektif tidak ada hubungan hukum. | UII-4b |

Komisi Yudisial RI

| Aspek Penalaran hukum | | | |
|-----------------------|---|--|---|
| No. | Catatan Peneliti Jejaring | Catatan Tim Analisis | Kode Jejaring |
| 1 | Hakim telah memberikan analisis tuntas terhadap fakta dan hukumnya. | Khususnya terkait dakwaan subsidi (UII-1b) | UMM-1a, 1b Unlam-3a, 3b UII-1b UII-3a |
| 2 | Putusan sudah logis/amar putusan hakim sudah merupakan kesimpulan yang logis. | Penalaran logis, tapi cenderung normatif karena tidak mampu menangkap urgensi perkara/isu kasus itu (UII-2b). | UMM-1a, 1b Untan-1a Untan-2a Untan-3a, 3b Untan-4b Untan-5b Unlam-1a Unlam-2a, 2b Unlam-5a, 5b UII-2a, 2b UII-5a, 5b Unand-3a, 3b Unand-5a USU-3b USU-4b USU-5a, 5b Unja-3a, 3b Unja-4b Unja-5a, 5b Unsyiah-4a, 4b |
| 3 | Hakim melakukan penemuan hukum dengan metode konstruksi. | Tak jelas konstruksi dimaksud (UMM-1a). Tidak mempertimbangkan lagi pokok perkara dinilai konstruksi (UII-4b). Hakim mengikuti yurisp. memakai pasal lain (kejahatan sejenis) daripada pasal yang didakwa (USU-4a) | UMM-1a, 1b UII-4b USU-4a |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 4 | Hakim berpikir tidak runtut, tidak sistematis, dan ada logika melompat. | Penafsiran unsur “setiap orang” telah mengubah konstruksi yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 (Unlam-4a). Secara substansial, penalarannya tidak logis (UII-1a) | UMM-2a, 2b UMM-5a, 5b Untan-1b Untan-2b Untan-4a Unlam-1b Unlam-4a, 4b UII-1a |
| 5 | Putusan ini menjadi sesat hukum dan sesat sosial. | | UMM-2a, 2b UMM-5a, 5b |
| 6 | Hakim salah menerapkan hukum dan sesat berpikir, sehingga kesimpulannya terlalu dipaksakan. | | UMM-4b |
| 7 | Hakim belum menunjukkan alur yang logis dan sistematis, sebab ada bagian-bagian yang tidak disentuh oleh hakim. | Hakim ingin meringankan hukuman (UMM-3a). Hakim tidak tegas menerapkan hukum material (USU-4a). | UMM-3a, 3b Untan-5a USU-4a |
| 8 | Hakim gagal berpikir sistematis-problematis, walau masih mencerminkan penalaran yang simpatis-generalis, sehingga menghasilkan kesimpulan logika melompat. | | UMM-4a |
| 9 | Argumentasi dari penasihat hukum sama sekali tidak ditampilkan. | | Unand-4b |
| 10 | Hakim mengabaikan adanya putusan pengadilan lain/ lembaga lain, sehingga mengganggu kepastian hukum. | Sudah ada putusan MA yang membatalkan sertifikat (USU-3a). Hakim PT memperbaiki logika berpikir hakim PN ini (tak mungkin menghidupkan lagi yang sudah mati). Sudah ada akta hibah, jadi tak bisa lagi diterbitkan sertifikat hak milik (Unja-4a). | USU-3a Unja-4a |

Komisi Yudisial RI

| Aspek penggalian nilai-nilai yang hidup (non-yuridis) | | | |
|---|--|--|--|
| No. | Catatan Peneliti Jejaring | Catatan Tim Analisis | Kode Jejaring |
| 1 | <p>Putusan mengakomodasi nilai kemanfaatan yang hidup di masyarakat.</p> <p>Terindikasi adanya faktor-faktor nonyuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius).</p> | <p>Perbedaan keyakinan dianggap faktor nonyuridis untuk dikabulkannya perceraian (Unlam-5a, 5b).</p> <p>Juga faktor politik (protes negara lain soal asap; UII-2a).</p> <p>Ada nilai kemanusiaan dan sosial dimasukkan dalam pertimbangan hakim PT (Unand-4b).</p> <p>Ada nilai edukatif (menjunjung kepastian dan hierarki peradilan; USU-3b).</p> <p>Faktor anak kandung sebagai korban (Unja-5b).</p> | <p>Untan-1a</p> <p>Unlam-1a</p> <p>UII-4b</p> <p>UMM-1a, 1b</p> <p>Unlam-3a, 3b</p> <p>Unlam-4a, 4b</p> <p>Unlam-5a, 5b</p> <p>UII-1b</p> <p>UII-2a</p> <p>UII-5a, 5b</p> <p>Unand-3a</p> <p>Unand-4b</p> <p>USU-3b</p> <p>Unja-5b</p> <p>Unsyiah-4a, 4b</p> |
| 2 | Putusan telah cukup mempertimbangkan faktor memberatkan/meringankan. | | UII-1a |
| 3 | Putusan ini tidak mengandung keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. | Fakta penting diabaikan bahwa peralihan hak telah selesai melalui akta hibah, jadi tak bisa diterbitkan lagi hak milik (Unja-4a). | <p>UMM-2a, 2b</p> <p>UMM-3a</p> <p>UMM-5a, 5b</p> <p>Untan-4a</p> <p>Unja-4a</p> |
| 4 | Putusan ini tidak memberikan perlindungan pada HAM (selain tidak mengandung nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian). | Kasus aborsi | UMM-3b |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 5 | Putusan belum menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. | <p>Terkait objek sengketa (Untan-1b).</p> <p>Tapi sudah dianggap adil dan bermanfaat (Unlam-2a, 2b).</p> <p>Kasus tanah adat, tapi hakim tak menggali hukum adat (Unand-1b).</p> | <p>Untan-1b</p> <p>Untan-3a, 3b</p> <p>Untan-5a, 5b</p> <p>Unlam-1b</p> <p>Unlam-2a, 2b</p> <p>UII-2b</p> <p>UII-3a</p> <p>Unand-1b</p> <p>Unand-3b</p> <p>Unand-5a</p> <p>USU-4a</p> <p>USU-5a, 5b</p> <p>Unja-3a, 3b</p> <p>Unja-4a, 4b</p> <p>Unsyiah-5a, 5b</p> |
| 6 | UU saja yang dipakai sebagai acuan. Putusan belum berani keluar dari ajaran positivisme. | Contoh: nilai-nilai yang hidup di masyarakat, dan HAM belum menjadi prioritas (UMM-4a). | <p>UMM-4a, 4b</p> <p>USU-3a</p> <p>Unja-5a</p> |
| 7 | Putusan menggambarkan keadilan birokratis, belum keadilan substantif. | <p>Keadilan birokratis=keadilan menurut UU (Untan-1a).</p> <p>Putusan terasa kering dan miskin dari doktrin, yurisprudensi, falsafah (UII-3a)</p> | <p>Untan-1a</p> <p>Untan-4b</p> <p>UII-3a</p> |
| 8 | Filosofi pemidanaan pada asas preventif dan edukatif sesuai UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, bukan lagi retributif | | Untan-2a, 2b |
| 9 | Hakim PT meringankan hukuman, tetapi tidak memberi pertimbangannya. | | USU-4b |

Komisi Yudisial RI

| Aspek profesionalisme hakim | | | |
|-----------------------------|---|--|---|
| No. | Catatan Peneliti Jejaring | Catatan Tim Analisis | Kode Jejaring |
| 1 | Hakim berlaku profesional dalam menjalankan tugasnya. | <p>Peneliti luput menyimak ketidakcermatan hakim menyebutkan tempat dilangsungkannya perkawinan (Unlam-5b).</p> <p>Tapi, hakim semata menekankan aspek kepastian hukum (UII-5a).</p> <p>Hakim sengaja menggunakan hukum nasional (bukan adat) demi keadilan ekonomis (Unand-2a).</p> <p>Walau ada catatan bahwa hakim PT meringankan hukuman tetapi tak ada pertimbangannya (USU-4b).</p> <p>Sayangnya, tidak ada keterangan terdakwa tetap ditahan (Unja-3b).</p> <p>Ada catatan bahwa aspek penjerahan kurang diperhatikan (Unsyiah-4a, 4b). Untuk Unsyiah-4a bahkan ada dissenting opinion yang menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukuman.</p> | <p>UMM-1a, 1b</p> <p>Untan-1a</p> <p>Untan-3b</p> <p>Untan-4b</p> <p>Unlam-1a</p> <p>Untan-5b (?)</p> <p>Unlam-2a</p> <p>Unlam-3a</p> <p>Unlam-5a, 5b</p> <p>UII-1b</p> <p>UII-2a, 2b</p> <p>UII-4b</p> <p>UII-5a, 5b</p> <p>Unand-2a</p> <p>Unand-3b</p> <p>Unand-5a</p> <p>USU-3a, 3b</p> <p>USU-4a, 4b(?)</p> <p>USU-5a, 5b</p> <p>Unja-3b(?)</p> <p>Unja-4b</p> <p>Unja-5b</p> <p>Unsyiah-3a, 3b</p> <p>Unsyiah-4a, 4b(?)</p> |
| 2 | Hakim tidak profesional, dilihat dari aspek yuridis formal dan substansial. | <p>Hakim cenderung fokus ke dakwaan subsider yang pidananya lebih ringan (UII-1a).</p> <p>Hakim menjatuhkan pidana 1 tahun, jadi tidak mengacu ancaman pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana minimal 3 tahun (Unja-3a). Ini diperbaiki di tingkat PT (Unja-3b).</p> | <p>UMM-2a, 2b</p> <p>UMM-4a</p> <p>Unlam-1b</p> <p>Unlam-4a, 4b</p> <p>UII-1a</p> <p>Unja-3a</p> <p>Unja-4a</p> |

| 3 | Hakim tidak profesional karena mengabaikan tuntutan kode etik + UU Kekuasaan Kehakiman. | Nilai religius, suara hati, dll. | UMM-3a, 3b Untan-1b Untan-2a Untan-5a |
|-------------------|--|--|--|
| 4 | Hakim tidak profesional karena putusannya belum layak menjadi hukum yang benar dan adil. | Banyak salah ketik huruf dan angka (Unand-1b). | UMM-3b UMM-5a, 5b Untan-4a Unand-1b |
| 5 | Hakim tidak profesional karena kasus ini seharusnya gabungan tindak pidana (samenloop), tetapi tidak dipertimbangkan. Hakim juga hanya mempertimbangkan keterangan saksi verbalisat yang tidak disumpah. | | Unand-3a |
| 6 | Hakim tidak profesional karena ia kurang kreatif menstrukturkan dasar-dasar hukum yang digunakan, tidak mencari doktrin atau falsafah sebagai dasar putusannya. | | UII-3b |
| 7 | Hakim tidak profesional karena hakim PT menjatuhkan pidana mati, padahal terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana mati pada pengadilan lain. | | Unand-4b |
| Aspek rekomendasi | | | |
| No. | Catatan Peneliti Jejaring | Catatan Tim Analisis | Kode Jejaring |
| 1 | Telah melakukan upaya perdamaian agar ditegaskan oleh para hakim. | | UMM-1a, 1b |
| 2 | Hakim melakukan kontrol terhadap pelaksanaan putusan yang dibuatnya. | | UMM-1a. 1b |
| 3 | Perlu pendidikan hakim untuk pemantapan integritas moral, intelektual, dan integritas sosial. | | UMM-2a, 2b UMM-5b |
| 4 | Perlu ada peingkatan kemampuan hakim dalam prosedur acara bedimensi HAM | | UMM-4b |
| 5 | Perlu pendidikan dalam metode penemuan hukum dan penalaran hukum. | | UMM-5b |
| 6 | Dissenting opinion perlu diberi tempat. | | UII-3a |
| 7 | Teori atrbusi correspondence inference dari Jones & Davis dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan berat ringannya hukuman. | | UII-3a |
| 8 | Ancaman minimal dalam UU seharusnya juga diperhatikan. | | Unja-3a |

Sekilas Program AKUNTABILITAS!

AKUNTABILITAS! merupakan program yang digelar The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) dengan dukungan USAID Indonesia. Program ini berlangsung dari tahun 2012 sampai 2014. Kegiatan dalam program meliputi Workshop dan Training Penguatan Pola Komunikasi Lembaga Negara dengan Media Massa di 13 provinsi. Kedua kegiatan tersebut berlangsung di sejumlah kota, yakni Banda Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, Banjarmasin, Denpasar, Mataram, Makassar dan Jayapura. Pada masing-masing kota itu, JPIP telah terlebih dulu membangun jejaring koordinator daerah (korda) guna memantau perkembangan wacana akuntabilitas serta kiprah lembaga negara di daerah.

Program AKUNTABILITAS! ini juga mengikutsertakan tujuh lembaga negara. Lembaga-lembaga negara mitra program tersebut adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/ Tim Quality Assurance (TQA), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB), Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Disamping itu juga ikut aktif adalah lembaga negara seperti Komisi Yudisial (KY), Komisi Informasi Pusat (KIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Melalui program AKUNTABILITAS! ini lembaga-lembaga negara mitra program berkesempatan bertemu langsung dengan para insan media lokal. Selain itu, kehadiran anggota DPR dan DPD pada saat acara berlangsung juga kian memperluas cakrawala informasi tentang akuntabilitas pemerintahan sampai ke tingkat daerah. Dalam program ini pula, JPIP melakukan pendokumentasian kiprah lembaga negara, mendiseminasikan informasi dari lembaga negara ke media lokal serta nasional dan menulis isu atau wacana aktual dalam kolom akuntabilitas di harian Jawa Pos.

Sepanjang dua tahun program, JPIP telah menjadi terminal lalulintas informasi dua arah antara jaringan media massa di 13 provinsi dengan lembaga negara yang menjadi mitra kegiatan ini. Pada akhir program AKUNTABILITAS! JPIP-USAID juga telah menggelar penganugerahan Journalist Awards kepada karya-karya jurnalistik tentang isu akuntabilitas dan lembaga mitra yang dituliskan jaringan media mitra selama dua tahun program berjalan. JPIP juga berinisiatif menerbitkan berbagai buku kiprah lembaga negara mitra program serta terkait isu-isu penting lembaga tersebut, sebagaimana buku dihadapan anda. Salam AKUNTABILITAS! ***

TIM JPIP UNTUK PROGRAM AKUNTABILITAS!

Rohman Budijanto (Direktur Eksekutif JPIP, Project Director Akuntabilitas SIAP II), **Dadan S. Suharmawijaya** (Wakil Direktur JPIP, Program Manager Akuntabilitas SIAP II), **Rosdiansyah** (Jurnalis JPIP), **Nur Hidayat** (Jurnalis JPIP), **Taufik Akbar** (Jurnalis JPIP), **Hariatni Novitasari** (Jurnalis JPIP), **Hariyadi** (Public Accountability Specialist), **Wawan Sobari** (Survey Analyst), **Kukuh Setio Wibowo** (Media Specialist), **Rhido Jusmadi** (Legal Specialist), **Owen Podger** (Governance Consultant), **Theresia Oemiati** (Office Manager), **Amirudin** (Accounting Manager), **Mutmainah** (Administration Officer), **Ifany Ratna Ekandini** (Accounting Officer), **Feri Sulisty Utomo** (JPIP Officer)

KOORDINATOR DAERAH JPIP

Erniwati & Nurdin Tappa (Fajar Institute of Pro-Otonomi/FIPO Makassar), **H. Ikhroman & Fathul Rahman** (Lombok Pos), **Budi Darmawan** (Pontianak Pos), **A. Sofyan Masykur** (Kaltim Pos), **Valdesz J. Nainggolan** (Sumut Pos), **Amin Surachmad** (Radar Jogja), **M. Thosim** (Radar Bali), **Thomas Loli** (Cendrawasih Pos), **Riza Budiwan** (Rakyat Aceh), **Denny Setiawan** (Radar Banjar), **Makali Kumar** (Bandung Ekspres), **Montosori** (Padang Ekspres)